

**UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI MODEL POSDAYA
(POS PEMBERDAYAAN KELUARGA)**

(the Model of Family Empowerment Program for Community Empowerment and
Poverty Alleviation)

Pudji Muljono¹⁾, Burhanuddin²⁾, Yannefri Bakhtiar³⁾

¹⁾Dep. Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi
Manusia-IPB, ²⁾Dep. Agribisnis Fakultas Ekonomi Manajemen-IPB, ³⁾Peneliti
Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia-LPPM-IPB

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui model pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga untuk pengentasan kemiskinan secara sistematis. Lokasi penelitian ini adalah semua posdaya binaan IPB dengan cakupan wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan analisis kinerja dan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan posdaya, maka dapat disusun berbagai rencana aksi pengembangan posdaya, antara lain: (1) perlunya pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengurus/dan kader posdaya, (2) resosialisasi posdaya secara vertikal dan horisontal ke seluruh pihak, (3) membangun jejaring usaha produktif untuk lebih memacu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, (4) pembelajaran dan pemotivasian pengurus/kader posdaya melalui kegiatan *study banding* dan *bechmarking* ke posdaya lain, (5) pengembangan koperasi posdaya sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : Family empowerment program, community empowerment, poverty.

ABSTRACT

This research aims to apply the concept of community empowerment through the model of family empowerment program in an effort to social and economic development for poverty alleviation by systematically action. The location of this research is all family empowerment program with coverage of Bogor Agricultural University that are in Bogor city, Bogor, Cianjur and Sukabumi regency. Based on performance analysis and identification of problems in the management of family empowerment program, it can be arranged various of family empowerment program development action plan, among other things: (1) the need for training to improve the quality of management family empowerment program, (2) resocialization of family empowerment program with vertically and horizontally to all parties, (3) building productive business network to trigger the growth of economic business community, (4) learning and motivating the board and personnel of family empowerment program through study activities and bechmarking appeal to others, (5) the cooperative development of family empowerment program to develop the institution of community economic activities.

Keywords : Family empowerment program, community empowerment, poverty.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi sejak akhir tahun 1997 telah menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan pencapaian hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama rezim Orde Baru (1967-1998). Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah kenyataan bahwa meningkatnya angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi selama orde baru tidak benar-benar merefleksikan terjadinya pemerataan kesempatan dan perolehan kesejahteraan secara bermakna. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan hanya melahirkan peningkatan kesejahteraan semu (pada sekelompok kecil orang yang sangat kaya), daripada yang secara riil dirasakan oleh mayoritas penduduk (penduduk miskin).

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 8,2% dari jumlah penduduk. Dalam RPJM 2004-2009 sasaran itu dipercepat pencapaiannya pada tahun 2009. Keputusan itu merupakan tekad dan kebijaksanaan pemerintah yang perlu didukung semua instansi dan institusi pembangunan. Agar upaya itu berhasil dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif. Pembangunan ekonomi yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi perlu melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan yang dilakukan seimbang dan mencapai sasaran. Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan partisipasi sosial. Sosial advokasi juga perlu dilakukan agar komitmen pembangunan lebih kuat (Suyono, 2007).

Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wasah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi kekeluargaan secara terpadu. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri dan

keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik (Suyono dan Haryanto, 2007). Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambut anjuran pemerintah untuk membangun sumberdaya manusia melalui partisipasi keluarga secara aktif. Proses pemberdayaan itu diprioritaskan pada peningkatan kemampuan keluarga untuk bekerja keras mengentaskan kebodohan, kemalasan dan kemiskinan dalam arti yang luas. Sasaran kegiatan yang dituju adalah terselenggarakannya upaya bersama agar setiap keluarga mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Dalam rangka pelaksanaan MDGs, pengembangan fungsi keluarga tersebut diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama, yaitu komitmen pada pimpinan dan sesepuh tingkat desa dan pedukuhan, kecamatan dan kabupaten, pengembangan fungsi keagamaan, fungsi KB dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi kewirausahaan dan fungsi lingkungan hidup yang memberi makna terhadap kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Mengacu pada kondisi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan kurang dapat menjalankan fungsi sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui model pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Kegiatan pemberdayaan keluarga dengan sasaran keluarga miskin di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir ini telah diinisiasi oleh Yayasan Damandiri dan telah dilaksanakan oleh peneliti P2SDM LPPM - Institut Pertanian Bogor yang menekankan pada aspek pemberdayaan keluarga dalam mengentaskan kemiskinan terutama tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat khususnya bagi semua segmen usia dalam keluarga melalui model pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat secara sistematis.

Target khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja posdaya;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan posdaya;
3. Menyusun rencana program aksi pengembangan posdaya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Kajian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metoda survei terbatas pada lokasi yang menjadi obyek penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Pada tahun pertama, penelitian berlangsung selama 8 bulan, mulai bulan April hingga bulan November 2009. Lokasi penelitian adalah posdaya binaan IPB (Posdaya Bina Sejahtera, Posdaya Mandiri, Posdaya Giri Mulya, Posdaya Benteng Harapan, Posdaya Sirnagalih, Posdaya An Nur dan Posdaya Melati). Cakupan wilayah penelitian meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tentang aspek kelembagaan dan profil posdaya diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi dengan informan kunci yang merupakan pengelola masing-masing posdaya. Informasi tambahan diperoleh dari kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader serta anggota posdaya yang dipilih secara acak berdasarkan latar belakang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Data mengenai potensi posdaya diperoleh melalui wawancara terstruktur dan persepsi dan aspirasi diperoleh melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*. Topik diskusi dalam FGD adalah hal-hal yang terkait dengan fokus kajian, mencakup kekuatan yang dimiliki posdaya, kelemahan posdaya, peluang yang dapat diambil oleh posdaya dan tantangan yang dihadapi posdaya. Peserta FGD adalah para anggota dari masing-masing posdaya yang mewakili keragaman anggota posdaya berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemilihan peserta dilakukan secara acak di lokasi penelitian.

Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan metoda komparatif, yaitu membandingkan kondisi

ideal dan kondisi riil di lapang, menggali pendapat-pendapat dari berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan model posdaya dilandasi dengan metode empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Keluarga Miskin menurut Posdaya

Berdasarkan hasil FGD dengan masing-masing pengurus posdaya diketahui bahwa penentuan kriteria keluarga miskin dari masing-masing posdaya berbeda dalam menentukan sasaran. Namun demikian secara umum dapat disimpulkan kriteria keluarga miskin yang digunakan oleh posdaya adalah sebagai berikut:

1. Ekonominya tidak mencukupi keperluan keluarga sehari-hari
2. Makan sekali sehari
3. Pekerjaannya kuli panggul
4. Pekerjaannya serabutan
5. Tempat tinggal lantai dari tanah
6. Penghasilan tak tentu
7. Satu rumah untuk beberapa KK (lebih dari 3 KK)
8. Luas rumah tidak mencukupi kelayakan/kebutuhan minimal (8 m²/kepala)
9. Pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga
10. Tidak mempunyai aset apapun
11. Tidak bisa menyekolahkan anak
12. Rumah semi permanen.

Untuk itu, posdaya dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya menetapkan sasaran berdasarkan kemampuan dari masing-masing posdaya. Sedangkan keluarga miskin menurut masyarakat adalah warga penerima BLT, raskin dan sebagainya. Jumlah keluarga miskin penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Sasaran posdaya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin penerima BLT, Raskin dan Sasaran Posdaya

Nama posdaya	Jumlah KK Wilayah Posdaya	Jumlah Gakin		
		BLT	RASKIN	POSDAYA
Bina Sejahtera	236	65	75	75
Mandiri	425	42	95	95
Benteng Harapan	400	140	300	150
Kenanga	159	27	27	88
Sirnagalih	654	109	117	117
An-Nuur	136	136	136	136
Melati	56	56	56	56

Kinerja Posdaya

Analisis kinerja posdaya dimaksudkan untuk mengukur dampak keberadaan posdaya sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara umum kinerja posdaya ada pada kategori baik karena posdaya telah menghasilkan beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Posdaya mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap bentuk-bentuk intervensi pembangunan. Semula mereka mempersepsikan setiap intervensi luar terhadap masyarakat selalu bermakna pemberian bantuan, khususnya bantuan materi/dana. Tetapi setelah mereka mengenal posdaya, yang mengusung konsep keswadayaan, gotong royong dan kemandirian, mereka mulai memahami bahwa setiap intervensi luar ke masyarakat tidak selalu berkonotasi pemberian bantuan khususnya bantuan dana. Intervensi bisa berupa kegiatan sosial, intervensi ide, nilai-nilai, cara kerja pemberdayaan dan sebagainya. Bahkan posdaya juga mampu meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri warga bahwa mereka mampu berperan aktif untuk membangun. Selama ini warga pada umumnya lebih banyak berperan sebagai sasaran pembangunan, tetapi setelah terlibat dalam posdaya, warga lebih banyak berperan sebagai perancang, pelaksana dan pengevaluasi program-program pembangunan di wilayahnya. Masyarakat menjadi lebih aktif karena posdaya berfilosofi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Posdaya mampu mendinamisasikan kehidupan masyarakat melalui meningkatnya partisipasi dan komitmen masyarakat dalam pembangunan. Sebelum posdaya ada, jumlah masyarakat yang terlibat dalam pembangunan,

baik sebagai penerima/sasaran program maupun sebagai kader relatif sedikit. Setelah posdaya ada, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan posdaya maupun yang memberikan layanan kepada masyarakat melalui posdaya. Selain itu, semakin banyak pula warga masyarakat yang mau menjadi kader posdaya. Warga yang semula kurang aktif dan cenderung tidak peduli dengan lingkungan, kini mulai "terusik" dengan keberadaan posdaya. Saat ini partisipasi masyarakat lebih banyak berupa partisipasi tenaga dan waktu, bukan dalam bentuk dana atau materi. Hal ini bisa dipahami karena kondisi ekonomi sehari-hari yang relatif rendah.

3. Kualitas keluarga-keluarga miskin yang ada di wilayah posdaya mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah posdaya ada. Indikator perubahan kualitas tersebut antara lain: 1) posdaya mampu mengubah *mindset* (cara pandang) gakin yang semula menilai rendah pendidikan menjadi gakin yang menilai penting pendidikan, 2) berani mengemukakan ide-ide perubahan pada saat musyawarah posdaya, 3) menilai penting kesehatan dengan rutin mengunjungi posyandu, posbindu sebagai bagian kegiatan posdaya, 4) jumlah balita kurang gizi berkurang.
4. Mulai muncul kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat, seperti munculnya usaha-usaha kecil di bidang pangan, kerajinan maupun jasa. Sebagai contoh usaha jus jambu biji merah, aneka keripik, budidaya jamur, keripik jamur, telur asin, cinderamata dan lain-lain. Usaha tersebut semula tidak ada, setelah ada Posdaya, warga tergerak untuk kreatif mencari tambahan penghasilan.
5. Masyarakat mulai menilai penting menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan memulai upaya mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos.

Permasalahan dalam Pengelolaan Posdaya

Kendala Fisik

Kendala fisik cenderung lebih kecil terungkap dibanding masalah non fisik. Tercakup pada kendala fisik adalah keberadaan sekretariat Posdaya yang belum mempunyai tempat khusus, tempat kegiatan usaha produktif (misalnya aula/workshop), dan ruang belajar siswa PAUD yang belum tersedia. Sekretariat

Posdaya umumnya menumpang pada bangunan lain yang biasa digunakan oleh masyarakat atau lembaga lainnya di masyarakat, misalnya di Majelis Ta'lim, mushola, rumah pengurus, atau di saung kelompok tani. Belum ada diantara 7 Posdaya yang memiliki sekretariat khusus.

Ruang belajar PAUD juga menjadi keluhan responden karena belum adanya tempat khusus yang memungkinkan dijadikan sebagai ruangan pendidikan. Ruangan olahraga di salah satu Posdaya dapat dijadikan sebagai tempat belajar PAUD namun harus menyesuaikan dengan jadwal olah raga masyarakat dan waktunya terbatas. Sedangkan Posdaya yang menggunakan rumah kader sebagai tempat belajar PAUD sangat merasa kekurangan luas areal belajar karena rumah yang sempit dan murid yang terus bertambah. Penggunaan sebagian areal mesjid juga dilakukan oleh beberapa posdaya, namun dalam waktu lama juga terasa mengganggu aktifitas ibadah dan juga tidak adanya areal bermain.

Kendala Non Fisik

Bagi sebagian masyarakat, Posdaya dianggap sebagai program pemerintah yang akan membagi-bagikan materi tertentu atau membawa proyek tertentu dan masyarakat menjadi sasaran proyek tersebut sebagai tenaga kerja pelaksanaan proyek. Meskipun pemahaman seperti ini tidak banyak muncul, namun hal ini dapat berpengaruh pada pelemahan semangat pengurus Posdaya, khususnya bagi Posdaya yang kondisi perkembangannya belum baik.

Kendala manajemen posdaya ditunjukkan dengan belum adanya jadwal pertemuan koordinasi antara pengurus Posdaya untuk membahas perkembangan Posdaya, dan sebagian pengurus beralih dengan aktifitas rutin harian yang menyebabkan sulitnya mencurahkan sedikit waktu bagi Posdaya. Ketersediaan jumlah kader menjadi kendala pada Posdaya tertentu. Pemberdayaan dengan filosofi keswadayaan memang memerlukan SDM sukarela dan berjiwa sosial yang tinggi.

Kendala kualitas SDM juga dirasakan oleh sebagian Posdaya dengan kurangnya ide-ide pengembangan kegiatan yang muncul dari pengurus, dan

kurangnya inisiatif untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak luar Posdaya untuk menjaring ide-ide dan dukungan pengembangan posdaya.

Dukungan pihak luar merupakan salah satu penentu keberhasilan Posdaya. Pada sebagian Posdaya pihak luar yang dianggap belum memberikan dukungan yang diharapkan adalah Ketua RT, aparat desa dan tokoh masyarakat. Mereka belum menunjukkan perhatian untuk mendorong dan membantu perkembangan Posdaya, bahkan sebagian dari mereka belum memahami program Posdaya. Selain itu, dukungan masyarakat sekitar utamanya para donatur untuk pengembangan kegiatan Posdaya yang banyak diperlukan guna kelancaran program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan belum banyak terlihat.

Rencana Program Aksi Pengembangan Posdaya

Berdasarkan analisis terhadap kinerja dan identifikasi masalah pengelolaan posdaya, maka dapat disusun berbagai rencana aksi pengembangannya, antara lain: (1) pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus/dan kader posdaya, (2) resosialisasi posdaya secara vertikal dan horizontal ke seluruh pihak, (3) membangun jejaring usaha produktif untuk lebih memacu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat yang baru, (4) pembelajaran dan pemotivasian pengurus/kader posdaya melalui kegiatan *study banding* dan *bechmarking* ke posdaya-posdaya lain, (5) merintis dan membangun koperasi posdaya sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Posdaya sebagai model pemberdayaan masyarakat telah memiliki kinerja yang baik karena mampu menghasilkan beberapa perubahan positif di masyarakat, baik fisik maupun non fisik.
2. Berbagai rencana aksi pengembangan posdaya yang dapat dilakukan, antara lain: pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengurus dan kader; resosialisasi posdaya secara vertikal dan horizontal ke seluruh pihak; membangun jejaring usaha produktif untuk lebih memacu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat; pembelajaran dan pemotivasian pengurus/kader posdaya melalui kegiatan

study banding dan *bechmarking*; serta merintis dan membangun koperasi posdaya sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

SARAN

1. Perlu adanya penegasan kembali sasaran dari masing-masing posdaya, penyegaran pengurus dan kader posdaya, melakukan resosialisasi Posdaya kepada semua pihak mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, aparat desa, aparat kecamatan dan pemkot/pemkab serta membangun jejaring usaha produktif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Perlu adanya pengembangan dan penguatan kegiatan posdaya dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia*. BPS, Jakarta.

Suyono, Haryono. 2007. *Mengentas Kemiskinan*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Brawijaya, Malang.

Rohadi Haryanto. 2007. *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Posdaya*. Balai Pustaka, Jakarta.

**MODEL OPTIMASI PELELANGAN IKAN DI PELABUHAN
PERIKANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN
NELAYAN NASIONAL**

(Fish Auction Optimal Model at Fishing Port In Order to
National Fisherman Income Enhanced)

**Anwar Bey Pane¹⁾ dan Ernani Lubis¹⁾, Thomas Nugroho²⁾ dan
Muhammad Syahrir R²⁾**

¹⁾Dep. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan-FPIK-IPB, ²⁾Dep. Manajemen
Sumberdaya Perikanan-UNMUL

ABSTRAK

Pelabuhan perikanan (PP) sebagai pusat ekonomi perikanan merupakan satu komponen penting dalam sistem perikanan tangkap yang perlu dimanfaatkan, diorganisir dan dikelola sebaik-baiknya terutama pada aktivitas pemasaran ikan. Pendapatan nelayan Indonesia yang masih rendah ternyata salah satunya akibat sistem pemasaran ikan di pelabuhan yang tidak menguntungkan nelayan. Pemasaran ikan dilakukan tanpa pelelangan ikan. Tujuan penelitian ini memformulasikan model pelelangan ikan optimal di PP dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan. Penelitian menggunakan metode survei. Aspek-aspek diteliti meliputi aspek utama yaitu aspek-aspek manajemen, sosial, budaya dan ekonomi kepelabuhanan dan kenelayanan disertai aspek tambahan bioteknis kepelabuhanan perikanan. Sampel diambil pada 4 PP/PPI yaitu PPS Nizam Zachman-Jakarta, PPN Palabuhanratu-Sukabumi, PPI Manggar-Balikpapan dan PPI Pontap – Makassar. Telah diperoleh model pelelangan ikan yang optimal yaitu Model Pelelangan Ikan Terintegrasi dan Moderen yang memiliki 2 (dua) submodel, yaitu Submodel-1: Pelelangan Ikan Terintegrasi, yaitu model pelaksanaan pengadaan pelelangan ikan bertahap dan terarah di suatu PPI dengan memperhatikan aspek kesiapan pelelangan dan pengintegrasian peran punggawa/juragan dengan mempertimbangkan kesiapan menuju standar pelelangan minimal dan efektif melalui penjaminan mutu ikan dan sanitasi TPI serta penataan ulang peran punggawa/juragan. Model ini dapat diterapkan untuk PPI Manggar dan PPI Pontap. Submodel-2 : Pelelangan Ikan Moderen dan Kontinyu, yaitu model pelaksanaan lelang bertahap dan terarah dengan memperhatikan peningkatan modernisasi aspek kesiapannya dan pertimbangan menuju pemenuhan standar pelelangan yang seharusnya mengacu pada standar internasional. Model ini dapat diterapkan untuk PPS Nizam Zachman Jakarta dan PPN Palabuhanratu.

Kata kunci : Pelabuhan perikanan, pelelangan ikan, model.

ABSTRACT

Fishing port (PP) as fishery economy centre is one important component in fishing catches system necessary utilised, organized and managed as well possible especially in fish marketing activity. Indonesia fisherman income that still low is caused by fish marketing system at port doesn't beneficial fisherman. Fish marketing is done without auction. This research aim is to formulate optimal fish auction model at port in order to fisherman income enhanced. This research used survey method with principal aspect that is management, social, culture and economy about fishing port and fisherman and addition aspect about port biotechnic. Fishing port example that taken PPS Nizam Zachman-Jakarta, PPN Palabuhanratu-Sukabumi, PPI Manggar-Balikpapan and PPI Pontap-Makassar. Got optimal fish auction model that is modern and integration fish

auction model that has 2 (two) submodel, that is submodel-1: Integration Fish Auction, is gradual and directional fish auction execution model at a fish landing place (PPI) with pay attention auction immediacy aspect and "punggawa"/agent role integration consideringly immediacy to effective and minimal auction standard with fish quality guaranty and sanitation at PPI with reorganisation role of "punggawa"/agent. This model applicable to PPI Manggar and PPI Pontap while submodel-2: Continuity and Modern Fish Auction, is directional and gradual auction execution model with pay attention the immediacy aspect modernization enhanced threaten international auction standard. This model applicable to PPS Nizam Zachman Jakarta and PPN Palabuhanratu.

Keywords : Fishing port, fish auction, optimal model.

PENDAHULUAN

Sejak tiga puluhan tahun yang lalu atau sejak era mulai dibangunnya pelabuhan perikanan (PP) dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) tahun 1970-an, kiranya sampai saat ini belum tercapai peningkatan taraf hidup nelayan di Indonesia yang cukup signifikan. Kelompok nelayan, terutama buruh nelayan yang mewakili lebih dari 80% jumlah seluruh nelayan, merupakan kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Perancis rata-rata pendapatan nelayan buruh berada diatas upah minimum nasional negara-negara tersebut sehingga tingkat kehidupannya baik/layak.

Upaya peningkatan taraf hidup nelayan di Indonesia sudah sering dilakukan, sejak era Departemen Pertanian s/d Departemen Kelautan dan Perikanan, yang dalam pelaksanaannya mulai dari pemberian pinjaman untuk pembelian alat tangkap, kapal dan juga disertai berbagai penyuluhan baik di tingkat lokal maupun nasional. Akan tetapi sampai sejauh ini program tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi perikanan merupakan satu komponen penting dalam sistem perikanan tangkap yang perlu dimanfaatkan, diorganisir dan dikelola sebaik-baiknya. Pelelangan ikan merupakan suatu aktivitas utama terpenting di PP yang perlu dikelola secara optimal, karena pada kegiatan pelelangan ikanlah sebenarnya ditentukan berapa besar penerimaan penjualan nelayan; yang pada tahap selanjutnya, menentukan berapa besaran pendapatan nelayan (nelayan pemilik dan nelayan buruh).

Terdapat sejumlah 750 PP dan PPI di Indonesia; 45,5 % diantaranya berada di Pulau Jawa (Ditjen. Perikanan, 2006 dalam Lubis, dkk, 2005). Seluruhnya meliputi 5 PP tipe samudera (PPS), 11 tipe nusantara (PPN) dan 40 PP tipe pantai (PPP), sisanya berupa 648 PPI. Sebagian besar PP/PPI tersebut baru dimanfaatkan secara minimal dalam pelaksanaan pelelangan ikan yang berdampak terutama masih rendahnya pendapatan nelayan. Cukup banyak pelelangan ikan tidak berjalan atau walaupun berjalan, sangat tidak optimal. Hal ini berpengaruh utama terhadap harga jual, mutu ikan dan peningkatan nilai tambahnya.

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan karakteristik nelayan nasional berdasarkan struktur kehidupannya baik sosial, budaya maupun ekonomi; menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan dan pengelola tempat pelelangan ikan (TPI) dalam pelaksanaan lelang ikan secara optimal di PP dan memformulasikan model pelelangan ikan optimal di PP dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan. Manfaatnya agar para nelayan mendapatkan harga jual yang layak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelelangan ikan.

Penelitian menggunakan metode survei. Aspek-aspek diteliti meliputi aspek utama yaitu aspek-aspek manajemen, sosial, budaya dan ekonomi kepelabuhanan dan kenelayanan disertai aspek tambahan bioteknis kepelabuhanan perikanan. Sampel diambil pada 4 PP/PPI yang mewakili 3 tipenya dan belum pernah atau tidak lagi melaksanakan pelelangan ikan yaitu PPS Nizam Zachman-Jakarta, PPN Palabuhanratu-Sukabumi, PPI Manggar-Balikpapan dan PPI Pontap –Makassar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah survey terhadap 2 lokasi pelabuhan perikanan (PP) dan 2 lokasi pangkalan pendataran ikan (PPI).

Penelitian terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan masing-masing tahapan selama 1 (satu) tahun. Tahapan penelitian tahun 1 adalah untuk memformulasikan model pelelangan yang optimal di pelabuhan perikanan. Tahun ke-2 adalah mendisain model optimasi pelelangan ikan pada 2 (dua) PP yang diperoleh berdasarkan

seleksi dari 4 (empat) lokasi PP contoh penelitian tahun pertama dan tahun ke-3 adalah aplikasi model optimasi pelelangan ikan di dua lokasi PP/PPI terpilih.

Tahapan pekerjaan yang dilakukan pada tahun ke-1 adalah :

1. Menginventarisasi karakteristik dan permasalahan pelabuhan perikanan dan nelayan;
2. Mengidentifikasi dan pendalaman karakteristik permasalahan pelelangan ikan berdasarkan struktur kehidupan pelakunya baik sosial, budaya dan ekonominya;
3. Merumuskan pemecahan awal permasalahan tidak terlaksana atau tidak optimalnya pelelangan ikan di pelabuhan perikanan bagi nelayan yang sesuai dengan karakteristiknya
4. Menyusun konsep tentang model optimasi pelabuhan perikanan yang sesuai dengan karakteristik nelayan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan secara berarti dalam mengatasi kemiskinan nelayan.

Pengumpulan Data

Data berkaitan dengan karakteristik kepelabuhanan perikanan dikumpulkan berdasarkan komponen-komponen *Tryptique portuaire* yang ditujukan untuk mengetahui permasalahan tentang kondisi dan potensi pemanfaatan PP/PPI juga berkaitan dengan hal pengelolaan, aktivitas, fasilitas dan lingkungan kepelabuhanan perikanan. Data komponen *Tryptique portuaire* tersebut adalah komponen *fishing port/port de pêche*/pelabuhan perikanan antara lain meliputi pengelolaan; fasilitas; aktivitas-aktivitas; kelembagaan; dan lingkungan/sanitasi. Komponen *Avant pays maritime/foreland*, meliputi sumberdaya ikan; perairan dan armada penangkapan. Komponen *Arrière pays terrestre/hinterland* terdiri dari konsumen dan daerah distribusi/pemasaran ikan; sarana-prasarana pendukung pemasaran dan kelembagaannya.

Pengambilan sampel data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada responden nelayan dan pedagang, pengelola PP/PPI dan pengelola tempat pelelangan ikan (TPI). Nelayan dibedakan menurut kategori fungsionalnya (ABK, Motoris, Nahkoda, Pemilik), tiga jenis alat tangkap

dominan dan tiga kategori ukuran kapal dominan. Responden yang jumlahnya 152 orang untuk 4 PP/PPI, diambil secara *purposive* sesuai kebutuhan studi. Pengambilan data sekunder terkait dilakukan terhadap instansi-instansi seperti Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pusat Statistik, Bappeda di tingkat propinsi dan kabupaten terkait.

Berkaitan dengan karakteristik kenelayanan data dikumpulkan dengan metode partisipatif yakni *Rural Rapid Appraisal (RRA)* dan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* pada setiap PP/PPI sampel. Metode RRA digunakan pada tahap pertama untuk menggali kondisi umum pelabuhan perikanan di lokasi studi dan sistem sosial kemasyarakatan yang berkembang di wilayah pelabuhan dan sekitarnya. Pada tahapan selanjutnya digunakan metode PRA karena penekanannya terletak pada aspek partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terarah (*focussed group discussion*), *workshop* dengan penyuluh, nelayan, pedagang, peneliti dan pemimpin formal dan nonformal yang terkait (*stakeholders*) dalam penye-lenggaraan pelelangan ikan di pelabuhan.

Analisis Data

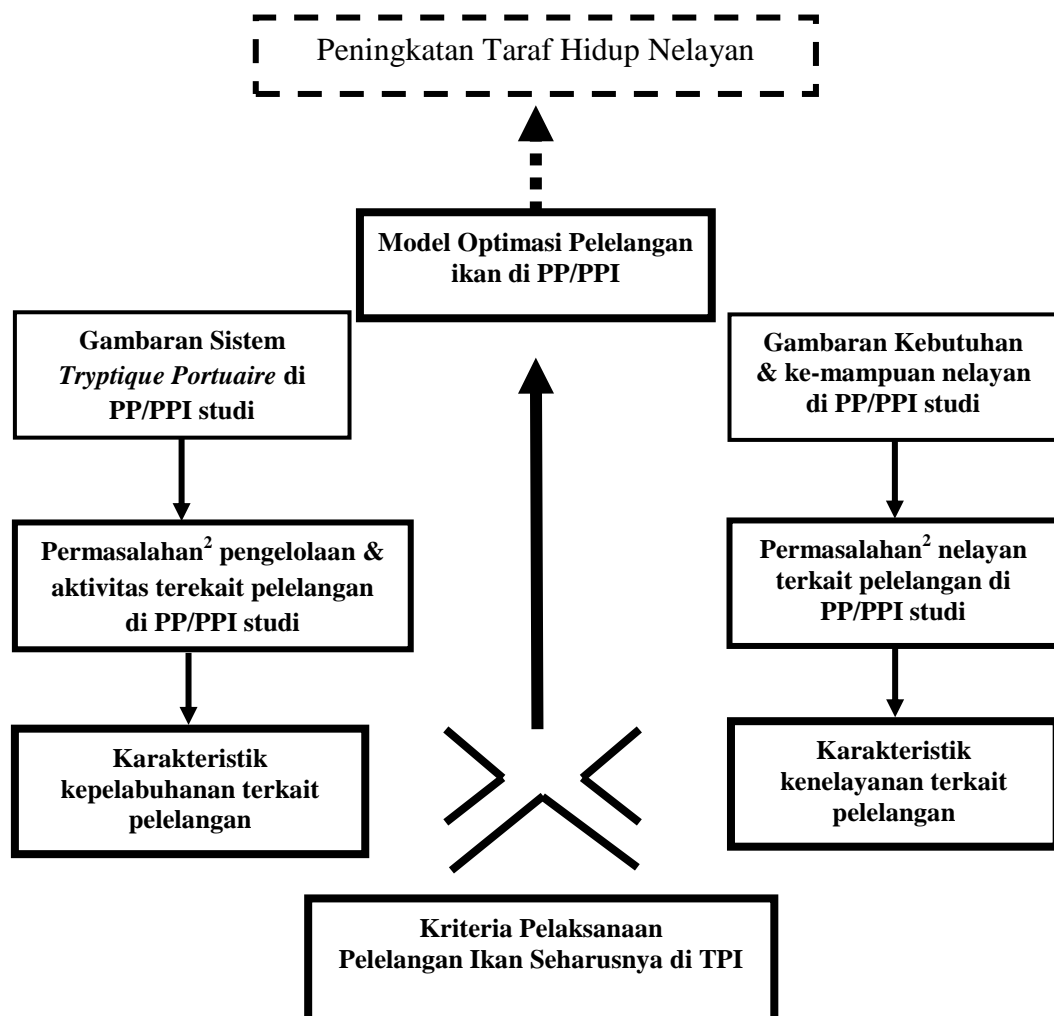
Analisis data dilakukan berdasarkan metode analisis kepelabuhanan perikanan dan metode analisis sosial kemasyarakatan (RRA dan PRA) melalui matriks yang akan menghasilkan suatu alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya dari hasil tersebut akan diformulasikan konsep model optimasi pelelangan ikan di PP yang sesuai dengan karakteristik nelayan melalui tahapan :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis berdasarkan konsep *Trytique portuaire* melalui pengelompokan permasalahan berdasarkan pada 3 komponen yaitu *foreland*, pelabuhan perikanan dan *hinterlandnya* untuk menyusun permasalahan pemanfaatannya.
2. Menyusun berbagai karakteristik kepelabuhanan perikanan dan kenelayanan yang ditemukan di dalam penelitian berdasarkan struktur kehidupan baik secara sosial, budaya dan ekonominya.
3. Membuat matriks pemecahan masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah (no. 1) dengan karakteristik nelayan.

4. Mendeskripsikan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan karakteristik nelayan yang selanjutnya disebut "sub model kebutuhan nelayan" dengan :
 - a. Membuat pemetaan (diagram alur lokasi) pelabuhan dan lokasi kegiatan usaha perikanan seperti TPI, pasar, pabrik es, modal usaha, permukiman nelayan untuk mengetahui kondisi yang ada sekarang;
 - b. Menganalisis tingkat kepuasan nelayan terhadap kondisi yang ada sekarang melalui cara diskusi, *brainstorming* dan wawancara mendalam;
 - c. Mengevaluasi pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah diselesaikan. Tim PRA secara bersama-sama mengevaluasi pemanfaatan pelabuhan serta mem-*brainstorm* pelaksanaan yang diharapkan. Teknik diskusi secara terarah dan wawancara mendalam, pembuatan diagram alur akan diterapkan guna menganalisis situasi lampau.
5. Memformulasikan model optimasi pelelangan ikan di pelabuhan perikanan. Permodelan didasarkan pada kesiapan pemanfaatan pelabuhan dan karakteristik nelayan. Melalui pengintegrasian dua sub model yang dihasilkan;
 - a. Memformulasikan secara umum beberapa contoh dua sub model di pelabuhan perikanan dengan susunan kelembagaan yang mendukungnya;
 - b. Melakukan seleksi terhadap 4 sampel PP/PPI untuk dijadikan sebagai contoh dalam memformulasikan suatu konsep model yang berkelanjutan;
 - c. Menyusun suatu konsep sub model pemanfaatan pelabuhan perikanan contoh yang berkelanjutan dengan merancang beberapa sistem seperti tentang pelayanan pendaratan, pelelangan dan penanganan ikan, higienitas dan sanitasi lingkungan PP.
6. Pengoptimalan dari model adalah dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap beberapa sistem (point 5c) secara efektif dan efisien sesuai karakteristik nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan, karakteristik dan kriteria pelelangan yang telah didapatkan di PP/PPI studi, meliputi gambaran kondisi *Tryptique Portuaire*, kebutuhan dan kemampuan nelayan, permasalahan sehubungan pelelangan ikan baik pengelolaan dan aktivitas terkait maupun nelayannya, karakteristik kepelabuhanan perikanan dan kenelayanan terkait pelelangan dan kriteria pelaksanaan pelelangan ikan yang seharusnya di TPI, maka disusun model pelelangan ikan yang optimal melalui tahapan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penyusunan model optimasi pelelangan ikan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Model pelelangan ikan optimal yang dihasilkan adalah **Model Pelelangan Ikan Terintegrasi dan Moderen** yang memiliki 2 (dua) submodel, yaitu:

1. Submodel Pengadaan Pelelangan Ikan Terintegrasi
2. Submodel Pelelangan Ikan Moderen dan Kontinyu

1. Submodel Pengadaan Pelelangan Ikan Terintegrasi:

Merupakan model pelaksanaan pengadaan pelelangan ikan bertahap dan terarah di suatu PP/PPI dengan memperhatikan aspek kesiapan pelelangan dan pengintegrasian peran punggawa/juragan.

Bertahap, dimaksudkan adalah pelaksanaan pengadaan pelelangan ikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan pelelangan di TPI. Untuk itu diperlukan adanya pembuatan Program Pelaksanaan Pengadaan Pelelangan Ikan (Program P3I) pada setiap PP/PPI yang akan dilakukan pelelangan ikan. Program P3I diperoleh dari penyusunan masterplan khusus pelaksanaan pengadaan pelelangan ikan di PP/PPI.

Terarah, dimaksudkan adalah program pelaksanaannya menuju kepada pemenuhan standar pelelangan minimal dan efektif, dan dalam suatu fungsi waktu pelaksanaan. Standar pelelangan minimal dan efektif merupakan standar pelelangan ikan yang mengedepankan penjaminan mutu ikan dan sanitasi TPI. Dalam suatu fungsi waktu pelaksanaan berarti terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pelelangan yang tepat dan terencana.

Kesiapan, dimaksudkan adalah pengoptimalan dan penguatan kesiapan pelaksanaan pengadaan pelelangan baik dari aspek syarat pengadaan maupun aspek kemampuan pengelola dalam pelaksanaan pelelangan ikan. Aspek pengadaan pelelangan meliputi 10 (sepuluh) syarat kesiapan hasil tangkapan didaratkan (HTD) (Pane, 2008), prasarana dan sarana dasar pelelangan, organisasi dan pengelola TPI, kebijakan/peraturan, nelayan, pembeli ikan, pasar (daya serap pasar), prasana jalan dan sarana transportasi angkutan ikan. Aspek kemampuan pengelola pelaksanaan pelelangan meliputi 5 (lima) komponen yaitu kemampuan penyediaan sarana, penyediaan sistem lelang, mengorganisirnya, penjaminan

mutu dan sanitasi serta kemampuan membuat aturan/kebijakan sehingga dihasilkan proses, sejak hasil tangkapan didaratkan, dilelang dan didistribusikan, berlangsung secara cepat, efisien dan berkualitas.

Pengelolaan pelelangan ikan di TPI pada model ini membutuhkan SDM pengelola yang setidaknya-tidaknya berkemampuan seperti digambarkan di atas, yang dapat dikatakan sebagai semi-profesional. Dengan demikian pada model pengadaan pelelangan ini diperlukan syarat-syarat tertentu dan baku untuk menjadi tenaga pengelola pelelangan ikan di TPI.

Pengintegrasian peran punggawa/juragan, dimaksud adalah penyerapan peran punggawa/juragan yang bermanfaat pada proses pelelangan ikan di TPI; melalui penataan ulang peran manfaat punggawa/juragan tersebut secara integral dalam proses pelelangan ikan. Dalam hal ini, peran punggawa/juragan sebagai penjual hasil tangkapan pada kelompok nelayan semi-mandiri (nelayan yang mandiri dalam pemilikan unit penangkapan namun lemah modal operasionalnya sehingga harus meminjam pada punggawa/juragan), diarahkan secara bertahap untuk menjadi pedagang pembeli ikan dalam pelelangan ikan sekaligus sebagai penjual setelah pelelangan ikan selesai. Punggawa/Juragan ini, yang juga memiliki peran sebagai pemilik modal atau pemilik uang atau disebut juga boss, dapat dianggap telah mempunyai modalitas finansial dan pengalaman aktivitas (sebagai Punggawa/Juragan) yang cukup kuat untuk mendukung peralihan perannya tersebut pada kelompok nelayan semi-mandiri. Sebaliknya, pada nelayan kelompok punggawa/juragan (nelayan dengan unit penangkapan dan modal berasal dari punggawa/juragan) peran sebagian punggawa/juragan sebagai penjual hasil tangkapan di TPI tidak berubah; hanya proses penjualannya mengikuti sistem pelelangan ikan yang diterapkan di TPI.

Kelompok nelayan mandiri (nelayan yang mandiri terhadap kepemilikan unit penangkapan ikan dan modal operasional) atau merupakan nelayan yang mandiri terhadap punggawa/juragan, diupayakan semakin ditingkatkan jumlah dan kualitas kemandiriannya, melalui berbagai upaya peningkatan pemberdayaan terhadap kelompok nelayan semi-mandiri, antara lain penguatan modal, pembinaan, dan lain-lainnya.

Submodel pelelangan-1 di atas, diterapkan pada TPI PP/PPI yang memiliki ciri-ciri terfokus kepelabuhanan perikanan dan kenelayanan sebagai berikut:

1. Pelelangan belum/tidak ada di TPI PP/PPI,
2. Terdapat Punggawa/Juragan yang berperan dominan; berperan sebagai peminjam uang kepada nelayan juga sebagai penjual hasil tangkapan nelayan semi-mandiri karena masih mempunyai keterikatan meminjam uang kepada Punggawa/Juragan,
3. Terdapat kelompok nelayan semi-mandiri,
4. Aspek syarat pelelangan belum terpenuhi,
5. Aspek kemampuan pelaksanaan pelelangan (pengelola pelelangan) belum terpenuhi.

Secara umum, ciri-ciri di atas banyak ditemukan pada pelabuhan perikanan type D (Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI) dan type C (Pelabuhan Perikanan Pantai/PPP).

Penerapan submodel pelelangan-1 diatas bertujuan untuk mengadakan pelelangan ikan di suatu TPI PP/PPI, yaitu dari belum ada pelelangan menjadi ada pelelangan, dan selanjutnya melaksanakan pelelangan ikan menuju standar pelelangan minimal dan efektif.

Adanya pelelangan ikan akan memberikan jaminan harga yang kompetitif dan menguntungkan tidak hanya bagi nelayan namun juga bagi pedagang pembeli ikan di TPI. Sasaran akhir adalah terjadinya peningkatan pendapatan bagi para nelayan.

2. Submodel Pelaksanaan Pelelangan Moderen dan Kontinyu

Merupakan model pelaksanaan pelelangan ikan bertahap dan terarah dengan memperhatikan peningkatan modernisasi aspek kesiapan dan kontinuitas pelelangan .

Bertahap, sebagaimana pada sub model-1 sebelumnya, dimaksudkan adalah pelaksanaan pelelangan ikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan pelelangan di TPI. Dalam hal ini diperlukan adanya penyusunan Program Pelaksanaan Pelelangan Ikan Moderen

dan Kontinyu (Program P2IMK) pada setiap PP yang akan melakukan program pelelangan ikan ini. Program P2IMK diperoleh dari pembuatan masterplan khusus pelaksanaan pelelangan ikan modern di PP.

Terarah, dimaksudkan adalah program pelaksanaannya menuju kepada pemenuhan standar pelelangan seharusnya yang mempertimbangkan standar internasional (dilengkapi fasilitas yang mendukung operasional di PP; menghasilkan ikan berkualitas baik sehingga dapat diterima pasar ekspor; mempunyai lingkungan yang bersih dan higienis), dan dalam suatu fungsi waktu pelaksanaan (tahapan pelaksanaan pelelangan yang tepat dan terencana).

Dimaksudkan **peningkatan modernisasi aspek kesiapan pelelangan ikan**, adalah meningkatkan dan mengoptimalkan prasarana dan sarana fisik pelelangan ikan dan fasilitas terkait, yang mengarah dan sesuai perkembangan kemajuan dan teknologi global, dan meningkatkan serta mengoptimalkan kemampuan manajemen pengelola pelelangan ikan yang profesional, agar pelaksanaan pelelangan berlangsung secara modern sesuai perkembangan global, cepat, efisien dan berkualitas.

Pengelolaan pelelangan ikan di TPI pada model ini membutuhkan SDM yang berkualitas dan profesional. Dengan demikian diperlukan syarat-syarat tertentu, khusus dan baku untuk menjadi tenaga pengelola pelelangan ikan pada model ini. Pelaksanaan pelelangan ikan secara berkualitas berarti secara otomatis, selain mampu memberikan input dan proses yang berkualitas juga mampu memberikan adanya jaminan *output* lelang berupa ikan hasil lelang yang bermutu (jaminan mutu, sanitasi dan lingkungan lelang yang bebas pencemaran).

Modernisasi aspek kesiapan di atas, hendaknya juga dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan manajemen pengelola kepelabuhanan perikanan yang profesional dan efisien serta menjadikan pelabuhan perikanan terstandarisasi secara nasional dan yang menuju untuk mendapatkan pengakuan internasional. Di negara-negara Uni Eropa seperti Perancis, Belgia dan Jerman, aktivitas pelelangan ikan sudah menggunakan mekanisasi fasilitas dan teknologi komputerisasi sehingga lelang menjadi lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.

Peningkatan kontinuitas pelelangan ikan, pada submodel ke-2 ini adalah perlunya dilakukan peningkatan kontinuitas pelelangan ikan dengan berbagai upaya yang bertujuan menjamin pelaksanaan pelelangan secara kontinyu, baik dari aspek *input* dan proses maupun aspek *output* pelelangan dan pasca pelelangan. Submodel pelelangan-2 di atas, diterapkan pada PP yang memiliki ciri-ciri terfokus kepelabuhanan perikanan dan kenelayanan berikut:

1. Pelaksanaan lelang di TPI saat ini telah/tetap ada, atau pernah ada minimum 1 tahun;
2. Syarat pelelangan telah terpenuhi walaupun belum menyeluruh dan optimal;
3. Kemampuan pengelola lelang telah terpenuhi walaupun belum menyeluruh dan optimal,
4. Merupakan PP type A atau B atau suatu PP dalam proses menjadi PP type B atau A.

Penerapan submodel pelelangan-2 diatas bertujuan untuk pelaksanaan pelelangan ikan di TPI suatu pelabuhan perikanan, yang terlaksana secara modern sesuai dengan kemajuan global, profesional (cepat, efisien dan berkualitas), terstandarisasi secara nasional dan menuju untuk mendapatkan pengakuan internasional serta terlaksana secara kontinyu.

KESIMPULAN

Berdasarkan ciri-ciri model pelelangan ikan optimal di atas, 4 PP/PPI studi dapat dikelompokkan menurut kedua submodelnya sebagai berikut:

- Submodel-1 Pengadaan Pelelangan Ikan Terintegrasi: PPI Manggar Kota Balikpapan dan PPI Pontap Kota Palopo
- Submodel-2 Pelaksanaan Pelelangan Ikan Moderen dan Kontinyu: PPS Nizam Zahman Jakarta dan PPN Palabuhanratu Sukabumi

Berdasarkan pada kriteria pemilihan yaitu pemenuhan ciri-ciri sub model pelelangan: pemenuhan aspek 10 syarat pelelangan ikan; aspek 5 komponen kemampuan pengelola pelaksanaan pelelangan dan kiraan hambatan paling dominan dihadapi, maka PPI Pontap Kota Palopo yang lebih siap untuk ujicoba

model pelelangan optimal (submodel-1. Pengadaan Pelelangan Ikan Terintegrasi). PPN Palabuhanratu yang lebih siap untuk ujicoba model pelelangan optimal (submodel-2. Pelaksanaan Pelelangan Moderen dan Kontinyu).

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah selesainya program penelitian tahap pertama ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak Dikti yang telah mendanai penelitian ini melalui program Hibah Kompetitif Strategis Prioritas Nasional Batch 2. Terimakasih juga kami sampaikan kepada IPB yang telah turut dalam proses adminitarasi dan pelaksanaan seminar hasilnya. Semoga penelitian ini bisa berlanjut sampai tahap aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaussade. 1986. La Baie de Bourgneuf: les formes socio-spatiales de la pêche. Di dalam Cahier Nantais No.27: ATP-CNRS. Socio economic du littorale ” Baie de Bourgneuf ”. Institut de Geographic et d’Amenagement Regional. Univ. Nantes. France.
- Lubis E. 2005. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Buku I. Laboratorium Pelabuhan Perikanan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Lubis, E, A.B. Pane, Y. Kurniawan, J. Chaussade, P. Pottier dan C. Lamberts. 2005. Atlas Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan di Pulau Jawa. Kerjasama antara PK2PTM-LPPM-IPB dengan Université de Nantes dan CNRS-Nantes. France.
- Pane, A.B. 2008. Evaluasi Peran Basket/Wadah Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Makalah pada Seminar Nasional Perikanan Tangkap II, di Bogor Desember 2008. Departemen PSP FPIK IPB, Bogor.
- Vigarie A. 1979. Port de Commerce et Vie Littorale. Hachette. Paris.

**POLA PENYEBARAN DAN MOBILITAS SOSIAL
NELAYAN BUGIS DI INDONESIA**
(Spreading Pattern and Social Mobility of Bugis Fishers in Indonesia)

Rilus A. Kinseng dan Saharuddin

Dep. Komunikasi Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia-IPB

ABSTRAK

Nelayan Bugis tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir. Fenomena ini menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pola penyebaran dan mobilitas sosial nelayan Bugis di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode studi kasus di empat propinsi, yakni Kalimantan Timur, Jambi, Bali dan Banten. Data dikumpulkan melalui pengamatan maupun wawancara mendalam terhadap kasus-kasus yang dipilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor pendorong para nelayan Bugis untuk meninggalkan daerah asalnya mencakup kondisi sosial politik dan struktur sosial tradisional yang menghambat mobilitas sosial vertikal di daerah asal tersebut. Sementara itu, faktor yang menarik mereka untuk bermigrasi mencakup ketersediaan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya perikanan, dan peluang mobilitas sosial vertikal di tempat yang baru. Pola perpindahan nelayan Bugis umumnya diawali oleh beberapa pionir ke suatu lokasi, kemudian diikuti oleh sanak keluarga serta kerabat lainnya. Salah satu faktor penting yang mendorong proses mobilitas sosial vertikal di kalangan nelayan Bugis di perantauan adalah etos kerja. Tekad untuk berubah atau maju sangat kuat, disertai dengan kemauan untuk bekerja keras. Salah satu sumber nilai yang penting bagi mereka adalah, nilai agama Islam. Kini, cukup banyak mantan nelayan maupun keturunan nelayan Bugis yang aktif di bidang politik di perantauan. Diantara mereka ini ada yang menjadi anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, maupun Wakil Walikota.

Kata kunci : Migrasi, Mobilitas sosial, nelayan, Bugis.

ABSTRACT

Bugis fishers spread in many parts of Indonesia, especially coastal areas. This phenomenon is interesting to be studied. Therefore, the objective of this study is to study spreading pattern and social mobility of Bugis fishers in Indonesia. This study is a qualitative study that was carried out through case studies in East Kalimantan, Jambi, Bali, and Banten provinces. Data were collected through observation as well as depth interviews. This study shows that push factors which drive the Bugis fishers to leave their place consist of socio-political as well as traditional social structure that constrain their upward vertical social mobility. Meanwhile, pull factors which attract them to come to a certain place consist of availability of natural resources, especially marine resource, and opportunities to move upward in the social structure at the new place. Migration of Bugis fishers usually initiated by some pioneers and then followed by families and relatives. One important factor that drives upward social mobility of the Bugis fishers in the new place is their work ethics. They have a strong desire to "progress" and willing to work hard to achieve that goal. In this case, their religion, namely Islam, become one important source of their hard working ethics. Nowadays, quite a number of fisher-origin Bugis have active in politics in their new place. Some of them have become member of local parliamentary (DPRD), Head of Regency (Bupati), and vice mayor (Wali Kota).

Keywords : Migration, social mobility, fishers, Bugis.

PENDAHULUAN

Orang Bugis, termasuk para nelayannya, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah yang signifikan. Diperkirakan sejak abad ke 17 orang Bugis telah banyak meninggalkan daerah asalnya dan memegang peran penting pada beragam aspek kehidupan di daerah perantauan. Oleh sebab itu, penting dan menarik untuk mengkaji bagaimana pola penyebaran dan mobilitas nelayan Bugis di Indonesia, termasuk apa faktor yang mendorong mereka untuk bermigrasi, serta bagaimana proses mobilitas sosial yang mereka alami di tempat yang baru tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyebaran dan mobilitas sosial nelayan Bugis di Indonesia, dengan mengambil kasus di empat provinsi. Diharapkan kajian ini akan memberikan sumbangan penting baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembangunan sosial di Indonesia pada umumnya, dan nelayan Bugis pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kerja lapangan (*fieldwork*). Penelitian dilaksanakan pada empat provinsi, yakni provinsi Kalimantan Timur, Jambi, Bali, dan Banten.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh perintis dan kelompoknya dan/atau keturunannya. Pendekatan yang akan dilakukan adalah penelusuran riwayat migran (migrasi semasa hidup) pada beberapa tokoh. Teknik pemilihan informan dan pendalaman data dilakukan melalui teknik *snowballing*, sehingga pilihan tokoh bisa memberikan kekayaan informasi yang akurat, dan informasi terus dikembangkan secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai faktor turut berperan dalam penyebaran (migrasi) nelayan Bugis ke berbagai wilayah di Indonesia. Faktor pendorong para nelayan Bugis untuk meninggalkan daerah asalnya mencakup kondisi sosial politik, seperti peristiwa

pemberontakan Kahar Muzakar, dan struktur sosial tradisional yang menghambat mobilitas sosial vertikal. Sementara itu, faktor yang menarik mereka untuk bermigrasi mencakup ketersediaan sumberdaya alam, khususnya ikan, yang lebih melimpah serta peluang mobilitas sosial vertikal di tempat yang baru. Pola perpindahan nelayan Bugis umumnya diawali oleh beberapa pionir ke suatu lokasi, kemudian diikuti oleh sanak keluarga serta kerabat lainnya yang diajak ataupun yang mendengar kabar bahwa di tempat tersebut sumberdaya ikan masih banyak.

Untuk mobilitas sosial vertikal, salah satu faktor penting yang mendorong proses mobilitas sosial vertikal di kalangan nelayan Bugis adalah etos kerja. Tekad untuk berubah atau maju sangat kuat, disertai dengan kemauan untuk bekerja keras. Salah satu sumber nilai yang penting bagi mereka adalah, nilai agama, dalam hal ini agama Islam.

Seperti terlihat dari kasus-kasus dalam studi ini, umumnya mereka “merangkak” dari bawah. Ada responden yang berhenti melaut karena menganggap bahwa jika hanya mengandalkan hasil melaut tidak akan bisa maju. Dia kemudian berani mencoba usaha yang lain seperti berdagang bahkan menjadi tukang ojek. Sebagai hasil dari proses mencari alternatif usaha yang lebih baik itu, seorang responden misalnya, mulai mengalami kemajuan pesat ketika ia melakukan usaha jual beli udang. Responden lainnya mengatakan bahwa prinsipnya, kalau pertama jadi anak buah suatu saat harus jadi bos juga. Suatu ajaran Bugis yang sangat mempengaruhi kegigihan orang Bugis di perantauan adalah: “kamu pergi ke negeri orang, anggaplah negeri itu negeri kamu sendiri dan kamu harus pulang berhasil”, atau ibaratnya “pergi merantau bermodal sandal jepit, pulang harus memakai sepatu”.

Di tempat tujuan, kegiatan nelayan Bugis tidak terbatas hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Di Balikpapan dan di Jambi, misalnya, banyak orang Bugis yang berlatar belakang atau mantan nelayan yang aktif di bidang politik di berbagai partai seperti Golkar, PPP, PAN dan PKS. Lebih jauh, beberapa orang Bugis yang berlatar belakang nelayan telah menjadi anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Jejaring kekuasaan ekonomi, politik dan sosial orang Bugis terbangunan di atas dua sumber kehidupan yang menurut nelayan Bugis merupakan kunci bagi upaya untuk membangun kekuasaan dan mempertahankannya. Dua sumber kekuasaan tersebut adalah: daratan dan lautan. Orang Bugis berusaha menguasai laut sebagai basis kekuasaan nelayan dan menguasai daratan sebagai basis kekuasaan petanian. Oleh sebab itu Nelayan Bugis selalu berusaha menguasai laut dan daratan secara politik, ekonomi dan sosial bukan saja untuk sekedar survival melainkan juga untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan (kebebsan) untuk hidup bahagia di hadapan masyarakat dan hidup bersama masyarakat lainnya.

Proses menguasai laut selalu menjadi prioritas awal bagi banyak orang Bugis sebagai profesi yang menurut mereka lebih cepat memperoleh hasil secara ekonomi dan lebih mudah proses penguasaannya. Laut bagi orang Bugis selalu menjadi batu loncatan awal untuk selanjutnya merambah ke daratan setelah berdaya secara ekonomi dan mampu menguasai daratan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang terbangun dari laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai saudagar.

Organisasi sebagai faktor yang selalu memiliki peran sentral dalam bangunan dan membangun jejaring. Organisasi tersebut merentang dari organisasi kekerabatan, profesi, organisasi etnis dan organisasi ekonomi politik.

Box. Contoh Kasus Responden: Haji. F (Balikpapan)

Haji. F kelahiran Pangkep tahun 1958, orang tuanya nelayan. Tahun 1977 bulan Mei ia pindah ke Balikpapan dengan kapal penumpang (pinisi) yang terbuat dari kayu. Ia pindah karena tertarik dengan ajakan sang Paman untuk menjadi nelayan. Sejak kelas 3 SD di Sulawesi F sudah pergi melaut dengan orang tua. Ia masih ikut dengan Pamannya sampai tahun 1979. Selama ikut dengan pamannya, ia menabung sedikit demi sedikit.

F pindah ke Balikpapan karena mendapat cerita dari orang-orang dan saudara, bahwa Balikpapan lebih berprospek untuk membuat orang berhasil. Pendapatan nelayan di Balikpapan juga lebih bagus dibandingkan di Sulawesi. Menurutnya mencari uang di Balikpapan lebih mudah.

Sebelum reformasi bergulir, F merenung dan bertekad untuk berubah. Ia berfikir,

jika hanya mengandalkan hasil melaut tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, apalagi menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. Ia juga teringat sebuah ayat Al-Quran yang ia pegang teguh hingga saat ini, bunyinya kira-kira seperti ini: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mau berusaha untuk berubah*. Untuk berubah, ia mengawalinya dengan mencari dan membuka peluang yang ada. Dengan modal yang terbatas, ia nekat berhenti melaut dan beralih menjual ikan ke hotel-hotel dan restoran sambil mengojek. Ia sungguh bekerja keras, jam empat subuh ia sudah tiba di Sepakat, jam enam pagi ia sudah kembali ke rumah di Manggar untuk mengantar anak-anak sekolah lalu mengojek.

Tahun 1998 F membeli kapal pertamanya seharga tiga juta rupiah. Padahal sebuah kapal untuk bisa jalan ke laut membutuhkan modal 12 juta. Tahun 1999 ia mulai membeli udang. Dalam rentang waktu hingga 2001 ia sudah mempunyai dua orang anak buah dan pergi berhaji. Hingga tahun 2008 anak buahnya 15 orang.

Sejak muda, F sudah menjadi simpatisan PPP, alasannya karena inilah satu-satunya partai Islam di Indonesia. Orang Islam harus berpartai Islam. Lama kelamaan ia mulai mempelajari sistem pembangunan di Balikpapan, yang diawali dengan pembangunan lingkungannya di lingkungan Tanjung Kelor-Manggar Baru. Kala itu yang menjadi lurah adalah Bapak Mu'min (wakil Walikota Balikpapan) seorang GOLKAR. Fadlan melihat, GOLKAR lebih gencar membangun daripada PPP, selalu memberi bantuan dan merubah mushala menjadi Masjid. Mu'min pun mengajak F untuk bergabung di GOLKAR. Akhirnya di tahun 1999 F resmi bergabung dengan GOLKAR dan saat ini menduduki jabatan Koordinator Wilayah Pengurus DPD Tingkat II (wilayah Timur). Ketika Pilpres 2004 F mendatangkan dua orang kandidat, yaitu Wiranto dan Akbar Tandjung, mempromosikan nelayan Manggar khususnya Tanjung Kelor hingga adanya sumbangan dana pembangunan masjid di Tanjung Kelor.

Menurut F, kelancaran usaha dan rejekinya adalah ketika ia menjadi pengurus masjid. Awalnya ia hanya menjabat sebagai sekretaris masjid, lalu tahun 1996 ia menawarkan diri menjadi Ketua Pengurus masjid. Ia berkata, "saya ingin menjadi ketua, kalau saya menjadi ketua masjid saya akan melakukan segalanya untuk masjid ini". Dan ia membuktikannya sampai sekarang. Masyarakat enggan menggantikan F karena ia dinilai sangat kompeten dan belum ada yang pantas menggantikannya.

Setidaknya dewasa ini berkembang tiga pendekatan teori migrasi, yakni: pendekatan *push vs pull factors*, pendekatan sistem dan pendekatan alternatif. Pendekatan *push-pull factors* lebih meletakkan konsep migrasi sebagai jalan keluar dari sebuah kesulitan, dimana kekurangan pada suatu daerah akan dapat ditutupi dari daerah lain. Pendekatan ini sedikit banyak berhubungan dengan factor-faktor ekonomi.

Pendekatan *sistem*, meletakkan migrasi sebagai proses stimulus yang senantiasa mempertimbangkan banyak faktor (sosial, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan) yang saling terkait satu sama lain. Dalam pendekatan sistem individu merupakan aktor yang aktif menilai, memilih berbagai tindakan dan mengantisipasi implikasi dari tindakan tersebut serta selalu dibandingkan antara daerah asal dan daerah tujuan (Mabogunje, 1972). Hasil dari proses migrasi tersebut dipengaruhi oleh sub-sistem stimulus, sub-sistem adat daerah asal dan subsistem kelembagaan di daerah tujuan.

Sub sistem stimulus, seperti pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, kebijakan, teknologi, ekonomi; memperhatikan apakah calon migran tersebut merasa nyaman dengan kondisinya. Sedangkan subsistem adat daerah asal seperti keluarga, klen, marga dan suku yang pada dasarnya merupakan dorongan atau hambatan dalam melakukan migrasi, kemudian diperhitungkan kondisi diri yang terdiri dari tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi.

Pada sub sistem daerah tujuan yang berupa pranata-pranata sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi jaringan informasi, seperti pranata sosial ekonomi masyarakat daerah tujuan dan cara-cara atau pengetahuan dalam menyesuaikan diri di daerah tujuan tersebut serta aturan dan nilai di daerah tujuan yang pada dasarnya merupakan nilai dan aturan adat setempat. Proses penyesuaian diri dengan daerah tujuan merupakan suatu arus balik yang bisa mempengaruhi potensi untuk melakukan migrasi.

Pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan rumah tangga sebagai unit analisis, sekaligus menggabungkan antara proses global dan proses lokal. Lebih jauh teori ini menjelaskan bahwa individu dan keluarga seringkali tidak dapat membuat keputusan yang terpisah dari struktur

dimana keluarga itu tinggal, dan dari struktur dimana keluarga tersebut menjadi bagian dari system pasar dunia. Perhatian mereka lebih terarah pada struktur sosial yang membentuknya.

Dari beberapa teori di atas, tampaknya fenomena migrasi nelayan Bugis akan lebih memadai jika dianalisis dengan pendekatan sistem dan/atau pendekatan alternatif, meskipun keduanya tidak bisa menjelaskan proses transformasi budaya di kalangan etnis Bugis. Analisis dengan pendekatan sistem ditujukan untuk menjelaskan bagaimana nelayan Bugis perantauan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga terjadi pola hubungan yang harmonis antara komponen-komponen alamiah (seperti bentang alam), dan lingkungan sosial (seperti sistem kelembagaan dan tatanan berkelompok). Sedangkan analisis transformasi budaya dipakai untuk lebih menjelaskan fenomena migrasi nelayan Bugis yang secara sekaligus menjelaskan berlakunya fenomena sistem dan jaringan sosial.

KESIMPULAN

Faktor pendorong para nelayan Bugis untuk meninggalkan daerah asalnya mencakup kondisi sosial politik dan struktur sosial tradisional yang menghambat mobilitas sosial vertikal. Sementara itu, faktor yang menarik mereka untuk bermigrasi mencakup ketersediaan sumberdaya alam dan peluang mobilitas sosial vertikal di tempat yang baru. Pola perpindahan nelayan Bugis umumnya diawali oleh beberapa pionir ke suatu lokasi, kemudian diikuti oleh sanak keluarga serta kerabat lainnya.

Salah satu faktor penting atau dominan yang mendorong proses mobilitas sosial vertikal di kalangan nelayan Bugis adalah etos kerja. Tekad untuk berubah atau maju sangat kuat, disertai dengan kemauan untuk bekerja keras. Salah satu sumber nilai yang penting bagi mereka adalah, nilai agama Islam.

Nelayan Bugis pada umumnya mereka “merangkak” dari bawah. Orang Bugis biasa merantau dan memulai kehidupan di perantauan dengan menumpang sekaligus bekerja pada nelayan lain yang sudah berhasil sebagai nelayan (menjadi anak buah atau sawi). Proses menguasai laut selalu menjadi prioritas awal bagi

banyak orang Bugis sebagai profesi yang menurut mereka lebih cepat memperoleh hasil secara ekonomi dan lebih mudah proses penguasaannya. Laut bagi orang Bugis selalu menjadi batu loncatan awal untuk selanjutnya merambah ke daratan setelah berdaya secara ekonomi dan mampu menguasai daratan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang terbangun dari laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai saudagar.

Kini, cukup banyak mantan nelayan maupun keturunan nelayan Bugis yang aktif di bidang politik di tempat perantauan mereka. Diantara mereka ini ada yang menjadi anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, maupun Wakil Walikota.

Organisasi merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam rangka mempertahankan dan membangun jejaring sosial (*social network*) di kalangan orang Bugis, termasuk para nelayannya. Organisasi tersebut mencakup bidang kekerabatan, etnis, keagamaan, profesi, dan organisasi ekonomi politik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas partisipasi dan kontribusinya sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Secara khusus, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak IPB yang telah berkenan mendanai penelitian ini melalui DIPA IPB. Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada para informan dan responden kami yang telah bersedia memberikan informasi yang kami perlukan dalam penelitian ini. Demikian juga kepada para tenaga peneliti lapangan dan asisten, kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Acciaioli, G., 1998. *Bugis Entrepreneurialism and Resource Une: Structure and Practice*. *Antropologi Indonesia. Journal of Social and Cultural Anthropology*. No. 57, Th. XXII. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

- Acciaoli, G., 1989. Searching for Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi. Unpublished Ph.D. Thesis. Canberra: The Australian National University.
- Adelman, Irma and Head, F. Thomas, 1995. Promising Developments for Conceptualizing and Modeling Institutional Change. In Irma Adelman 1995. Institutions and Development Strategies. The Selected Essays of Irma Adelman. Volume I. Page: 64-82.
- Adjid, Dudung Abdul, 2000. Membangun Pertanian Modern. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar tani.
- Ahimsa-Putra, Haddy, 1996. Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan. Kondisi pada Akhir Abad XIX. PrismaNo. 6. Juni. 1996. Jakarta: LP3ES.
- Basjah, C.H. Salam dan Sapenna Mustaring, 1966. Siri'k, Semangat paduan rasa Suku Bugis Makassar. Surabaya. Jajasan Tifa.
- Basri, C.H. 1985. 'Kalola: Sebuah Desa yang Pernah Ditinggalkan Banyak Penghuninya', dalam P. Mukhlis dan K. Robinson (peny.0. Migrasi. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Hal. 6-61.
- Hamilton, Malcolm and Maria Hirszowicz, 1987. Class and Inequality in Pre-Industrial, Capitalist and Communist Societies. Wheatsheaf Books-Sussex, St. Martin's Press-New York.
- Kayam, Umar, 1985. Sistem Budaya Bugis – Makassar, dalam Muchtar Buhori, ed. (1985) Pandangan Sumberdaya daerah dan Pembinaan Masyarakat Pancasila. Laporan Empat Daerah, halaman 41-48. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Lathief, Halilintar, 1996. Pakkarena; Sebuah Bentuk Tari Tradisional Makassar. Masyarakat Seni Pertunjukkan Indonesia. Jakarta.
- Lipset, Seymour Martin and Reinhard Bendix, 1967. Social Mobility in Industrial Society. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Lopreto, L and L.E. Hazelrigg, 1975. The Attitudinal Consequences of Status Change in Coxon, A.P.M and C. L. Jones, 1975. Social Mobility. Penguin Education, Harmondsworth, Middlesex, England.
- Mabogunje, Akin L (1972) "System Approach to A Theory of Rural-Urban Migration" dalam Man, Space, and Environment (editor: Paul Ward English dan Robert C Mayfield), Oxford University Press: London.

- Malalatoa, M. Junus, 1997. Kajian Etnografi dan Pembangunan di Indonesia, dalam Manisbow (ed) 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 93-104.
- Matttulada, 1999. Kebudayaan Bugis. Dalam Koentjaraningrat 1999. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Halaman: 266-285.
- _____, 1991. Manusia dan Kebudayaan Bugis Makassar dan Kaili di Sulawesi. Antropologi Indonesia. Dalam Journal of Social and Cultural Anthropology XV No. 48. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Indonesia. Jakarta. Halaman 4 – 109.
- _____, 1991. Manusia dan Kebudayaan Kaili di Sulawesi Tengah. Antropologi Indonesia J No. 48 Juni. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Indonesia. Jakarta. Halaman 110-182.
- Naim, M., 1979. Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pelras, Christian. 2006. Manusia Bugis (diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok) . Nalar, Jakarta.
- Robinson, Kathryn, 2000. Ketegangan Antar Etnis, Orang Bugis, dan ‘Masalah Penjelasan’. Journal of Social and Cultural Anthropology. No.63. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Halaman 45-53.
- Saharuddin dan Sumarti, 2002. Kelembagaan Ekonomi Lokal dalam Masyarakat Pesisir dan Perdesaan. Hibah Bersaing. Direktorat Pendidikan Tinggi Jakarta. Jurusan Sosek Faperta IPB.
- Said, M.N.. 1962. Siri’. Makassar (Tidak dipublikasikan).
- Sandres, Irwin T., 1958. The Community; An Introduction to a Sosial Sistem. New York: The Ronald Press Company
- Vayda, A.P., B.J. McCay and C. Eghenter, 1991. ‘Concepts of Process in Social Science Explanations”, Philosophy of the Social Sciences.
- Vayda, Andrew. P. and Sahur, A., 1996. Bugis Settlers In East Kalimantan’s Kutai National Park. Their Part and Present and Some Possibilities for Their Future. Jakarta: CIFOR

**PENGEMBANGAN MODEL PAMONG BELAJAR DALAM
PEMBINAAN INDUSTRI KECIL UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(a Learning Guardian Model Development in Home Industry to Improve
Community Welfare)

Ma'mun Sarma¹⁾, Herien Puspitawati²⁾, Pudji Muljono³⁾, Tasril Bartin⁴⁾

¹⁾Dep. Manajemen-Fakultas Ekonomi dan Manajemen-IPB, ²⁾Dep. Ilmu Keluarga dan Konsumen-Fakultas Ekologi Manusia-IPB, ³⁾Dep. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia-IPB, ⁴⁾Mahasiswa Program Studi S3-Sekolah Pasca Sarjana-IPB

ABSTRAK

Model Pengembangan Pamong Belajar dalam Pembinaan Industri Kecil adalah sesuatu yang urgen. Hal ini penting karena permasalahan kemiskinan semakin kompleks dan mempunyai karakteristik tersendiri antar daeran dan antar lapisan sosial. Oleh sebab itu diperlukan pula sebuah konsep model intervensi pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik masalah, sasaran, fokus, dan kompetensi pelaku pembinaan sehingga model intervensi tersebut mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mendeskripsikan karakteristik individu, diklat, pengembangan diri, lingkungan, dan kinerja Pamong Belajar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) mendeskripsikan karakteristik usaha dan persepsi pelaku industri kecil terhadap kinerja Pamong Belajar dalam kegiatan pembinaan industri kecil, dan 3) mengkaji hubungan dan pengaruh antar peubah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Propinsi Sumatera Barat dan desain penelitian adalah survey deskriptif korelasional dengan mengambil responden secara sensus terhadap Pamong Belajar yang pernah melaksanakan satuan pendidikan nonformal di bidang usaha/pengembangan ekonomi masyarakat, dan responden dari pengelola industri kecil yang menjadi binaan Pamong Belajar tersebut. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan: 1) Pamong Belajar sudah tergolong tua dan berpendidikan cukup, namun diklat yang diperoleh selama ini kurang memadai, dan tidak ada dukungan dari pemerintah untuk pengembangan diri dan perbaikan lingkungan kerja; 2) industri kecil yang dibina Pamong Belajar masih tergolong pemula, belum memberikan tingkat keuntungan yang memadai, namun prospek pasar sangat terbuka luas. Pelaku industri kecil juga punya persepsi bahwa Pamong Belajar jarang (kadang-kadang) melakukan analisis masalah dan kebutuhan industri kecil, tetapi dapat menganalisis sumber daya dan berinteraksi sosial dengan baik; dan 3) Lingkungan Pamong Belajar merupakan satu-satunya faktor yang signifikan mempengaruhi kinerja Pamong Belajar dalam pembinaan industri kecil.

Kata kunci : Pamong belajar, kinerja pamong belajar, industri kecil.

ABSTRACT

A learning guardian (Pamong Belajar) model development in te supervision of home industry is important. This is important due to the poverty problems becoming more complex and the problems hasve its own characteristics among regions and social group of society. Based on this phenomenon, it is required an intervention model of povery alleviation suitable to a specific problem, targets, focus and the competency of the guardian, thus the intervention model would be able to create strong socio economics of the society and their welfare. The objectives of the research are to: 1) describe the

characteristics of the learning guardian, education and training, self development, environment and the performance of learning guardian to economic empowerment;. 2) to describe the characteristics of home industry and the perception of home industry towards the activity of home industry; and 3) to analyze the relationship and the influence of among variables. The study was conducted in West Sumatra and the design of this research is a descriptive correlational survey. The respondent is all of the learning guardians in West Sumatra who have implemented a unit study of non formal education in community economic development. ,and the respondents are also home industry under the learning guardian. The results of the first year are as follows: 1) the learning guardians are at the age of old and sufficient of educational level, but the education and training so far is not sufficient yet, and there is no support from the government to self development and environmental improvement; 2) the home industry that are supervised by the learning guardians in the category of the beginner, low profit but the market opportunity is still open, and the perception of home industry toward the learning guardians is that they often analyze the problems and the needs of home industry but they are able to analyze the resources and good interaction with home industries; and 3) the environment of the learning guardian is the only factor that is significantly affected the performance of learning guardians in the supervision of the home industries.

Keywords : Learning guardian, performance of learning guardian, home industry.

PENDAHULUAN

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dewasa ini yang gencar dilakukan semua pihak seperti pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi adalah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa. Aspek yang diberdayakan adalah aspek manusia, usaha, dan lingkungan (sarana prasarana), melalui proses penyiapan (*enabling*), penguatan (*strengthening*), dan perlindungan (*protecting*). Sasaran pemberdayaannya adalah 1) usia pra produktif (< 15 thn), 2) usia produktif (15 – 60 thn), dan 3) usia pasca produktif (> 60 thn). Fokus sarannya adalah masyarakat miskin produktif dalam wujud pemberdayaan UMK. Kegiatan ini dicapai melalui 2 upaya yaitu mengurangi beban orang miskin dan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin produktif.

Salah satu bentuk pemberdayaan keluarga atau masyarakat miskin yang fokus pada usia produktif adalah pemberdayaan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini menjadi penting karena industri kecil

dan kerajinan rumahtangga sebagai bagian dari UKM punya peranan penting dalam serapan pekerja Indonesia dan mempunyai peran strategis bagi perkembangan ekonomi bangsa dan negara. Disadari atau tidak, pertumbuhan sektor industri kecil dapat membantu beban pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan turut menunjang tercapainya pemerataan kesempatan kerja. Menurut Hubeis (1997:6-12), industri kecil merupakan penyeimbang dalam struktur industrialisasi (produk dan pasar) secara menyeluruh karena menciptakan pembangunan yang lebih merata dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap komoditi yang diusahakan.

Beberapa persoalan klasik yang dimiliki oleh perusahaan/industri kecil di Sumatera Barat adalah: (1) kurangnya kemampuan wirausahawan di bidang administrasi, (2) lemahnya kemampuan pemasaran, (3) kekurangan modal, (4) kesulitan untuk akses dengan sumber-sumber modal, dan (5) kurangnya kemampuan untuk mendapatkan informasi dan teknologi yang diperlukan guna pengembangan usaha, (6) tingkat keuntungan usaha rendah yakni posisi *Break Event Point* (BEP) di sekitar titik impas saja, dan (7) keberadaan beberapa sektor industri belum sesuai dengan kultur alam dan potensi masyarakat.

Terdapat berbagai industri kecil dominan yang tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, namun tidak semua industri kecil dominan tersebut menghasilkan produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi atau berorientasi ekspor. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah dan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil/industri kecil tersebut. Hal ini juga berarti dibutuhkannya sumberdaya manusia aparatur yang handal sebagai motivator, fasilitator, instruktur, dan mediator dalam pemberdayaan ekonomi/ industri kecil tersebut.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu institusi pemerintah yang berperan dalam pengentasan pengangguran, kemiskinan dan perbaikan taraf hidup masyarakat telah cukup lama berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendidikan nonformal. Namun, berbagai terobosan baru dalam pendidikan nonformal ini belum nampak secara signifikan yaitu adanya suatu terobosan baru yang menyentuh langsung kegiatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan usaha yang dilakukan oleh SKB selama ini terkesan masih setengah hati dan hanya terbatas pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan saja tanpa ada kesinambungan dan ketuntasan program. Pamong Belajar sebagai ujung tombak institusi ini dinilai belum dapat memainkan perannya secara optimal dalam membantu pengrajin industri kecil untuk keluar dari berbagai persoalan dalam kegiatan usaha. Terkait dengan itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang jelas agar kinerja Pamong Belajar dapat diandalkan dalam program pemberdayaan tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan karakteristik individu, diklat, pengembangan diri, lingkungan, dan kinerja Pamong Belajar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2) mendeskripsikan karakteristik usaha dan persepsi pelaku industri kecil terhadap kinerja Pamong Belajar dalam kegiatan pembinaan industri kecil, 3) mengkaji hubungan dan pengaruh antar peubah yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Desain

Penelitian menggunakan metode survei deskriptif-korelasional dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Peubah-peubah penelitian terdiri dari empat peubah bebas yaitu : karakteristik individu Pamong Belajar (X1), pendidikan dan pelatihan Pamong Belajar (X2), pengembangan diri Pamong Belajar (X3), karakteristik lingkungan Pamong Belajar (X4), karakteristik industri kecil (X5) dan satu peubah terikat yaitu kinerja Pamong Belajar (Y).

Analisis Data

Data semua peubah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat rata-rata dan gradasi dari setiap peubah dan sub peubah. Untuk melihat hubungan antar peubah dan perbedaaan persepsi antar kedua jenis responden digunakan statistik korelasi *Spearman* dan analisis uji t. Selanjutnya dilakukan uji regresi untuk melihat pengaruh antar peubah bebas dan peubah

terkat. Fenomena-fenomena yang ditemukan selama observasi dan analisis deskriptif dijelaskan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi karakteristik individu, diklat, pengembangan diri, lingkungan, dan kinerja Pamong Belajar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Karakteristik Individu Pamong Belajar

Sebagaimana terlihat pada Table 1, data karakteristik responden Pamong Belajar memperlihatkan bahwa umumnya Pamong Belajar berumur 40-50 tahun yaitu sebanyak 66 orang (74,2%). Distribusi masa kerja Pamong Belajar sebagian besar berkisar 10-20 tahun dengan jumlah sebanyak 50 orang (56,2%). Demikian juga dengan pangkat/golongan Pamong Belajar umumnya berada pada golongan III dengan jumlah sebanyak 69 orang (77,6%) dan tidak ada Pamong Belajar yang mempunyai pangkat/golongan I dan II. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pamong Belajar sudah tergolong tua dan sudah lama menjalankan profesi sebagai Pamong Belajar dan tidak ada Pamong Belajar yang masih muda. Tidak ditemukannya Pamong Belajar yang sangat muda dimungkinkan penyebabnya adalah tidak adanya pengangkatan Pamong Belajar yang masih *fresh graduate*.

Sebaran data tingkat pendidikan formal Pamong Belajar pada umumnya berpendidikan S1 sebanyak 61 (68,5%) orang, diikuti dengan yang berpendidikan SLTA sebanyak 12 (13,5%) orang, berpendidikan D1-D3 dan S2 sebanyak 8 (9%). Berdasarkan data ini dapat dimaknai bahwa sebagian besar Pamong Belajar sudah tergolong tua bahkan tidak ada Pamong Belajar yang masih muda. Umumnya Pamong Belajar tersebut sudah lama menjalankan profesi sebagai Pamong Belajar. Tidak ditemukannya Pamong Belajar yang sangat muda karena sejak beberapa tahun terakhir tidak ada lagi pengangkatan PNS yang masih *fresh graduate* untuk posisi jabatan Pamong Belajar, kecuali bagi Sanggar Kegiatan Belajar baru.

Tabel 1. Sebaran responden Pamong Belajar berdasarkan karakteristik Individu

Sub Variabel	Gradasi	Skor rata-rata	
		n	%
X.11. Umur	Sgt muda (<30 tahun)	0	0
	Muda (30-40 tahun)	19	21,3
	Tua (40-50 tahun)	66	74,2
	Sangat tua (>50 tahun)	4	4,5
X.12. Masa Kerja			
a. Sebagai Pamong Belajar	Sgt Baru (<5 tahun)	9	10,1
	Baru (5-10 tahun)	19	21,3
	Lama (10-20 tahun)	50	56,2
	Sangat lama (>20 tahun)	11	12,4
b. Pangkat/Gol.	Sgt rendah (Gol I)	0	0
	Rendah (Gol. II)	0	0
	Sedang (Gol. III)	69	77,6
	Tinggi (Gol. IV)	20	22,4
X.13. Pendidikan Formal	SLTA	12	13,5
	D1-D3	8	9,0
	S1	61	68,5
	S2	8	9,0

Diklat Pamong Belajar

Berdasarkan data diklat yang diikuti oleh Pamong Belajar sebagaimana terlihat pada Tabel 2, ternyata Pamong Belajar menanggapi bahwa materi, metode, dan kualifikasi akademik nara sumber diklat sudah sesuai dengan keinginan mereka. Sebagian besar model pembelajaran yang diberikan adalah melalui ceramah (75,9%) dan demonstrasi (12,2%), sedangkan metode pembelajaran berikut jarang dilakukan yaitu melalui putar film (0 %), bermain peran (3,7%) dan tanya jawab (2,3%). Tampaknya model pelatihan yang diberikan adalah dikhotomi antara ceramah dan kunjungan lapangan, tanpa ada praktek langsung oleh Pamong Belajar melalui bermain peran (melaksanakan sesuatu).

Tabel 2. Sebaran Diklat yang diikuti Pamong Belajar untuk peningkatan kinerja dalam program pemberdayaan industri kecil

Sub Variabel	Gradasi	Skor rata-rata	
		n	%
X.2.1.Materi	Tidak sesuai	2	2,2
	Kurang sesuai	32	36,0
	Sesuai	52	58,4
	Sangat sesuai	3	3,4
X.2.2. Metode			
a. Model Pembelajaran	Ceramah	66	75,9
	Diskusi	5	5,7
	Tanya Jawab	2	2,3
	Demonstrasi	10	12,2
	Bermain Peran	1	3,7
	Studi Banding	3	5,2
	Putar Film	0	0
b. Kesesuaian Metode	Tidak sesuai	4	4,5
	Kurang sesuai	26	29,0
	Sesuai	57	64,0
	Sangat sesuai	2	2,5
X.2.3. Nara Sumber			
a. Asal Narasumber	Perguruan Tinggi	33	37,9
	Pemda/Birokrasi	24	28,2
	Pemerintah Pusat	5	1,7
	Pengusaha	20	23,5
	LSM	0	0,0
	Pamong Beljaar	5	7,7
b. Kualifikasi Akademik	Tidak sesuai	3	3,4
	Kurang sesuai	16	18,0
	Sesuai	61	68,5
	Sangat sesuai	9	56,2
X.2.4. Sarana			
a. Media Pembelajaran	Tidak cukup	6	6,7
	Kurang cukup	14	15,7
	Cukup	53	59,6
	Sangat cukup	16	18,0
b. Informasi Pendukung	Tidak cukup	14	15,7
	Kurang cukup	37	41,6
	Cukup	33	37,1
	Sangat cukup	5	5,6
c. Pemandokan	Tidak cukup	6	6,8
	Kurang cukup	12	13,5
	Cukup	64	72,0
	Sangat cukup	7	7,7

Asal nara sumber dalam diklat Pamong Belajar umumnya dari perguruan tinggi (37,9%), dan jarang sekali pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pusat (hanya 1,7%), bahkan Pamong Belajar tidak pernah mendapatkan pelatihan dari LSM. Hal ini berarti bahwa diklat Pamong Belajar lebih banyak kepada aspek kognitif karena lebih bernuansa teori sebagai cirri khas orang Perguruan Tinggi. Sementara yang dibutuhkan oleh Pamong Belajar saat ini adalah pengalaman langsung dari para pengusaha dan LSM yang telah berpengalaman dalam melihat peluang usaha dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan data sarana yang tersedia dalam diklat Pamong Belajar sebanyak 53 (59,6%) Pamong Belajar mengatakan cukup. Begitu juga sebanyak 64 (72,0%) Pamong Belajar mengatakan pemondokan sudah cukup, sementara untuk ketersediaan informasi pendukung diklat seperti buku-buku, modul, rekaman, dan internet sebanyak 37 (41,6%) Pamong Belajar mengatakan kurang cukup.

Dalam rangka perbaikan diklat bagi Pamong Belajar agar lebih kompeten dalam pengembangan ekonomi masyarakat, maka salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbanyak narasumber dari kalangan pengusaha, LSM. Disamping itu perlu diberikan modul, buku bacaan, dan akses kepada internet untuk memperluas pengetahuan dan cakrawala berpikir Pamong Belajar.

Tingkat Pengembangan Diri Pamong Belajar

Berdasarkan data pada sebaran tingkat pengembangan diri Pamong Belajar sebagaimana terlihat pada Tabel 3, diketahui bahwa sebanyak 47 (52,3%) Pamong Belajar mengatakan bahwa ketersediaan sumber belajar mandiri tergolong cukup, begitu juga sebanyak 40 (45,5%) dari mereka mengatakan sering berinteraksi dengan sumber belajar.

Pada sisi lain, sebanyak 33 (37,3%) orang Pamong Belajar mengatakan bahwa motivasi berprestasi adalah suatu kebutuhan, namun beberapa hambatan akan mempengaruhi motivasi berprestasi tersebut. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 59 (66,6%) orang Pamong Belajar mengatakan akan menurun motivasinya bila ada hambatan dari rekan kerja, pimpinan, dan keluarga.

Tabel 3. Sebaran Tingkat pengembangan diri Pamong Belajar untuk peningkatan kinerja dalam program pemberdayaan industri kecil

Sub Variabel	Gradasi	Skor rata-rata	
		n	%
X.3.1. Kemandirian Belajar			
a. Ketersediaan Sumber Belajar	Sangat Kurang	13	12,6
	Kurang	25	27,5
	Cukup	47	52,3
	Sangat Cukup	7	7,6
b. Interaksi dengan Sumber Belajar	Tidak Pernah	11	12,3
	Kadang-kadang	32	36,6
	Sering	40	45,0
	Selalu	6	6,7
X.3.2. Motivasi Berprestasi			
a. Sebagai Kebutuhan	Tidak pernah	4	4,3
	Kadang-kadang	26	29,2
	Sering	2	2,2
	Selalu	33	37,3
b. Bila ada Hambatan	Sangat kurang	2	2,2
	Kurang	15	16,9
	Cukup	59	66,6
	Sangat Cukup	13	14,6

Karakteristik Lingkungan Pamong Belajar

Berdasarkan data karakteristik lingkungan Pamong Belajar sebagaimana terlihat pada Tabel 4, diketahui bahwa sebagian besar Pamong Belajar yaitu 41 (46,1) orang mengatakan bahwa sarana prasarana pendidikan di lingkungan SKB tergolong cukup, sebagian besar pula yaitu sebanyak 58 (65,2) orang menyatakan kenyamanan lingkungan tergolong cukup, dan sebagian besar yaitu 59 (66,3) orang menyatakan kondisi medan kerja tergolong cukup juga.

Pada sisi lain sebagian besar yaitu sebanyak 45 (50,6%) orang mengatakan bahwa organisasi kerja Pamong Belajar tergolong kurang baik. Demikian juga sebagian besar yaitu 42 (47,2%) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kurang untuk pengembangan SKB, termasuk Pamong Belajar.

Tabel 4. Sebaran Karakteristik Lingkungan Pamong Belajar untuk peningkatan kinerja dalam program pemberdayaan industri kecil

Sub Variabel	Gradasi	Skor rata-rata	
		n	%
X.4.1. Lingkungan Kerja Fisik			
a. Sarana /Prasarana Pendidikan	Sangat Kurang	17	19,1
	Kurang	27	30,3
	Cukup	41	46,1
	Sangat Cukup	4	4,5
b. Kenyamanan lingkungan	Sangat Kurang	3	3,4
	Kurang	21	23,6
	Cukup	58	65,2
	Sangat Cukup	7	7,8
c. Kondisi Medan Kerja	Sangat Kurang	6	6,7
	Kurang	22	24,7
	Cukup	59	66,3
	Sangat Cukup	2	2,3
X.4.2. Organisasi Kerja			
	Sangat Kurang	17	19,1
	Kurang	45	50,6
	Cukup	18	20,2
	Sangat Cukup	9	10,1
X.4.3. Kebijakan Pemerintah			
	Sangat Kurang	27	30,3
	Kurang	42	47,2
	Cukup	18	20,2
	Sangat Cukup	2	2,3

Kinerja Pamong Belajar dalam Program Pemberdayaan Industri Kecil

Sebagaimana terlihat pada Tabel 5, semua aspek penilaian kinerja menunjukkan bahwa Pamong Belajar hanya kadang-kadang melakukan pemberdayaan industri kecil. Sebanyak 37 (41,2%) Pamong Belajar mengatakan kadang-kadang (jarang) menyusun disain pembelajaran. Sebanyak 36 (40,5%) kadang-kadang (jarang) melakukan aktifitas penumuhan dan pengembangan produk industri kecil. Sebanyak 37 (41,6) orang Pamong Belajar jarang melakukan penumbuhan jejaring dan kemitraan usaha industri kecil, sebanyak 37 (41,6%) Pamong Belajar jarang melakukan pembentukan kelembagaan ekonomi industri kecil, sebanyak 33 (37,0 %) mengatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang (jarang) melakukan pembentukan kemandirian dan keberlanjutan usaha industri kecil, dan sebanyak 28 (31,5%) orang Pamong Belajar mengatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang (jarang) melakukan kegiatan menyusun evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan pemberdayaan industri kecil.

Hal ini berarti bahwa kinerja Pamong Belajar dapat dikatakan rendah karena tanpa melakukan berbagai aspek pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk industri kecil mustahi dapat mencapai sasaran.

Tabel 5. Sebaran Kinerja Pamong Belajar Pamong Belajar untuk peningkatan kinerja dalam program pemberdayaan industri kecil

Sub Variabel	Gradasi	Skor rata-rata	
		n	%
Penyusunan Disain Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil	Tidak pernah	32	36,0
	Kadang-kadang	37	41,2
	Sering	16	18,0
	Selalu	4	4,4
Penumbuhan dan Pengembangan Produk Industri Kecil	Tidak pernah	35	39,3
	Kadang-kadang	36	40,5
	Sering	14	15,7
	Selalu	4	4,5
Penumbuhan Jejaring dan Kemitraan Usaha Industri Kecil	Tidak pernah	32	36,0
	Kadang-kadang	37	41,6
	Sering	16	18,0
	Selalu	4	4,4
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Industri Kecil	Tidak pernah	23	25,8
	Kadang-kadang	37	41,6
	Sering	21	23,6
	Selalu	8	9,0
Pembentukan Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha Industri Kecil	Tidak pernah	12	13,6
	Kadang-kadang	33	37,0
	Sering	33	37,0
	Selalu	11	12,4
Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil	Tidak pernah	18	20,2
	Kadang-kadang	28	31,5
	Sering	27	30,3
	Selalu	16	18,0

Karakteristik Industri Kecil Binaan Pamong Belajar

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, berdasarkan profil usaha pada 37 responden diketahui bahwa jenis usaha kecil yang dominan yang dibina oleh Pamong Belajar adalah adalah usaha industri pangan sebanyak 16 (43,3%) buah, diikuti oleh industri sandang sebanyak 7 (18,9%) buah, industri alat rumah tangga sebanyak 8 (18,9%) buah, dan jasa sebanyak 6 (16,2 %). Bahan baku yang banyak digunakan adalah bahan pangan dan obat-obatan sebanyak (54,1%), plastik, kayu, kain, dan kulit (45,9%).

Sebanyak 89,2% asetnya tergolong kecil dengan nilai rata-rata di bawah Rp. 50 juta, sedangkan omset dominan juga tergolong kecil yaitu sebanyak 86,5% di

bawah Rp.25 juta per bulan sehingga keuntungan yang diperoleh juga sebanyak 73% atau umumnya tergolong kecil yaitu di bawah Rp.2 juta sebulan.

Pada umumnya industri kecil ini juga tergolong baru yaitu berdiri sekitar 3 tahun sebanyak 86,5%, berdiri sekitar 3-10 tahun sebanyak 10,8%, dan lebih dari 10 tahun sebanyak 2,7%. Tenaga kerja yang dipekerjakan umumnya tergolong kecil yaitu kurang dari 5 orang sebesar 89,2%, 5-10 orang sebanyak 8,1%, dan lebih dari 10 orang hanya ada 2,7%. Bahkan ada juga industri kecil ini yang tidak menggunakan karyawan sama sekali.

Tabel 6. Sebaran responden industri kecil binaan Pamong Belajar berdasarkan Profil Usaha

Sub Variabel	Gradasi	Skor Rata-rata	
		n	%
X.5.1. Jenis Industri Kecil	Industri Pangan dan Obatan	16	43,3
	Industri Sandang dan Souvenir	7	18,9
	Alat Rumah Tangga	8	21,6
	Jasa	6	16,2
X.5.2. Nilai asset usaha	Kecil (< 50 juta)	33	89,2
	Sedang (≥ 50 -100 juta)	2	5,4
	Besar (>100 juta)	2	5,4
X.5.3. Omset per bulan	Kecil (< 25 juta)	32	86,5
	Sedang (≥ 25-50 juta)	4	10,8
	Besar (> 50 juta)	1	2,7
X.5.4. Keuntungan rata-rata per bulan	Kecil (< 2 juta)	27	73,0
	Sedang (≥ 2-5 juta)	8	21,6
	Besar (≥5 juta)	2	5,4
X.5.5. Jumlah karyawan	Kecil (< 5 orang)	33	89,2
	Sedang (≥ 5-10 orang)	3	8,1
	Besar (> 10 orang)	1	2,7
X.5.6. Lamanya berdiri	Baru (< 3 tahun)	32	86,5
	Sedang (≥ 3-10 tahun)	4	10,8
	Lama (< 10 tahun)	1	2,7
X.5.7. Jenis utama bahan baku	Bahan pangan, dan obat-obatan	20	54,1
	Plastik, kayu, kain, dan kulit		
	Bahan logam dan tanah liat	17	45,9
X.5.8. Daerah utama asal bahan baku	Dalam Kabupaten	19	51,4
	Dalam Provinsi	16	43,2
	Luar Provinsi	2	5,4
X.5.9. Tujuan utama daerah pemasaran	Dekat (Dalam Kabupaten)	24	64,9
	Sedang (Dalam Provinsi)	6	16,2
	Jauh (Luar Provinsi)	7	18,9

Daerah utama asal bahan baku umumnya masih menggunakan bahan baku lokal, dimana sebanyak 51,4% masih membeli atau mengandalkan pasokan dari daerah di dalam kabupaten atau kota sendiri, 43,2% dari daerah dalam provinsi, dan hanya sebesar 5,4% yang mendatangkan bahan baku dari luar provinsi yaitu dari pulau jawa. Sedangkan tujuan utama daerah pemasaran sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam kabupaten/kota sebanyak 64,9%, diikuti untuk tujuan jauh atau di luar provinsi sebanyak 18,9%, sementara untuk kebutuhan dalam provinsi hanya sebesar 16,2%.

Berdasarkan deskripsi angka-angka di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik usaha industri kecil yang dibina oleh Pamong Belajar umumnya masih berskala kecil dan pada tingkat pemula dengan modal usaha yang juga masih terbatas. Keuntungan rata-rata usaha mereka juga masih sangat terbatas yaitu masih dominan di bawah Rp.2 juta, artinya pendapatan mereka masih pas-pasan dan dapat dikatakan belum mampu mengangkat keluarga mereka pada taraf hidup sejahtera.. Namun demikian pemasaran cukup luas, dimana disamping untuk memenuhi pasar lokal, juga dapat menembus pasar di luar provinsi melebihi pasar di luar kabupaten/kota dalam provinsi. Propsek untuk kemajuan usaha masih memungkinkan melalui peningkatan intensitas pembinaan oleh Pamong Belajar dan instansi terkait.

Persepsi Pelaku Industri Kecil Terhadap Kemampuan Pamong Belajar dalam Program Pemberdayaan Industri Kecil

Berdasarkan sebaran data persepsi pelaku industri kecil terhadap kinerja Pamong Belajar sebagaimana terlihat pada Tabel 7, ternyata Pamong Belajar mempunyai kriteria yang rendah dalam kemampuannya menganalisis masalah dan kebutuhan industri kecil. Dari 37 orang responden sebanyak 15 (40,5%) mengatakan mereka hanya kadang-kadang melakukan analisis masalah industri kecil, dan 16 (43,5%) mengatakan mereka hanya kadang-kadang menganalisis kebutuhan industri kecil. Hal ini berarti bahwa dengan jarangny Pamong Belajar melakukan kedua kegiatan ini, maka kegiatan tidak dapat direncanakan dengan baik dan tercapai sesuai target, padahal dalam pemberdayaan yang terpenting adalah kemampuan Pamong Belajar dalam menentukan *real need* kebutuhan industri kecil, misalnya bagaimana peningkatan kualitas produksi, perluasan

pasar, modal, dan akses pada informasi. Pada gilirannya target pembinaan akhir yaitu terwujudnya kemajuan dan keberlanjutan usaha tidak dapat dicapai.

Tabel 7. Sebaran Persepsi Pelaku Industri Kecil terhadap Kinerja Pamong Belajar dalam program pemberdayaan industri kecil

Sub Variabel	Gradasi	Skor rata-rata	
		n	%
Kemampuan Menganalisis Masalah Industri Kecil	Tidak pernah	4	10,8
	Kadang-kadang	15	40,5
	Sering	12	32,5
	Selalu	6	16,2
Kemampuan Menganalisis Kebutuhan Industri Kecil	Tidak pernah	5	13,6
	Kadang-kadang	16	43,2
	Sering	13	35,1
	Selalu	3	8,1
Kemampuan Menganalisis Sumberdaya Industri Kecil	Tidak pernah	0	0,0
	Kadang-kadang	8	21,6
	Sering	14	37,8
	Selalu	15	40,6
Kemampuan berinteraksi sosial dengan industri kecil	Tidak pernah	2	5,4
	Kadang-kadang	8	21,6
	Sering	13	35,2
	Selalu	14	37,8

Berdasarkan Tabel 8, diketahui pula bahwa kegiatan yang selalu dilakukan adalah menganalisis sumber daya yang ada pada kelompok sasaran, baik tenaga kerja maupun ketersediaan bahan baku. Dari 37 orang pelaku industri kecil sebanyak 14 (40,6%) mengatakan Pamong Belajar selalu menganalisis sumber daya yang tersedia sebelum dan sedang melakukan kegiatan pembinaan. Sebanyak 14 (37,8%) juga mengatakan bahwa Pamong Belajar selalu dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat kelompok sasaran. Kemampuan berinteraksi sosial selalu dilakukan karena pada umumnya Pamong Belajar cukup dekat dengan masyarakat akibat faktor sosial budaya, etnis, dan agama yang sama.

Tabel 8. Uji Beda Persepsi Pamong Belajar dan Industri Kecil terhadap Kinerja Pamong Belajar dalam Pemberdayaan Industri Kecil

Kelompok responden	N	Mean	Standar deviasi
Pamong Belajar	89	56,865	15,713
Industri Kecil	37	64,892	15,389

Untuk mengetahui seberapa jauh beda antara pendapat Pamong Belajar dan pendapat industri kecil terhadap kinerja Pamong Belajar dalam Pemberdayaan Industri Kecil dilakukanlah uji beda dengan uji t. Seperti terlihat pada Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi Pamong Belajar dan Industri Kecil terhadap Kinerja Pamong Belajar dalam Pemberdayaan Industri Kecil. Berdasarkan uji t terhadap persepsi Pamong Belajar dan industri kecil dalam 56,86 : 64,89. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Pamong Belajar merasakan kinerjanya belum sesuai yang diharapkan, sementara industri kecil sudah merasakan lebih baik. Berdasarkan uji kebebasan antar kedua responden tersebut terdapat perbedaan yang signifikan (-2,65) pada persepsi mereka dalam menilai kinerja Pamong Belajar dalam pemberdayaan industri kecil.

Terjadinya perbedaan persepsi antar kedua responden tersebut diduga disebabkan oleh persepsi Pamong Belajar yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang idela sesuai dengan yang diharapkan, sebaliknya industri kecil merasakan kinerja Pamong Belajar sudah lebih baik karena mereka selama ini tidak pernah mendapatkan sentuhan pembinaan sehingga mereka merasa sangat terbantu dengan pembinaan yang diberikan.

Pengaruh Antar Peubah yang diteliti

Berdasarkan uji regresi linear berganda terhadap beberapa peubah sebagaimana terlihat pada Tabel 9, kinerja Pamong Belajar akan dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan (0,047). Hal ini berarti bahwa untuk memperbaiki kinerja Pamong Belajar dalam pemberdayaan industri kecil perlu diperhatikan adalah dengan memperbaiki faktor lingkungan di Sanggar Kegiatan Belajar. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan kerja fisik, organisasi kerja, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan pengamatan terhadap aspek lingkungan tersebut memang terlihat sebagian besar lingkungan fisi SKB masih kumuh, kurang tersedia sarana prasarana kerja dan program yang memadai. Demikian juga suasana kerja yang tak menentu, karir tidak jelas dan berbagai keluhan Pamong Belajar dalam suasana kerja di kantor. Semua hal ini disebabkan oleh perhatian pemerintah sangat kurang terutama dalam hal ketersediaan anggaran program dan kesejahteraan, kesediaan sarana prasarana, suasana kerja

yang tidak kondusif, dan tidak adanya kejelasan pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pamong Belajar dalam Pemberdayaan Industri Kecil

No	Peubah	Beta standardized	sig
1	Diklat Pamong belajar	0.136	0.201
2	Pengembangan diri pamong belajar	-0.086	0.458
3	Lingkungan pamong belajar	0.217	0.047
4	Umur	0.030	0.781
5	Masa Kerja	0.139	0.173
6	Pendidikan	-0.023	0.799
7	Kursus	0.042	0.648
8	Kosmopolit	-0.052	0.570

Adj R square : 0.428

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan pada Tahun ke-1 ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pamong Belajar umumnya sudah tergolong tua dengan masa kerja sudah cukup lama dan rata-rata bergolongan III dengan pendidikan umumnya S1. Pamong Belajar umumnya sudah merasa cukup puas dengan suasana diklat yang diberikan, hanya saja narasumber kebanyakan dari perguruan tinggi dengan metode pembelajaran lebih banyak ceramah, bersifat teoritik, dan jarang praktek. Tingkat pengembangan diri Pamong Belajar dilihat dari aspek kemandirian belajar masih tergolong cukup namun belum menjadi suatu kebutuhan yang berarti, bahkan beberapa hal dalam lingkungan kerja dapat mengganjal motivasi berprestasi Pamong Belajar. Demikian juga lingkungan kerja fisik Pamong Belajar baik di kantor maupun di lapangan dirasakan cukup nyaman, namun suasana kerja dan kepedulian pemerintah masih dirasakan kurang.
2. Industri kecil yang dibina Pamong Belajar pada umumnya termasuk industri kecil pangan, sandang, dan peralatan rumah tangga yang berskala *home*

industry, dengan pasar untuk kebutuhan lokal bahkan daerah luar provinsi. Terdapat hubungan yang signifikan antara diklat, pengembangan diri, dan lingkungan kerja dengan kinerja Pamong Belajar dalam pembinaan industri kecil.

3. Lingkungan Pamong Belajar merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi kinerja Pamong Belajar dalam pembinaan industri kecil.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan dua hal sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan kepedulian pemerintah daerah dan pusat untuk pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar, baik sumberdaya Pamong Belajar, anggaran kegiatan, dan lingkungan kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
2. Terkait dengan pembinaan industri kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat , maka diperlukan kerjasama yang sinergis antar instansi pemerintah dengan Pamong Belajar sebagai *advance agent* sekaligus memimpin sinergi kegiatan (*leading sector*).
3. Disarankan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, Pamong Belajar dengan instansi yang terkait dan lembaga swasta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atas terselenggaranya penelitian ini khususnya kepada Departemen Pendidikan Nasioan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan dana penelitian melalui Hibah Kompetitif Sesuai Prioritas Nasional Batch 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta Aloliliwerri. 1991. *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Hubeis M. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi melalui Pemberdayaan Manajemen Industri. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Industri Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

Rakhmat J. 1999. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakara.

Riyanti DBP. 2003. Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sumodiningrat Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman *Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

**MODEL PEMBERDAYAAN PETANI DALAM MEWUJUDKAN
DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA
(KAJIAN KEBIJAKAN DAN SOSIAL EKONOMI TENTANG
KETAHANAN PANGAN PADA KOMUNITAS DESA RAWAN PANGAN
DI JAWA)**

the Model of Farmer Empowerment to Speed up the Farmer's Self-Supportiveness
and the Sustainability of Household
(Policy and Socioeconomic Studies of Food Security on the Food-Vulnerable
Village Community at Java)

Titik Sumarti

Dep. Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia-IPB

ABSTRAK

Masalah ketahanan pangan dan juga masalah kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah pembangunan masyarakat pedesaan. Sehingga arah pembangunan ketahanan pangan seharusnya difokuskan pada upaya-upaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di pedesaan, khususnya keluarga (rumah tangga) petani gurem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan indikator keberhasilan pemberdayaan kelompok afinitas, perkembangan kelompok di kabupaten Garut relatif lebih baik dibandingkan di kabupaten Klaten; (2) Salah satu faktor penentu keberhasilan adalah kesesuaian antara usaha yang dikembangkan dengan kontekstual setempat, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi politik dan ekologi tata kelola ketahanan pangan masyarakat; (3) Kelembagaan ketahanan pangan (kelompok afinitas) mengalami perkembangan yang berbeda di tiap wilayah mengikuti tahap persiapan dan penumbuhan kelompok sebelumnya, dan dipengaruhi oleh kelembagaan asli dan kelembagaan atas desa. (4) Model pemberdayaan petani di setiap desa juga spesifik menurut dinamika masyarakat, perkembangan kelembagaan kelompok afinitas, serta tahapan perkembangan implementasi program mapan. Situasi konflik politik dan kepentingan aktor turut mempengaruhi kegiatan pemberdayaan petani.

Kata kunci : Ketahanan pangan, kelembagaan, pemberdayaan petani.

ABSTRACT

The issues of food security and poverty are basically the problems that exist in rural community development. The course of the food security development should be more directed toward efforts to empower and prosper the rural community, especially at household level around subsistent farmers. The objective of this research was to formulate the model of farmer empowerment to speed up the farmer's self-supportiveness and the sustainability of household as well as national food security. The farmer empowerment is the way for farmer's participation in the programs of food security, so that the farmers themselves can achieve self-supporting prosperous village. According to the activity success indicators used to measure the aspect of affinity group empowerment; it was revealed that the group development in Garut district was relatively better than in Klaten district. One of the factors that determined the success of group affinity development was the suitability between the venture developed by group member with the local context; which was influenced by the socio-economic and political dynamics and local ecology of the community food security management. Food security institution (affinity group) experienced different development in every area; all followed the

preparation and promotion stages that had been previously implemented and it was influenced also by the indigenous institution and village institution. The model of farmer empowerment in every village was specific to the community dynamics, the development of affinity group institution, and the staging of the self-supportive program implementation.

Keywords : Farmer, empowerment, food security.

PENDAHULUAN

Masalah ketahanan pangan pada hakikatnya terkait erat dengan masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebanyak 39,05 juta (17,75 %). Sebagian besar (63,41%) penduduk miskin berada di pedesaan dan pada umumnya bergantung pada sektor pertanian¹, sebagai petani gurem serta rentan terhadap kerawanan pangan.

Secara empiris telah banyak dibuktikan bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan pengentasan kemiskinan hingga saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Secara mendasar kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan dan program pembangunan pertanian cenderung bercorak terpusat, searah (*top-down*) dan seragam. Selain itu orientasi pembangunan pertanian didominasi pada upaya membangun *fisik* dan *kapital* (peningkatan produksi, produktivitas, dll.), sementara upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani termarginalkan. Kondisi ketidakberdayaan petani tercermin dari lemahnya kapasitas diri, kapasitas kelembagaan lokal dan jaringan dalam : (1) memecahkan masalah-masalah yang ada dengan kekuatan sendiri (*selfhelp*), dan (2) mengimplementasikan program-program pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan ketahanan pangan pada khususnya.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka sebagaimana dikemukakan Pakpahan dkk. (2006), menjadi perlu adanya upaya dan tindakan konkrit untuk membangun sebuah ideologi pembangunan pertanian berkeadilan yang dapat mempertemukan dan mengharmoniskan antara kepentingan negara (pemerintah) dengan kepentingan petani. Pada dasarnya pembangunan pertanian yang ideal

¹ Berita Resmi Statistik No.47/IX/ 1 September 2006 tentang Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2005-2006.

akan dapat diwujudkan jika bersandikan pada "kemandirian" dan "keberpihakan", dalam pengertian petani seharusnya diberdayakan untuk mandiri dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan usaha pertaniannya dan pemerintah memberikan dukungan dan keberpihakan untuk mewujudkan kemandirian tersebut. Sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat yang tepat dan efektif untuk mempercepat pemecahan masalah pembangunan pertanian, khususnya ketahanan pangan di pedesaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model dan strategi pemberdayaan petani yang telah dilakukan para aktor menurut spesifik lokasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di dua kabupaten lokasi program aksi desa mandiri pangan (program Mapan), yaitu kabupaten Garut provinsi Jawa Barat (kasus berhasil) dan kabupaten Klaten provinsi Jawa Tengah (kasus gagal). Di setiap kabupaten ditentukan dua desa rawan pangan berbeda tipologi: dataran tinggi (pertanian) dan dataran rendah (lahan kering, pesisir). Metode penelitian adalah kualitatif dengan studi kasus desa. Metode pengumpulan data dengan focus group discussion, wawancara mendalam dan pengamatan berpartisipasi.

Prosedur pengumpulan data dan strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Kegiatan	Sumber data	Teknik Pengumpulan data
Mengkaji pemberdayaan kelompok afinitas	Data primer dan didukung data sekunder dari: kelompok afinitas	Wawancara pengelola (pengurus) dan diskusi kelompok terbatas
Merumuskan model pemberdayaan petani yang telah dilakukan para aktor menurut spesifik lokasi.	Data primer	Sarasehan dengan masing-masing aktor (pemerintah, swasta, komunitas) pada setiap lokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Indikator keberhasilan *pemberdayaan kelompok afinitas* pada tahap perkembangan: (1) terlaksananya pelatihan teknis bagi kelompok afinitas, (2) terlaksananya program kerja pendampingan, (3) terlaksananya kegiatan magang, (4) peningkatan akses (permodalan dan pemasaran), (5) terlaksananya kegiatan pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perkembangan kelompok afinitas hingga tahun ketiga di desa dataran tinggi lebih baik dibandingkan desa pesisir.

Kabupaten Garut: Kasus Program Mapan Berhasil

Terkait dengan pelatihan teknis yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa implementasi program Desa Mapan telah berhasil menangkap aspirasi dan kebutuhan riil kelompok-kelompok afinitas dalam upaya meningkatkan usahanya. Permasalahannya adalah Badan Ketahanan Pangan – Dinas Pertanian dan dinas terkait lainnya belum optimal dalam merespon kebutuhan kelompok-kelompok afinitas dalam hal peningkatan kemampuan teknis. Kondisi ini disebabkan oleh masalah keterbatasan dana, keterbatasan sumberdaya manusia, dan masih kentalnya kepentingan “ego-sektoral” diantara dinas terkait di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan program kerja pendampingan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, upaya untuk mengembangkan usaha kelompok-kelompok afinitas agar mampu meningkatkan pendapatan yang layak secara ekonomis tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada para pendamping dan Tim Pangan Desa. Terdapat fakta bahwa para pendamping dan Tim Pangan Desa memiliki keterbatasan dalam hal “dukungan” dalam hal dana, pengetahuan, keterampilan dan jaringan. Oleh karena itu dinas/instansi terkait supra-desa yang terkait dengan Program Desa Mapan seyogyanya memberikan “dukungan penuh” kepada Pendamping dan Tim Pangan Desa selaku “ujung tombak” pelaksana program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan akses terutama pada aspek peningkatan *permodalan kelompok* dan komunitas. Sedangkan peningkatan akses pemasaran produksi kelompok dan komunitas terjadi meskipun dalam skala dan lingkup yang terbatas. (Tabel 1 dan Tabel 2). Terdapat kasus dimana anggota kelompok melakukan diversifikasi jenis komoditas pertanian, yaitu menanam komoditas tanaman jagung dan kacang tanah. Dengan diversifikasi tanaman mereka tidak mengalami kerugian, dan bahkan masih mampu mengembalikan modal PMUK.

Salah satu indikator keberhasilan pada tahap pengembangan adalah terlaksananya kegiatan pengembangan usaha menuju skala yang mampu memberikan pendapatan yang layak secara ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan pengembangan (diversifikasi) usaha telah mulai terjadi di kedua lokasi, walau dengan catatan masih dalam lingkup yang terbatas. Khusus bagi para anggota yang usahanya bergerak di bidang pertanian, penambahan modal PMUK di Desa dataran tinggi telah mampu mengurangi dan bahkan hingga “mematikan” usaha Bank Keliling yang dipandang sebagian besar warga banyak merugikan para petani.

Tabel 1. Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Periode Bulan Oktober 2008) di Desa Pesisir Kabupaten Garut

No	Lokasi Komunitas	Nama Kelompok	Perkembangan									
			Modal Awal		Modal Sekarang		Jenis Usaha		Anggota		LKM/LKD	
			PMUK	PMUK	Tabungan	Jasa	Awal	Skrng	Awal	Skrng	Awal	Skrng *)
1.	Kp. Taman Nalusu	Sawargi	12.500.000	12.500.000	1.200.000	4.000.000	Ikan hias Rumput Laut	Padi Gogo Palawija Warung Nasi Uduk	20	26	0	3.330.000
2.	Kp. Cicadas Mukti	Sugih	12.500.000	12.500.000	865.000	4.000.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	23	27	0	1.560.000
3.	Kp. Gunung Sulah	Bina Sejahtera	14.500.000	14.500.000	525.000	4.640.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	28	34	0	2.412.000
4.	Kp. Sanding	Bina Mukti	14.000.000	14.000.000	640.000	4.480.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	25	52	0	2.500.000
5.	Kp. Bopong Karya	Wiguna	12.500.000	12.500.000	660.000	4.000.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	20	30	0	2.470.000
6.	Kp. Gunung Sulah	Karya Mukti	14.000.000	14.000.000	745.000	4.480.000	Pupuk	Padi Gogo Palawija Warung	25	27	0	780.000
7	Total		80.000.000	80.000.000	4.635.000	25.600.000			141	196	0	13.052.000

Keterangan : *) Kondisi keuangan yang ada di LKD yang tercatat sebanyak Rp 13.052.000.- itu adalah merupakan dana yang ada di kas LKD pada saat ini setelah digulirkan kembali kepada anggota kelompok yang baru. Terdapat kasus dimana anggota-anggota kelompok afinitas yang memiliki usaha pada kegiatan perladangan (khususnya padi huma) mengalami kegagalan panen akibat kekeringan pada masa tanam tahun 2007. Sehingga tidak semua anggota kelompok mampu mengembalikan pinjaman PMUK. Pemecahannya adalah dengan jalan mereka wajib mengembalikan jasa saja, sedangkan cicilan PMUK wajib dikembalikan pada masa tanam sekarang (masa tanam tahun 2008).

Tabel 2. Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Periode Bulan Oktober 2008) di Desa Dataran Tinggi Kabupaten Garut

No	Lokasi Komunitas	Nama Kelompok	Perkembangan									
			Modal Awal	Modal Sekarang		Jenis Usaha		Anggota		LKM/LKD		
			PMUK	PMUK	Tabungan	Jasa	Awal	Skrng	Awal	Skrng	Awal	Skrng
1.	Kp. Kancil	Karya Tani	10.000.000	10.000.000	663.000		Pipiti, Bilik, Bambu,	Pedagang Keliling, warung, SP	11	52	80.000.000	107.955.250
2.	Kp. Singkup	Sekar Tani	10.000.000	10.000.000	681.000		Gula Aren	Warung, Pedagang Keliling	15	50		
3.	Kp. Padaimut	Mulya Tani	20.000.000	20.000.000	690.000		Ternak Domba	Makanan Olahan, Warung, Pedagang, SP	29	72		
4.	Kp. Cikondang	Mekar Tani	10.000.000	10.000.000	689.000		Makanan Olahan	Warung, Pedagang, SP	13	59		
5.	Kp. Singkup	Berkah Tani	10.000.000	10.000.000	674.000		Gula Aren	Warung	11	53		
6.	Kp. Kamasri	Hegar Tani	10.000.000	10.000.000	652.000		Makanan Olahan	Warung	12	44		
7.	Kp. Cibarug	Bakti Tani	10.000.000	10.000.000	632.000		Pupuk, Saprotan	Gula Merah, Warung, Pedagang Keliling, Simpan Pinjam	8	45		
8.	Total		80.000.000	80.000.000	4.681.000				99	375	80.000.000	107.955.250

Kabupaten Klaten: Kasus Program Mapan Gagal

Pelatihan tehnik bagi kelompok afinitas antara lain pelatihan teknik perpaduan warna pada kain tenun ATBM, pembuatan aneka criping, dan pelatihan pemeliharaan kambing dan ayam. Namun usaha kain tenun ATBM masih mendapat tantangan cukup berat, baik dari sisi kebiasaan bertenen, pemasaran, dan perputaran modal yang dianggap oleh penunen tradisional masih lebih mudah dengan menggunakan cara tradisional. Dalam hal pembuatan aneka criping, sampai saat ini kelompok tersebut baru dapat menghasilkan criping gadung mentah (jrangking) dan belum mampu memproses menjadi criping gadung goreng (siap makan) dan dikemas dalam plastik. Tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan bahan baku gadung.

Kegiatan pendampingan yang selama ini dilakukan oleh pendamping hanya sisi manajemen administrasi kelompok dan tidak menyentuh sama sekali terhadap

hal-hal teknis karena memang kelemahannya adalah tidak disediakan pendamping teknis. Dalam proses pembentukan Tim Pangan Desa di dua desa didasarkan atas penunjukan dari Kepala Desa. Kelembagaan TPD di kedua desa belum berfungsi walaupun sudah beberapa kali diberikan pelatihan baik di kabupaten maupun di tingkat propinsi. Konflik internal di desa dataran rendah yang terjadi pasca pilkades harus diakui sangat mempengaruhi jalannya komunikasi antar sesama anggota TPD. Hal ini menunjukkan bahwa program belum cukup berhasil, baik dari sisi kegiatan usahanya, pengorganisasian kelompok, keberfungsian kelembagaan bentukan program, maupun dalam hal pendampingan (Tabel 3.)

Tabel 3. Perkembangan Usaha Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tahun 2008

No	Nama Kelompok Afinitas (Jumlah Anggota)	Data Perkembangan Usaha Periode Bulan	
		Juli 2007	Juli 2008
1.	Tri Jaya Perkasa (15 Orang)	Modal Awal Rp. 24.750.000,- Modal tersebut dimanfaatkan utk beternak Kambing Betina sebanyak 45 ekor dgn harga @ Rp.412.500,-	Jumlah ternak berkembang menjadi 67 ekor (induk + anakan) dan 6 ekor diantaranya mati karena keracunan dan terkena penyakit.
2.	Subur (20 Orang)	Modal Awal Rp. 25.000.000,-	Modal saat ini berkembang menjadi Rp. 29.239.235.-
3.	Mekarsari (25 Orang)	Modal Awal Rp. 30.250.000,- Dimanfaatkan untuk usaha tenun. Modal tersebut dibelanjakan utk membeli kain sebanyak 70 gendok (400m), @ Rp 7000,- (per 15 hari) 70 x Rp7000 = Rp 490.000,- Modal = Rp 232.000,- Untung =Rp 258.000,-	Modal saat ini berkembang menjadi Rp.35.574.500. Jumlah gendok berkembang menjadi 140 gendok (800m), @ Rp 7000,- (per 15 hari) 140 x Rp7000 = Rp 980.000,- Modal = Rp 464.000,- Untung = Rp 516.000,-

Model Pemberdayaan Petani Kabupaten Garut: Kasus Program Mapan Berhasil

Peningkatan Kapasitas Diri Petani

Berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan jelas terlihat bahwa kapasitas diri petani pada umumnya masih relatif tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari kemampuan petani dalam hal : 1) **Politik** ; yakni petani mampu berperan setara dalam dalam proses pembangunan, 2) **Sosial** ; pengembangan kelembagaan (organisasi petani), 3) **Ekonomi**, peningkatan kesejahteraan rumahtangga (kemampuan daya beli rumah tangga dan nilai tukar petani, 4) **Kesehatan**, terpenuhinya kebutuhan pangan secara mencukupi, berimbang dan bergizi. Terkait upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan petani di kedua desa, nampak bahwa petani di Desa dataran tinggi relatif lebih kuat di bidang ekonomi, sedangkan petani di Desa dataran rendah relatif lebih kuat di bidang politik.

Upaya peningkatan ketahanan pangan di Desa dataran tinggi nampaknya tidak lagi dapat difokuskan pada peningkatan produksi pertanian, melainkan diarahkan pada penguatan kekuatan daya beli rumah tangga petani. Hal ini berarti bahwa pengembangan sektor pertanian perlu digeser dari peningkatan produksi (*on-farm*), kepada peningkatan pendapatan di pasca produksi (*off-farm*). Upaya-upaya kongkrit untuk mendorong lahirnya industri kecil skala rumah tangga selain akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dapat membuka lapangan pekerjaan di tingkat komunitas. Jika upaya ini dapat dilakukan dengan baik, maka pada akhirnya akan berdampak positif pada upaya mengurangi tingginya tingkat urbanisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Berbeda dengan kondisi di Desa dataran tinggi, kondisi kapasitas petani di Desa pesisir lebih kuat dari aspek politik. Para petani sudah mampu mengorganisasikan diri untuk meningkatkan kekuatan posisi tawar menawar dengan pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan sumberdaya lahan di wilayahnya. Upaya penguatan ketahanan pangan masih memberi peluang yang cukup besar pada aspek peningkatan produktivitas.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Secara umum kondisi kapasitas kelembagaan (lokal dan formal) di Desa dataran tinggi lebih baik dibandingkan Desa pesisir. Upaya untuk merintis pembangunan Lembaga Keuangan Mikro Desa (LKMD) di desa dataran tinggi sudah dimulai dengan program UP2K, selanjutnya diperkuat oleh program Raksa Desa dengan bantuan modal sebesar Rp 100 juta untuk kegiatan ekonomi bergulir. Sedangkan di Desa pesisir, Lembaga Keuangan Desa (LKD) baru mulai dirintis saat implementasi Program Desa Mapan. Sebelum adanya program Desa Mapan, program dana bergulir selalu mengalami kemacetan. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya kapasitas diri dan kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, seyogyanya untuk kasus Desa dataran tinggi upaya penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada peningkatan kapasitas LKD. Dalam hal ini, jika memungkinkan LKD yang sudah terbentuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi setingkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sedangkan untuk kasus Desa pesisir, upaya penguatan kelembagaan seyogyanya diarahkan untuk “mempertahankan” dan “meningkatkan” kapasitas Lembaga Pemerintah Desa, Tim Pangan Desa, LKD dan juga kelompok-kelompok afinitas karena memiliki potensi untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat mulai tumbuhnya generasi muda yang cerdas, kritis dan kreatif dalam mencari jalan keluar bagi masalah sosial, ekonomi dan politik di lingkungannya.

Peningkatan Kapasitas Jaringan

Ditinjau dari aspek peningkatan kapasitas jaringan, nampak bahwa posisi kapasitas jaringan kedua desa masih tergolong lemah. Meski demikian, mengingat posisi dan jarak Desa dataran tinggi yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten dan Provinsi serta memiliki aksesibilitas yang lebih baik, maka kapasitas jaringan desa dataran tinggi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan pesisir.

Hingga sejauh ini, jaringan yang terbentuk masih didominasi oleh jaringan antara instansi pemerintah supra-desa dengan pemerintah desa. Belum terlihat adanya jaringan yang kuat terbangun antara pihak masyarakat desa dengan pihak

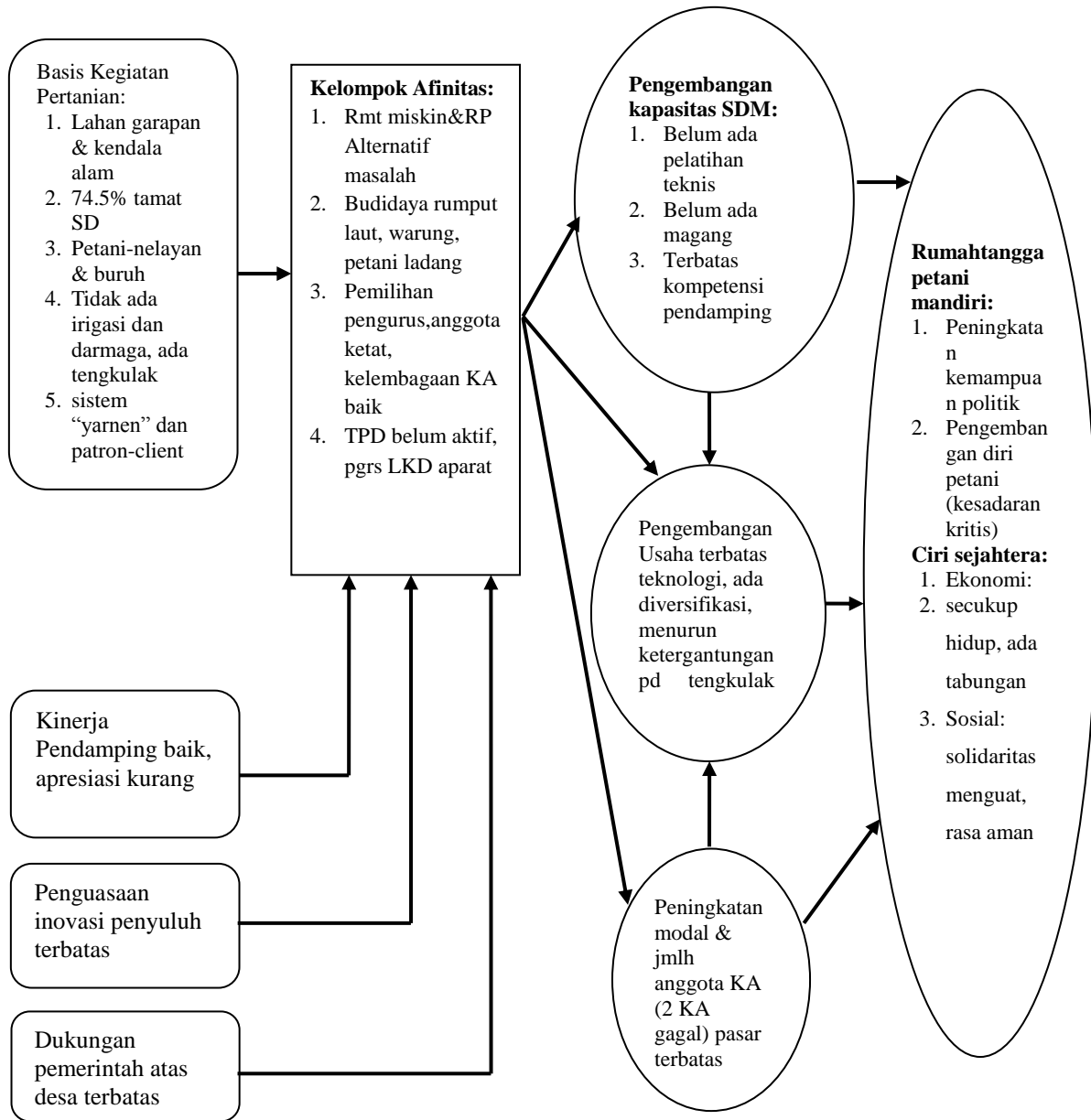
swasta, LSM dan perguruan tinggi. Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, dinas/instansi terkait di tingkat Kabupaten Garut (Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Kantor SDM-KP, Dinas Koperasi, dll) dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak pendamping dan koordinator BPP agar keduanya dapat menjadi “jembatan yang kokoh” bagi masyarakat desa untuk memperluas jejaring kerjasamanya. (Tabel 4).

Tabel 4. Matriks kegiatan pemberdayaan petani kasus desa dataran tinggi dan pesisir kabupaten Garut

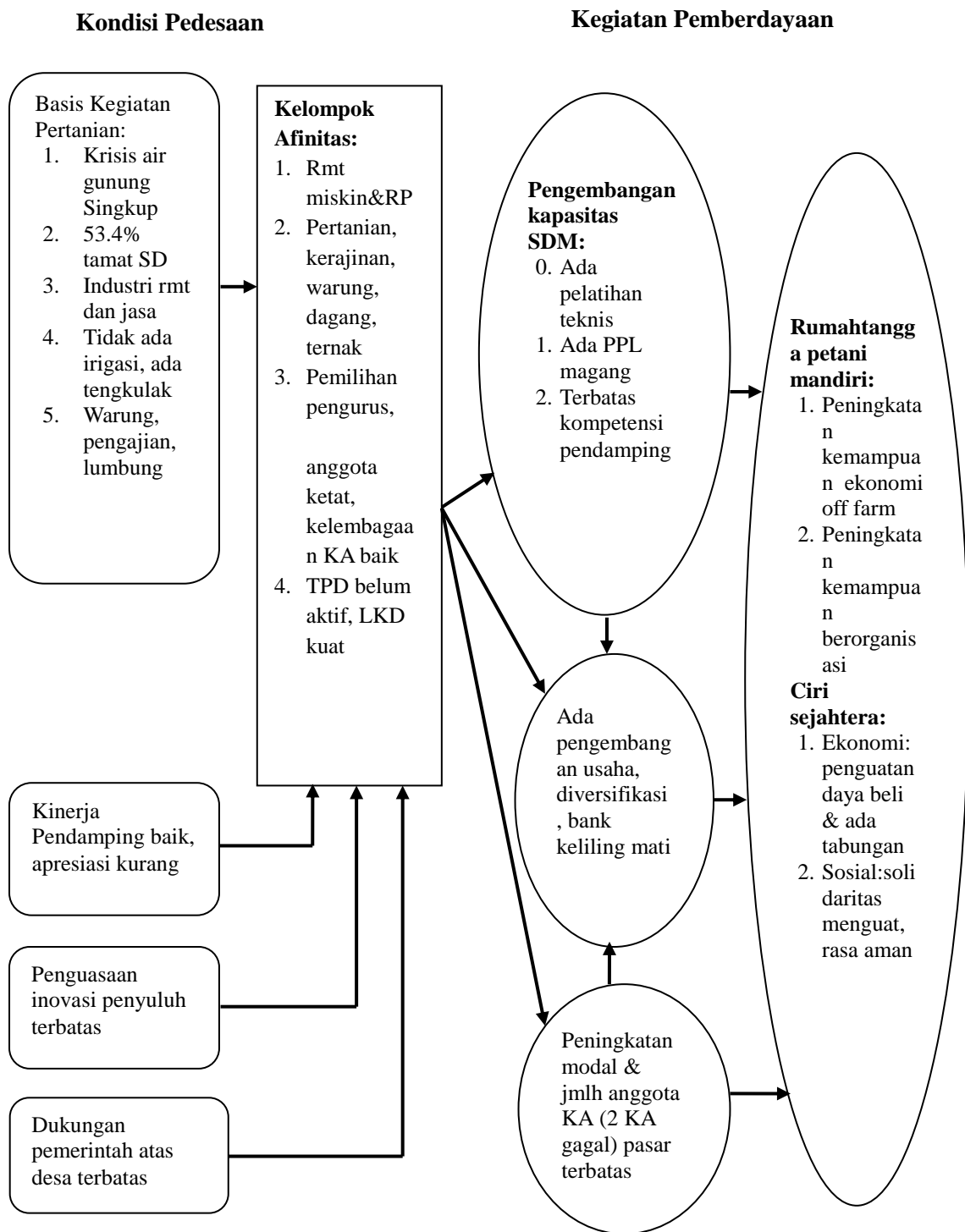
No	Uraian	Desa Dataran Tinggi	Desa Pesisir
1.	Pengembangan kapasitas SDM	Ada pelatihan secara swadaya kerajinan “pipiti”, sudah ada kegiatan magang yang dilakukan PPL terkait keberhasilan pengembangan kelompok afinitas di lokasi lain. Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik, terkendala keterbatasan kapasitas pendamping, TPD belum berfungsi dengan baik, LKD berjalan baik	Belum ada pelatihan, padahal dibutuhkan untuk kelompok afinitas pelatihan sesuai kebutuhan: pengolahan hasil laut. Belum ada kegiatan magang bagi pendamping, anggota. Kegiatan pendampingan berjalan dengan baik, terkendala keterbatasan kapasitas pendamping, TPD belum berfungsi dengan baik, LKD juga belum berjalan baik
2.	Pengembangan kelembagaan	Relatif ada pengembangan usaha dan diversifikasi usaha, tidak tergantung lagi pada bank keliling	Pengembangan usaha dibatasi teknologi, ada diversifikasi: pedagang nasi uduk, warungan. Tidak lagi terjerat hutang pada tengkulak
3.	Pengembangan jaringan	Terjadi peningkatan akses pada permodalan kelompok, jumlah anggota dan tabungan kelompok, cadangan modal LKD. Pemasaran masih terbatas.	Terjadi peningkatan akses pada permodalan kelompok, jumlah anggota dan tabungan kelompok (2 KA gagal). Pemasaran masih terbatas karena kendala teknologi.

Kondisi Pedesaan

Kegiatan Pemberdayaan



Gambar 1. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Garut (tahap pengembangan)



Gambar 2. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Garut (tahap pengembangan)

Model Pemberdayaan Petani Kabupaten Klaten: Kasus Program Mapan Gagal

Kapasitas Diri

Secara umum kondisi kapasitas diri petani miskin di Desa dataran rendah masih relatif rendah baik itu dalam kemampuan/keterampilan teknis di bidang pertanian, maupun dari aspek kesadaran kritis di bidang politik, terutama menyangkut hak dan kewajibannya untuk terlibat dalam proses pembangunan di desanya. Kondisi ini terjadi karena hampir sebagian besar energi yang dimiliki rumah tangga miskin masih dicurahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota rumah tangganya. Upaya untuk meningkatkan kapasitas diri petani kerap kali menghadapi hambatan. Kondisi lahan pertanian yang ada hampir seluruhnya merupakan lahan tadah hujan, tingkat produktivitas yang rendah, serta rata-rata kepemilikan lahan yang rendah menambah berat tantangan untuk mengembangkan sektor pertanian di dataran rendah.

Kapasitas diri petani di Desa dataran tinggi secara politis terlihat dari sudah terbiasanya masyarakat mengelola dana bantuan/pinjaman secara terorganisir. Desa ini memiliki Lahan pertanian subur, kecukupan air, hasil palawija (jagung, kedelai, singkong) dan buah-buahan (rambutan, pepaya, mangga) melimpah, potensi peternakan (sapi perah, kambing). Pemberdayaan ketahanan pangan seyogyanya difokuskan pada aspek peningkatan kapasitas petani untuk mengorganisir diri dalam kelompok yang solid supaya berdaya upaya melipatgandakan *nilai tambah* dari produksi pertanian yang dihasilkan.

Kapasitas Kelembagaan

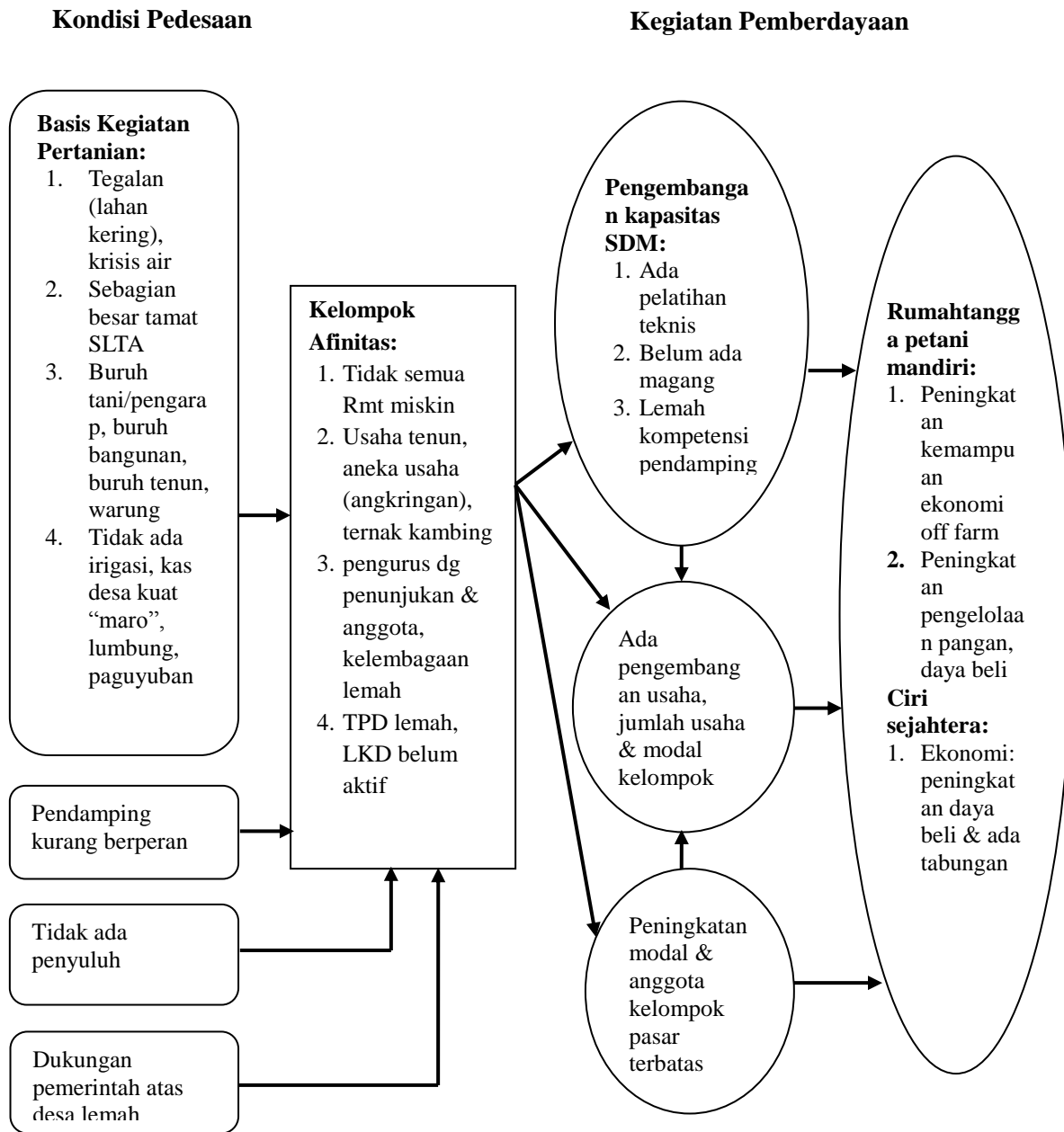
Kapasitas kelembagaan formal (pemerintahan desa) di Desa dataran rendah perlu ditingkatkan agar lebih mampu mengelola program-program pembangunan yang diiniasi oleh pemerintah atas desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal informal seyogyanya difokuskan pada kelompok afinitas yang mengelola tenun lurik, kelompok pengajian Aisyiah yang mengelola lumbung padi, kelembagaan arisan (uang, sembako, semen dll) yang dikelola tiap RT, dan kumpulan perantau asal Jambakan di kota-kota besar JAMVATRO. Kelompok tenun mekarsari berpotensi mengajak warga lain untuk beralih membuat tenun lurik motif yang bernilai jual tinggi, selain juga masih membuat *jarik gendong*. Kapasitas kelembagaan formal pemerintahan Desa dataran tinggi sudah relatif baik dan efektif. Desa dataran tinggi termasuk ke dalam salah satu desa percontohan karena beberapa kali memenangkan lomba tertib administrasi desa.

Pengembangan Jejaring

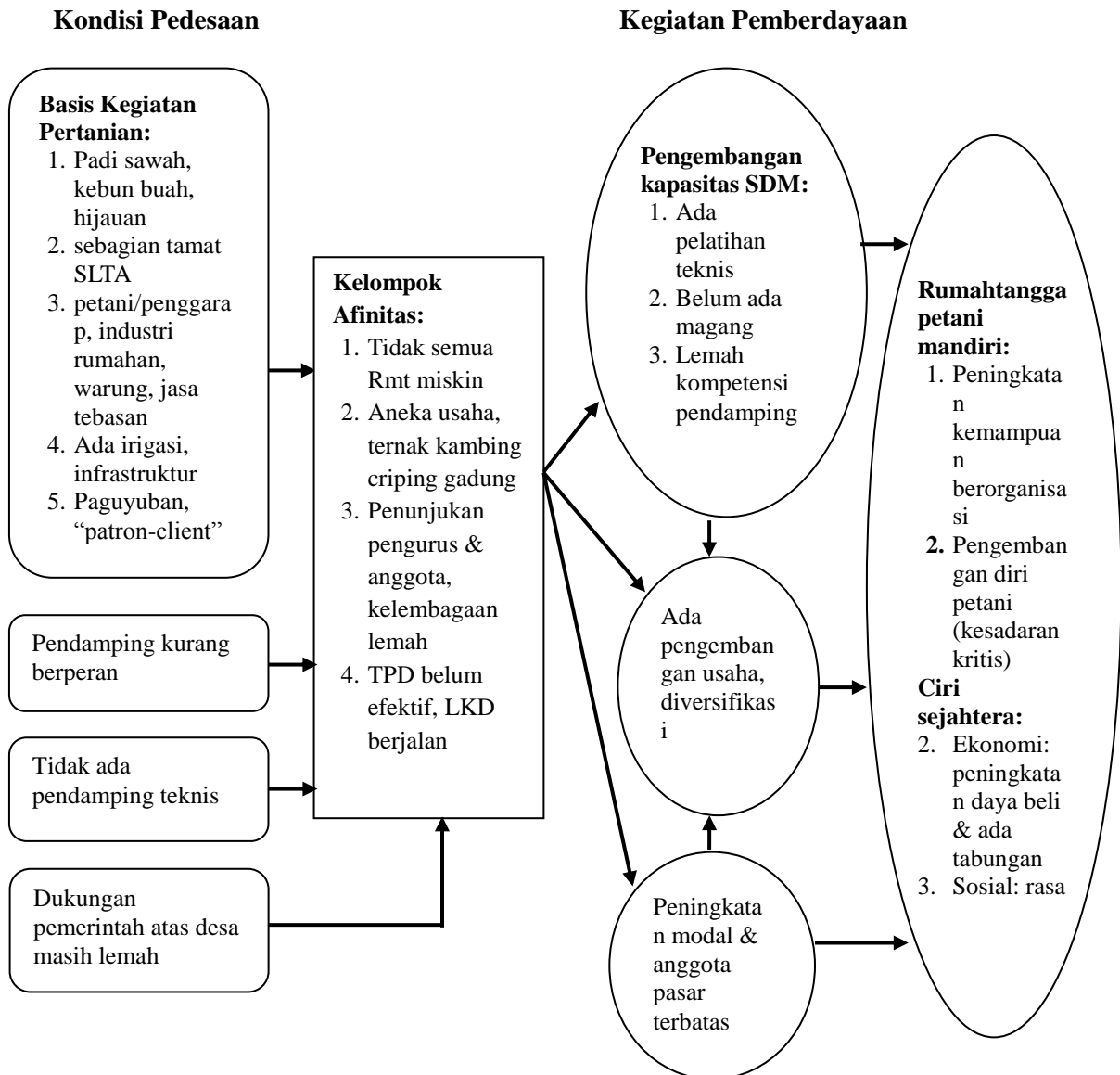
Posisi kapasitas jaringan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa dataran rendah tergolong lemah, terutama karena dari sisi letak geografisnya yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Meski demikian jika ditinjau dari sisi kedekatan dengan “pemegang kekuasaan”, maka tergolong relatif kuat, namun belum sepenuhnya berfihak kepada masyarakat miskin. Sementara itu untuk kasus Desa dataran tinggi terkait dengan program pemberdayaan yang masuk ke desa, jaringannya masih terbatas didominasi oleh jaringan antara pemerintah atas desa dengan pemerintah desa. Belum terlihat adanya jaringan yang kuat terbangun antara pihak masyarakat desa dengan pihak swasta, LSM dan perguruan tinggi. (Tabel 5)

Tabel 5. Matriks Kegiatan Pemberdayaan Petani Kasus Desa Dataran Rendah dan Dataran Tinggi Kabupaten Klaten

No	Uraian	Desa Dataran Rendah	Desa Dataran Tinggi
1.	Pengembangan kapasitas SDM	Sudah ada pelatihan teknis pewarnaan dan design khusus untuk usaha tenun. Belum ada magang yang dilaksanakan untuk pendamping maupun anggota kelompok afinitas. Kegiatan pendampingan masih lemah, karena lemahnya kompetensi pendamping, TPD dan LKD belum berfungsi	Sudah ada pelatihan untuk usaha criping gadung. Belum ada magang yang dilaksanakan untuk pendamping mapun anggota kelompok afinitas. Kegiatan pendampingan masih lemah, karena lemahnya kompetensi pendamping, TPD belum berjalan efektif, LKD sudah mulai berjalan baik
2.	Pengembangan kelembagaan	Pengembangan teknologi sudah mendukung ke arah pengembangan usaha tenun, ada peningkatan jumlah anggota dan modal kelompok	Pengembangan teknologi mendorong diversifikasi usaha, ada peningkatan modal kelompok, usaha berjalan lancar
3.	Pengembangan jaringan	Akses permodalan menjadi lebih baik, namun muncul keterbatasan pasar dan masih ketergantungan pasar lokal Dukungan pemerintah desa masih lemah karena pasca konflik pemilihan kepala desa Jaringan vertikal dengan pemerintah atas desa masih lemah, dukungan dari pemerintah atas desa masih bersifat stimulan, belum berkelanjutan	Akses permodalan bertambah dengan stimulan program mapan, masih ada ketergantungan bahan baku dari luar, kenaikan BBM membuat makin tergantung pada penebas. Dukungan kepemimpinan pemerintah desa baik dalam mendorong LKD. Jaringan vertikal dengan pemerintah atas desa masih lemah, dukungan bersifat stimulan, belum berkelanjutan



Gambar 3. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Klaten (tahap pengembangan)



Gambar 4. Model pemberdayaan petani desa dataran rendah – Klaten (tahap pengembangan)

KESIMPULAN

- 1 Model pemberdayaan Desa Mandiri Pangan ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani, dengan mengutamakan ciri ekonomi (modal) pada tahap pengembangan. Strategi pemberdayaan bertumpu pada pembentukan kelompok untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha dengan dukungan pendamping, PPL, tim pangan desa, tim koord. ketahanan pangan Kabupaten.

- 2 Model pemberdayaan petani di tingkat komunitas berkembang spesifik menurut : a). kondisi dinamika sosial, ekonomi, budaya, politik dan ekologi komunitas, b). perkembangan kelembagaan ketahanan pangan dan, c). perkembangan tahap implementasi program mapan. Kegiatan pemberdayaan seyogyanya difokuskan dan bertumpu pada pemberdayaan rumahtangga petani dengan dukungan kelembagaan ketahanan pangan yang kuat, baik itu di level komunitas, desa dan kabupaten.
- 3 Strategi Pemberdayaan:
 - a. Strategi pemberdayaan petani difokuskan pada peningkatan kapasitas diri sumberdaya manusia petani miskin dan rawan pangan di bidang *kesadaran* sosial, budaya, ekonomi, budaya, politik dan ekologi dengan didukung oleh pelayanan dan pendampingan kelembagaan pemerintah lokal dan pemerintah “atas desa” yang kuat, adil, bersih, dan transparan.
 - b. Strategi pemberdayaan berikutnya adalah meningkatkan akses para rumahtangga petani miskin dan rawan pangan terhadap sumber-sumber kehidupan (modal manusia, modal ekonomi, modal sosial dan modal alam), serta pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial).
 - c. Kelembagaan ketahanan pangan lokal yang sudah ada di tiap komunitas (Lumbung Paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sangat penting, karena lumbung paceklik selain berfungsi sebagai “benteng utama” masyarakat dalam menghadapi masalah paceklik/kerawanan pangan, juga sebagai “ciri/perlambang” dari tegaknya kedaulatan dan solidaritas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani di pedesaan.
 - d. Perlu adanya upaya-upaya kongkrit untuk mereduksi adanya “ego sektoral” pada dinas/instansi pemerintah, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi (ekonomi dan sosial) dalam implementasi program.
 - e. Strategi implementasi perlu meningkatkan perhatiannya kepada aspek keberlanjutan lingkungan/sumberdaya alam, agar mampu memberi manfaat bagi kebutuhan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009*. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Handewi, P.S. Rachman dan Mewa Ariani. 2002. *Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi*. FAE. Vol 20. No.1 . Juli 2002.
- Hardinsyah. 2001. *Pembangunan Pangan di Era Ekonomi Daerah Prosuding Dialog dan Loka Karya Kebijakan dan Program Pangan, Ketahanan Pangan di Era Ekonomi..* Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB. Bogor.
- Israel, Arturo. 1990. *Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman Proyek-Proyek Dunia*. LP3ES. Jakarta.
- Pakpahan, Agus. dkk. 2004. *Membangun Pertanian Indonesia : Bekerja, Bermartabat dan Sejahtera*. DPP Himpunan Alumni IPB.
- Pranadji, Tri. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Membangun Pertanian dan Pedesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Badan Litbang dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pranarka, AMW dan Vidhyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) didalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Disunting oleh Onny S. Projono dan AMW Pranarka. CSIS. Jakarta.
- Sajogjo. 1982. "Modernization Without Development in Rural Java." The Journal of Social Studies. 1982. Dacca, Bangladesh.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama Bandung.

**RANCANG BANGUN MODEL EVALUASI KINERJA BERBASIS
PENGETAHUAN PADA KOPERASI SUSU UNTUK Mendukung
KEDAULATAN PANGAN NASIONAL**

(the Design of Performance Evaluation Model Based on Knowledge at Dairy
Cooperative to Support National Food Sovereignty)

Anggraini Sukmawati, Farida R. Dewi¹⁾, Anik Djuraidah²⁾, Lucia Cyrilla³⁾

¹⁾Dep. Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen-IPB, ²⁾Dep. Ilmu Produksi dan
Teknologi Peternakan-Fakultas Pertanian-IPB, ³⁾Dep. Statistika-Fakultas
Matematika dan IPA-IPB

ABSTRAK

Isu strategis pembangunan koperasi di Indonesia saat ini adalah pentingnya penguatan kapabilitas dan daya saing koperasi susu sebagai pemasok domestik yang utama agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi sehingga kedaulatan pangan nasional dapat terwujud. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (*knowledge-gap*) saat ini baik di tingkat pengurus dan karyawan koperasi; (2) menghasilkan model evaluasi kinerja KUD/Koperasi Susu berdasarkan Teknik *Balance Scorecard*. Hasil terhadap analisis *knowledge gap* adalah bahwa dari 7 variabel yang dikaji yang memiliki gap terbesar adalah variabel visi bersama (0,512). Hasil identifikasi terhadap indikator dari setiap dimensi yang mempengaruhi kinerja koperasi susu diperoleh sebagai hasil elaborasi dari studi literatur, observasi lapang dan survei pakar. Dari tahap ini dihasilkan 9 indikator kinerja kunci (IKK) yang terdistribusi pada perspektif kinerja dan akan dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja koperasi susu, yaitu: tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat profitabilitas koperasi, pertumbuhan *Return On Assets* per tahun, harga jual produk, jumlah pesaing, skala usaha, pembagian tugas dan wewenang, kapabilitas karyawan, dan tingkat kesenjangan pengetahuan karyawan. Kesembilan IKK terdistribusi pada perspektif keuangan (30%), perspektif pelanggan (20%), perspektif proses bisnis internal (10%), pertumbuhan dan pembelajaran (30%). Pada level alternatif, indikator prioritas pada perspektif keuangan adalah tingkat pertumbuhan penjualan (39.1%). Pada perspektif pelanggan, adalah pada indikator harga jual produk (61.0%). Sementara pada perspektif proses bisnis internal, adalah skala usaha. Untuk perspektif pertumbuhan pembelajaran adalah indikator tingkat kapabilitas karyawan (35.5%) dan tingkat kesenjangan pengetahuan karyawan (35.5%). Pendekatan model strategi berbasis pengetahuan diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendekati realitas dari sistem usaha koperasi.

Kata kunci: *Balanced score card*, indikator kinerja kunci, koperasi susu, kesenjangan pengetahuan.

ABSTRACT

The current issue on Cooperatives development in Indonesia is the importance of strengthening the capabilities and competitiveness as the main domestic supplier to the heavy reliance on imports could be reduced so that the national food sovereignty can be realized. The study identified knowledge-gap at the board and employees of cooperatives and designed a knowledge based performance evaluation model of Dairy Cooperatives was conducted by using Balanced Scorecard technique. The results of knowledge-gap analysis was that of the 7 variables that were examined that have the largest gap was the shared vision (0.512). The identification result of indicators of each dimension that

affects the performance of dairy cooperatives obtained of elaboration of the literature study, field observation and survey experts. The study concludes by distributing nine key performance indicators (KPI) on the financial perspective (30%), the customer's perspective (20%), internal business process perspective (10%), growth and learning (30%). At the level of alternatives, the priority of the financial perspective KPI's was the level of sales growth (39.1 %), in the customer perspective was the selling price indicator (61.0%). While the internal business process perspective was a scale business and the perspective of learning growth was an indicator of the level of employee capability (35.5%) and the level of employee knowledge gaps (35.5%). The knowledge-based strategy model was expected to provide a closer representation of the real condition of dairy cooperatives.

Keywords : Balanced score card, dairy cooperatives, knowledge gap, key performance indicators.

PENDAHULUAN

Susu merupakan salah satu komoditas pangan yang penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007 telah mencapai 224.094.900 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,36 persen antara tahun 2005-2007, maka angka ini bersama dengan pola konsumsi susu per kapita 8 liter, akan sangat mempengaruhi kebutuhan susu nasional. Pada tahun 2004-2006 impor Indonesia untuk susu dan produk turunannya mencapai 92 persen Ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pangan impor adalah salah satu indikasi dari masalah kedaulatan pangan. Bentuk paling menakutkan dari buruknya kedaulatan pangan adalah keterjebakan pangan (*food trap*).

Implikasinya adalah bahwa dalam konteks kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan, maka peningkatan kesejahteraan petani perlu bervisi pemberdayaan masyarakat, sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja produktif di pedesaan maupun perkotaan. Perbaikan keterkaitan aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan diharapkan mampu meningkatkan arus pergerakan produk dan jasa yang sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dimensi lain yang perlu dipikirkan adalah struktur usaha tani keluarga, sistem produksi yang efisien sampai pada aspek distribusi dan tataniaga yang berpihak pada petani produsen (Nasution, 2002).

Untuk itu diperlukan penguatan kapabilitas dan daya saing Koperasi Susu sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan berperan signifikan dalam upaya

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan peternak. Sumber daya paling strategis dalam konteks keunggulan bersaing adalah pengetahuan. Indikator kunci adanya peningkatan kapabilitas suatu organisasi adalah peningkatan pengetahuan yang dimiliki anggota organisasi tersebut. Untuk itu peningkatan daya saing berbasis pengetahuan bagi koperasi susu merupakan strategi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (knowledge-gap) saat ini baik di tingkat pengurus dan karyawan koperasi; (2) menghasilkan model evaluasi kinerja KUD/Koperasi Susu berdasarkan Teknik *Balance Scorecard*.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data

Jenis data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan pengisian kuesioner. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Gabungan Koperasi Susu Indonesia dan laporan tahunan koperasi susu.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel mempergunakan *judgment sampling* berdasarkan lokasi dan skala usaha. Sampel berjumlah 8 koperasi susu dengan jumlah keseluruhan 100 responden dari karyawan koperasi.

Metode Analisis

Analisis Knowledge-Gap (K-Gap)

Penilaian kesenjangan pengetahuan (K-Gap) di dalam suatu organisasi, agar dapat diketahui keadaan pengetahuan yang dibutuhkan dan pengetahuan yang sekarang tersedia. Jika terjadi kesenjangan pengetahuan, hal tersebut menunjukkan langkah apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk menghilangkan kesenjangan tersebut (Setiarso *et al*, 2009).

Kesenjangan pengetahuan diperoleh dengan menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan rata-rata tingkat penguasaan terhadap pengetahuan yang

dibutuhkan oleh karyawan. Rumus perhitungan nilai kepentingan untuk setiap pengetahuan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

$$NK_i = \frac{(K_1 \times 1) + (K_2 \times 2) + (K_3 \times 3) + (K_4 \times 4)}{R}$$

Keterangan :

- NK_i = Nilai kepentingan terhadap *knowledge* i
- K_1 = Jumlah responden dengan jawaban "A"
- K_2 = Jumlah responden dengan jawaban "B"
- K_3 = Jumlah responden dengan jawaban "C"
- K_4 = Jumlah responden dengan jawaban "D"
- R = Total responden

Rumus perhitungan nilai penguasaan untuk setiap *knowledge* yang dibutuhkan adalah:

$$NP_i = \frac{(P_1 \times 1) + (P_2 \times 2) + (P_3 \times 3) + (P_4 \times 4)}{R}$$

Keterangan :

- NP_i = Nilai penguasaan terhadap *knowledge* i
- P_1 = Jumlah responden dengan jawaban "A"
- P_2 = Jumlah responden dengan jawaban "B"
- P_3 = Jumlah responden dengan jawaban "C"
- P_4 = Jumlah responden dengan jawaban "D"
- R = Total responden

Teknik Balanced Scorecard

Proses identifikasi terhadap indikator-indikator kinerja pada lingkungan internal, lingkungan eksternal, rencana strategik, dan perspektif kinerja dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dilanjutkan dengan teknik *Ordered Weighed Averaging (OWA) Operators* untuk memperoleh indikator kinerja kunci (Marimin, 2004). Menurut Kaplan dan Norton (1996), teknik pengukuran kinerja yang menempatkan pelanggan sebagai indikator utama setelah keuangan adalah teknik Pengukuran yang Berimbang (*Balanced Scorecard*). Teknik tersebut sesuai dengan karakteristik sistem pengukuran kinerja yang baik yang berguna dalam menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa koperasi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan (Luis dan Biromo, 2009).

Teknik *Balanced Scorecard*

Proses desain ulang sistem usaha secara menyeluruh dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Penyebaran Fungsi Kualitas (*Quality Function Deployment*) yang menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam bentuk prioritas. Teknik ini berguna sebagai pendekatan yang sistematis untuk membantu pihak manajemen mengatur elemen-elemen yang dibutuhkan dalam menyaring, mendefinisikan, dan menyebarkan suara pelanggan pada setiap level dari sistem usahanya, sehingga pengusaha mampu mengevaluasi respon potensial dalam menghadapi kebutuhan pelanggan yang universal (Cohen, 1995). Disamping itu metoda ini tetap menempatkan keterbatasan sumberdaya dan kondisi entitas bisnis sebagai dasar prioritas perbaikan yang terarah dan kontinyu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kesenjangan Pengetahuan (Knowledge-Gap)

Analisa kesenjangan pengetahuan dilakukan terhadap tujuh variabel, yaitu Visi Bersama, Pengelolaan Percakapan, Mobilisasi Penggerak Pengetahuan, Penyediaan Lingkungan yang Kondusif, Penyebaran Pengetahuan Internal, Pengetahuan Koperasi, dan Kreasi Pengetahuan. Hasil analisis terhadap kesenjangan pengetahuan adalah bahwa variabel visi bersama memiliki kesenjangan yang paling tinggi (0,512) dan yang terendah adalah penyediaan lingkungan yang kondusif (0,008). Selengkapnya hasil dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesenjangan Pengetahuan pada Koperasi Susu

No	Aspek	Kepentingan	Penguasaan	Gap
1	Visi Bersama	4.563	4.050	0.512
2	Kreasi Pengetahuan	4.214	3.830	0.384
3	Pengelolaan Percakapan	4.225	3.874	0.351
4	Mobilisasi Penggerak Pengetahuan	4.210	3.870	0.341
5	Penyebaran Pangetahuan Internal	3.762	3.453	0.309
6	Pengetahuan Koperasi	3.762	3.696	0.066
7	Penyediaan Lingkungan yang Kondusif	3.605	3.597	0.008

Identifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Koperasi Susu

Untuk memperoleh indikator yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) koperasi susu maka perlu dilakukan pengujian terhadap indikator penting tersebut sehingga dapat diperoleh indikator kinerja kunci. Pendekatan dengan survei pakar dilakukan untuk mengakuisisi pengetahuan dari pakar mengenai indikator yang benar-benar perlu diperhatikan dalam sebuah proses evaluasi kinerja. Selanjutnya penentuan IKK dilakukan menggunakan teknik *Ordered Weighted Averaging (OWA) Operators* (Marimin, 2004). Selengkapnya hasil ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Kunci KUD/Koperasi Susu

Variabel	Indikator
Perspektif Keuangan	1. Tingkat Pertumbuhan Penjualan (TPP) 2. Tingkat Profitabilitas Koperasi (TPK) 3. Pertumbuhan Return On Assets Per Tahun (ROA)
Perspektif Pelanggan	4. Harga Jual Produk (HJP) 5. Jumlah Pesaing (JP)
Perspektif Proses Bisnis Internal	6. Skala Usaha (SU)
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	7. Pembagian Tugas dan Wewenang (PTW) 8. Kapabilitas Karyawan (KK) 9. Tingkat Kesenjangan Pengetahuan Karyawan (TKK)

Prioritas Perbaikan Kinerja KUD/Koperasi Susu

Setelah pengukuran kinerja dibandingkan dengan nilai target untuk masing-masing indikator kinerja kunci, maka dapat ditentukan indikator-indikator yang membutuhkan perbaikan. Proses identifikasi prioritas perbaikan indikator kinerja kunci dilakukan dengan mengadopsi teknik penyebaran fungsi kualitas *Quality Function Deployment (QFD)*, dengan membangun rumah kualitas (Cohen, 1995). Dimulai dari hubungan antara strategi dengan kebutuhan *stakeholder* yang digambarkan oleh indikator kinerja kunci yang nilainya di bawah nilai target pada pengukuran kinerja, penentuan indikator karakteristik teknis standar yang menjadi standar perbaikan indikator kinerja kunci, penentuan bobot kepentingan indikator kinerja kunci, penentuan hubungan antara indikator kinerja kunci yang akan diperbaiki dengan indikator karakteristik teknis yang menjadi standar, hubungan antara karakteristik teknis, dan penentuan prioritas perbaikan.

Tahap perbaikan kinerja diawali dengan penentuan hubungan antara IKK dengan Karakteristik Teknis Standar (KTS) Koperasi Susu. Penentuan hubungan tersebut dilakukan dengan menggunakan hasil survey yang dilakukan terhadap pakar, yang kemudian diolah menggunakan teknik *OWA Operators* untuk menghasilkan nilai hubungan rata-rata untuk setiap IKK terhadap KTS. Teknik *Quality Function Deployment* (QFD) digunakan pada tahap perbaikan kinerja KUD/Koperasi Susu sehingga dihasilkan bobot kepentingan perbaikan indikator kinerja kunci.

Berdasarkan *Quality Function Deployment* (QFD) diperoleh bahwa rekomendasi perbaikan kinerja KUD/Koperasi Susu diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan standar kualitas produk, dalam hal ini susu segar yang ditampung oleh KUD/Koperasi (Gambar 1). Peningkatan standar kualitas susu segar tentunya sangat terkait dengan kinerja para karyawan dan anggota KUD/Koperasi. Selama ini kualitas susu lebih banyak didasarkan pada Berat Jenis, kadar lemak dan kandungan kuman dalam susu. Koperasi selalu berusaha untuk menekan jumlah kuman, agar susu yang disetorkan peternak dapat diterima oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Peternak tidak akan mampu menghasilkan susu yang baik kualitasnya jika para karyawan, khususnya di unit Kesehatan Hewan (Keswan) maupun unit Susu Segar tidak memahami tugas mereka masing-masing dengan baik. Selain itu sangat diperlukan disiplin dan tanggungjawab yang tinggi dari para karyawan KUD/Koperasi Susu di lapangan. Oleh karena itu kebijakan KUD/Koperasi Susu terkait standar kualitas susu sangat dipengaruhi oleh indikator pembagian tugas dan wewenang karyawan, serta kapabilitas karyawan. Hasil implementasi model evaluasi kinerja KUD/Koperasi Susu diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang efektif dalam upaya perbaikan kinerja KUD/Koperasi Susu saat ini maupun di masa yang akan datang.

KARAKTERISTIK TEKUNTS		Bobot Kepentingan IKK									
		Tingkat Laba Ditahan	Tingkat Inovasi	Kualitas Produk	Tingkat Profitabilitas	Pengetahuan Pengurus dan Karyawan	Sumberdaya Modal	Tanggungjawab Terhadap Pelanggan	Standar Kualitas		
INDIKATOR KINERJA KUNCI Parspektif Finansial Parspektif Pemasangan Parspektif Proses Bisnis Internal Parspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Tingkat Kepentingan Target Perbaikan	TPP	4	36	36	36	36	12	12	12	36	
	TPK	4	12	36	36	36	12	12	12	36	
	ROA	4	12	36	12	12	12	36	12	12	
	HUP	5	45	45	45	15	15	45	45	45	
	JP	4	36	12	12	36	12	36	36	36	
	SU	4	36	12	12	12	36	36	36	36	
	PTW	5	15	45	45	15	45	45	45	45	
	KK	5	45	45	45	45	15	45	45	45	
	TKK	5	45	45	45	45	15	45	45	45	
				282	312	288	258	258	168	288	336

1. Hubungan Antar KTS
2. Sangat Positif
1. Negatif
2. Hubungan IKK vs KT
3. Sangat Kuat
3. Sedang
1. Lemah
3. Tinggi Perbaikan
1. Ditingkatkan
2. Diperbaiki
1. Dikurangi

Gambar 1. Prioritas Perbaikan Kinerja Koperasi Susu

KESIMPULAN

1. Hasil analisa terhadap 7 variabel dalam *knowledge gap* adalah visi bersama merupakan variabel yang paling tinggi kesenjangannya (0,512), sedangkan variabel yang terendah adalah penyediaan lingkungan yang kondusif (0,008).
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi 9 indikator yang terdistribusi dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan (tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat profitabilitas koperasi, pertumbuhan *Return On Assets* per tahun), perspektif pelanggan (harga jual produk, jumlah pesaing), perspektif proses bisnis internal (skala usaha), dan perspektif pembelajaran dan Pengembangan (pembagian tugas dan wewenang, kapabilitas karyawan, dan tingkat kesenjangan pengetahuan karyawan).
3. Berdasarkan rumah mutu dalam analisa QFD diperoleh bahwa rekomendasi perbaikan kinerja KUD/Koperasi Susu diarahkan pada kemampuan untuk meningkatkan standar kualitas produk (hal ini akan sangat terkait dengan pembagian tugas dan wewenang karyawan serta kapabilitas karyawan).

SARAN

1. Koperasi perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terhadap seluruh karyawan mengenai pemahaman visi bersama sehingga semua kegiatan koperasi akan diarahkan kepada apa yang menjadi visi bersama koperasi tersebut
2. Transfer pengetahuan diantara anggota, karyawan dan manager koperasi perlu lebih diintensifkan dan mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan standar kualitas produk.
3. Untuk mempermudah koperasi susu dalam mengevaluasi kinerja prediktif maka untuk penelitian lebih lanjut perlu disusun Sistem Manajemen Ahli (SMA).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), para responden, para mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, L. 1995. *Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You*. Addison Wesley. Massachusetts.
- Kaplan, R dan D.P.Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Bussiness School Press. Boston.
- Luis, S. dan P.A. Biromo. 2009. *Step by Step in Cascading Balanced Scorecard to Functional Scorecards*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Nasution, M. 2002. *Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa*. Sajadah.Net. Jakarta.
- Setiarso, B., N. Harjanto dan H. Subagyo. 2009. *Penerapan Knowledge Management pada Organisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI PROPINSI JAWA BARAT

(Policy and Strategy for Income and Food Security Improvement of Rural and Urban Poor Household in West Java Province)

Alla Asmara, M. Parulian Hutagaol¹⁾, Ibrahim Isytar²⁾

¹⁾Dep. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen-IPB

²⁾Jurusan Sosial Ekonomi, Faperta Univ. Tanjungpura

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini sejak diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Di Provinsi Jawa Barat, populasi penduduk miskin bahkan cenderung semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah karakteristik sosial ekonomi dan kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan di provinsi ini. Penelitian dirancang sebagai suatu penelitian survey dengan metode penarikan sampelnya adalah *simple random sampling*. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga miskin perdesaan relatif tidak berbeda dengan rumah tangga miskin perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 35 persen rumah tangga miskin yang membelanjakan sebagian besar (60 persen) pendapatannya untuk makanan. Kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan terhadap kelaparan.

Kata kunci : Rumah tangga miskin perdesaan, rumah tangga miskin perkotaan, ketahanan pangan.

ABSTRACT

Poverty has become a serious problem in this country since the emergence of exchange rate crisis in 1997. In West Java Province, population of poor people becomes even increasing over the last few years. This study aims at evaluating socio-economic characteristics of poor families and situation of food security of rural and urban poor families in this province. The study is designed as research survey with simple random sampling. For analyzing data used descriptive analysis, qualitative and quantitative. The study finds there is no different in socio-economic characteristics between rural poor families and urban poor families. The result of study shows about 35 percent of poor household spend a very high portion of income (60 per cent) on food expenditure. This group is one the most vulnerable to starvation.

Keywords : Urban poor families, rural poor families, food security.

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan di Propinsi Jawa Barat secara umum menunjukkan kecenderungan semakin memburuk beberapa tahun terakhir ini, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut. BPS Jawa Barat (2007) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini meningkat dari 4.654,20 ribu jiwa menjadi

5.455,20 ribu jiwa selama periode 2004-2007. Populasi penduduk miskin meningkat baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pada periode tersebut, populasi masyarakat miskin di daerah perdesaan meningkat dari 2.411,00 ribu jiwa menjadi 2.800,7 ribu jiwa, sedang populasi penduduk miskin perkotaan meningkat dari 2.243,20 ribu jiwa menjadi 2.654,50 ribu jiwa.

Menurut Sumodinigrat (1999) kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang membuatnya tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Dalam realitas, kesulitan hidup yang dihadapi oleh penduduk miskin tersebut sering diperburuk oleh gejolak harga pasar. Karena pendapatan yang sangat terbatas, terjadinya peningkatan harga-harga kebutuhan pokok, seperti beras dan bahan bakar dapat membuat masyarakat miskin menderita kelaparan. Singkatnya, penduduk miskin sangat rentan terhadap kelaparan.

Fenomena bahwa populasi penduduk miskin yang semakin meningkat di Jawa Barat beberapa tahun terakhir ini dapat dimaknai sebagai fenomena mengenai semakin banyak penduduk yang menghadapi kerawanan pangan di provinsi tersebut. Kondisi ini sangat paradoksial mengingat fakta bahwa Jawa Barat adalah produsen utama beras nasional yang selalu mengekspor beras produksinya ke provinsi-provinsi lain yang kekurangan beras.

Kondisi yang paradoksial ini menyadarkan kita bahwa konsep ketahanan pangan yang bertumpu pada paradigma ketersediaan-penyediaan (*supply-availability paradigm*) sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi. Maxwell and Slater (2003) mencatat bahwa wacana mengenai ketahanan pangan berubah sedemikian cepat dari fokus pada ketersediaan-penyediaan (*supply & availability*) ke perspektif hak dan akses (*entitlements*). Dalam paradigma baru yang diperkenalkan oleh pemenang Nobel Ekonomi Amartya Sen ini, akses kepada pangan dimaknai sebagai hak azasi setiap penduduk. Implikasinya adalah negara mempunyai tanggung-jawab untuk menjamin kecukupan pangan bagi warganya, termasuk penduduk miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Raskin oleh pemerintah Indonesia dapat dipandang sebagai manifestasi dari tanggung-jawab tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi dan menganalisis kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan di Propinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Barat. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif banyak. Lebih lanjut dipilih dua kabupaten menjadi lokasi penelitian. Pada setiap kabupaten dipilih dua kecamatan dan dari setiap kecamatan dipilih satu desa dan satu kelurahan berdasarkan tingginya persentase kemiskinan. Dengan demikian wilayah sampel mencakup empat desa (mewakili wilayah perdesaan) dan empat kelurahan (mewakili wilayah perkotaan). Berdasarkan pertimbangan tersebut dua kabupaten yang dipilih menjadi lokasi studi adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang. Adapun waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu Juli-Desember 2009.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi: karakteristik RTM, pendapatan dan pola pengeluaran RTM. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dengan instrumen berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin penerima Raskin. Pemilihan rumah tangga sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Pada setiap desa/kelurahan dipilih 20 RTM. Dengan demikian total RTM yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 160 unit, sampel masing-masing wilayah (perdesaan dan perkotaan) 80 unit. Distribusi sampel ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Rumah Tangga Contoh

Wilayah	Jumlah Responden
a. Wilayah Perdesaan	80
Desa Gunung Sari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor	20
Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor	20
Desa Ranca Mulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang	20
Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang	20
b. Wilayah Perkotaan	80
Kelurahan Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor	20
Kelurahan Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor	20
Kelurahan Kota Kaler, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang	20
Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang	20
TOTAL	160

Analisis Data

Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin akan digambarkan secara deskriptif naratif. Deskripsi kondisi sosial ekonomi dari rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan meliputi karakteristik rumah tangga (jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga yang bekerja); dan kondisi ekonomi rumah tangga (pendapatan dan pengeluaran).

Analisis Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan RTM adalah pangsa pengeluaran pangan rumah tangga. Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) menjelaskan bahwa pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Hal ini bertolak dari teori Engel yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, semakin rendah pangsa pendapatannya yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan (Nicholson, 1997). Dengan perkataan lain, semakin miskin suatu keluarga semakin besar pangsa pendapatannya yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan. Padahal, semakin miskin suatu keluarga, semakin rentan

keluarga tersebut terhadap kerawanan pangan. Dengan demikian, pangsa pendapatan untuk belanja pangan dapat digunakan sebagai indikator ketahanan pangan suatu keluarga. Formulasi untuk mengukur pangsa pengeluaran pangan adalah:

$$PP = \frac{EP}{TP} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

(1)

dimana:

PP = pangsa pengeluaran pangan (%).

EP = pengeluaran RTM untuk pangan (Rp/bulan).

TP = total pengeluaran RTM (Rp/bulan).

Analisis terhadap tingkat ketahanan pangan RTM juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara tingkat kebutuhan energi normatif dengan konsumsi riil rumah tangga untuk pangan pokok (beras). Kebutuhan normatif terhadap beras didasarkan atas Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 100 kg/kapita/tahun. Formulasi tingkat konsumsi beras RTM adalah:

$$IKB = \frac{KBR}{KBN} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

IKB = indeks konsumsi beras RTM (%).

KBR = konsumsi riil rumah tangga terhadap beras (Kg/kapita/tahun).

KBN = kebutuhan normatif terhadap beras (Kg/kapita/tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pokok Rumah Tangga Miskin

Mayoritas kepala keluarga dari rumah tangga miskin berada pada usia produktif (Tabel 2). Apabila dilihat secara keseluruhan di Jawa Barat, 56,3 persen kepala keluarga di perdesaan dan 66,3 persen di perkotaan masuk dalam kategori usia produktif dengan umur rata-rata kepala keluarga masing-masing 51,9 tahun dan 52,5 tahun. Pola serupa juga dijumpai di kabupaten lokasi studi.

Sebagian besar kepala keluarga di perdesaan (80,0 persen) dan perkotaan (62.5 persen) mempunyai pendidikan formal yang relative rendah (yaitu lulus SD atau lebih rendah) dengan rata-rata pendidikan formal yang mampu ditempuh masing-masing 4,9 tahun dan 6,6 tahun. Kondisi tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Kabupaten Bogor relative lebih buruk dibandingkan Kabupaten Sumedang (Tabel 2).

Secara rata-rata ukuran rumah tangga miskin di Jawa Barat relatif tidak besar yaitu 4 orang per rumah tangga untuk perdesaan dan 5 orang per rumah tangga untuk perkotaan. Sementara itu, sebanyak 35,6 persen rumah tangga menyatakan memiliki anak yang putus sekolah. Keberadaan anak putus sekolah masih terbilang cukup besar baik di perdesaan maupun di perkotaan, yaitu masing-masing sebanyak 38,8 persen dan 32,5 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Propinsi Jawa Barat

Karakteristik Rumah Tangga	Sumedang			Bogor			Jawa Barat		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
1) Umur Kepala Rumah Tangga (th)									
a. < 30	5.0	2.5	3.8	0.0	0.0	0.0	2.5	1.3	1.9
b. 30 – 55	57.5	67.5	62.5	50.0	62.5	56.3	53.8	65.0	59.4
c. > 55	37.5	30.0	33.8	50.0	37.5	43.8	43.8	33.8	38.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	48.3	50.1	49.2	55.4	54.9	55.2	51.9	52.5	52.2
2) Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga (th)									
a. 0	2.5	7.5	5.0	42.5	12.5	27.5	22.5	10.0	16.3
b. 1-6	65.0	45.0	55.0	50.0	60.0	55.0	57.5	52.5	55.0
c. 7-9	22.5	22.5	22.5	5.0	20.0	12.5	13.8	21.3	17.5
d. 10-12	10.0	25.0	17.5	2.5	7.5	5.0	6.3	16.3	11.3
e. > 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	6.7	7.3	7.0	3.0	6.0	4.5	4.9	6.6	5.7
3) Jumlah Anggota Rumah Tangga									
a. 1-4	55.0	40.0	47.5	45.0	30.0	37.5	50.0	35.0	42.5
b. > 4	45.0	60.0	52.5	55.0	70.0	62.5	50.0	65.0	57.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	4.4	5.0	4.7	4.6	5.3	5.0	4.0	5.0	4.8
4) Keberadaan anak putus sekolah									
a. Ada	15.0	22.5	18.8	62.5	42.5	52.5	38.8	32.5	35.6
b. Tidak Ada	85.0	77.5	81.3	37.5	57.5	47.5	61.3	67.5	64.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : data primer, diolah

Karakteristik Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa pendapatan RTM yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih besar dibandingkan yang tinggal di perdesaan. Rata-rata pendapatan total masing-masing RTM di perdesaan dan perkotaan adalah Rp 630.529/bulan dan Rp 706.956/bulan. Pola serupa juga dijumpai di dua kabupaten sampel (Tabel 3).

Sejalan dengan tingkat pendapatan, besarnya pengeluaran RTM yang tinggal di wilayah perkotaan juga cenderung lebih tinggi dibandingkan RTM yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut berlaku baik untuk pengeluaran pangan ataupun non-pangan. Untuk pengeluaran pangan, rata-rata pengeluaran RTM di Jawa Barat pada wilayah perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah sebesar Rp 359.561 dan Rp 409.990 per bulan. Adapun untuk pengeluaran non-pangan, rata-rata pengeluaran RTM pada wilayah perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah sebesar Rp 380.581/bulan dan Rp 436.445/bulan (Tabel 3).

Tabel 3. Distribusi RTM berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran

Uraian	Sumedang (%)			Bogor (%)			Jawa Barat (%)		
	Pedesaan	Perkotaan	Total	Pedesaan	Perkotaan	Total	Pedesaan	Perkotaan	Total
1. Pendapatan RT Total Perbulan (Rp)									
a. <268577	17.5	17.5	17.5	2.5	2.5	2.5	10.0	10.0	10.0
b. 268577-10689088	72.5	72.5	72.5	87.5	82.5	85.0	80.0	77.5	78.8
c. >1068908	10.0	10.0	10.0	10.0	15.0	12.5	10.0	12.5	11.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	568089.6	575026.0	571557.8	692968.8	838885.4	765927.1	630529.2	706955.7	668742.4
2. Pengeluaran RT Perbulan Pangan (Rp)									
a. <149252	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5	7.5
b. 149252-620299	85.0	80.0	82.5	85.0	70.0	77.5	85.0	75.0	80.0
c. > 620299	0.0	5.0	2.5	15.0	30.0	22.5	7.5	17.5	12.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	254520.0	295233.1	274876.6	464601.7	524746.7	494674.3	359560.9	409989.9	3847754
Non Pangan(Rp)									
a. <53904	10.0	7.5	8.8	5.0	0.0	2.5	7.5	3.8	5.6
b. 53904-763122	80.0	87.5	83.8	90.0	90.0	90.0	85.0	88.8	86.9
c. >763122	10.0	5.0	7.5	5.0	10.0	7.5	7.5	7.5	7.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	390711.3	405060.4	397885.8	370451.3	467829.2	419140.2	380581.3	436444.8	408513.0

Kondisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin

Ilham dan Sinaga (2009) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa pangsa pengeluaran pangan layak dijadikan indikator ketahanan pangan karena mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai ukuran ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi, keanekaragaman pangan, dan pendapatan. Dalam kajian ini, analisis terhadap kondisi ketahanan pangan juga menggunakan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator ketahanan pangan dari rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap rumah tangga miskin di Jawa Barat diketahui bahwa terdapat sebanyak 35,6 persen rumah tangga miskin di wilayah Jawa Barat yang proporsi pengeluarannya lebih dari 60 persen (Tabel 4). Temuan ini mengindikasikan bahwa sejumlah rumah tangga tersebut diduga menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin lainnya.

Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Pangsa Pengeluaran Pangan

Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga	Sumedang			Bogor			Jawa Barat		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
< 40 persen	30.0	47.5	38.8	15.0	20.0	17.5	22.5	33.8	28.1
40 - 60 persen	37.5	27.5	32.5	37.5	42.5	40.0	37.5	35.0	36.3
> 60 persen	32.5	25.0	28.8	47.5	37.5	42.5	40.0	31.3	35.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : data primer, diolah.

Apabila dikaji berdasarkan wilayah diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin yang terindikasi menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan relative lebih besar berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan (Tabel 4). Untuk wilayah perdesaan di Jawa Barat terdapat 40,0 persen rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 60 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 31,3 persen rumah tangga. Hasil serupa juga terjadi di dua kabupaten yang menjadi lokasi studi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sekalipun di wilayah perdesaan usaha pertanian menjadi salah satu usaha utama yang berkembang di masyarakat tetapi ternyata bagi rumah tangga miskin hal tersebut tidak membuat kondisi ketahanan pangan rumah tangganya lebih baik

dibandingkan yang berada di perkotaan. Hal tersebut diduga disebabkan kemampuan rumah tangga miskin pedesaan lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin perkotaan dalam mengakses pangan. Keterbatasan dalam akses pangan tersebut terkait dengan daya beli, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu diketahui bahwa tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga miskin pedesaan (Rp 630.529/bulan) relative lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin perkotaan (Rp 706.956/bulan).

Apabila dikaji di dua lokasi sampel, diketahui bahwa proporsi rumah tangga dengan pangsa pengeluaran lebih dari 60 persen lebih banyak terdapat di Kabupaten Bogor dibandingkan Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Bogor terdapat 42,5 persen rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 60 persen, sedangkan di Kabupaten Sumedang terdapat 28,8 persen rumah tangga. Hal ini diduga terkait biaya hidup di Kabupaten Bogor yang relative lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Sumedang.

Lebih lanjut untuk tingkat konsumsi beras yang merupakan pangan utama ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa tingkat konsumsi rumah tangga miskin terhadap beras relative tinggi. Jumlah rata-rata beras yang dikonsumsi rumah tangga miskin berkisar 36,7 – 47,9 kg/bulan dengan konsumsi per kapita berkisar antara 9,2 – 11,6 kg/bulan. Apabila dibandingkan dengan norma Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu 100 kg/kapita/tahun, ternyata bahwa konsumsi rumah tangga miskin pedesaan dan perkotaan melebihi norma tersebut. Temuan ini tidak bermakna bahwa rumah tangga miskin di Propinsi Jawa Barat tidak menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Temuan tersebut diduga kuat lebih menunjukkan bahwa rumah tangga miskin menjadikan beras sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan energi. Sementara itu, rendahnya daya beli rumah tangga miskin menjadi pembatas untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya.

Tabel 5. Rataan Tingkat Konsumsi Beras Rumah Tangga Miskin

Uraian	Sumedang		Bogor		Jawa Barat	
	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (kg/RTM/bln)	36.7	41.9	47.9	46.2	42.3	44.0
Konsumsi per Kapita (kg/kap/bln)	9.7	9.2	11.6	9.2	10.6	9.2
Indeks Konsumsi Beras RTM (persen)	116.8	110.4	139.2	110.4	127.2	110.4

Sumber : data primer, diolah.

Apabila dikaji berdasarkan wilayah diketahui bahwa rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung memiliki tingkat konsumsi beras per kapita yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan masyarakat miskin di perdesaan terhadap beras relative lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan. Hal tersebut diduga karena perbedaan dalam pola konsumsi masyarakat di kedua wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa karakteristik rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan relatif tidak berbeda. Secara umum kepala rumah tangga miskin baik di perdesaan maupun perkotaan berada pada usia produktif (kurang dari 55 tahun) dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak sekolah atau hanya sekolah dasar. Jumlah anggota rumah tangga umumnya berkisar antara 4-5 orang dan sekitar 35 persen rumah tangga memiliki anak putus sekolah. Tingkat pendapatan rata-rata RTM di wilayah perdesaan relatif lebih kecil dibandingkan perkotaan. Kondisi serupa juga dijumpai pada pengeluaran rumah tangga miskin, baik pengeluaran pangan ataupun non-pangan.

Terdapat sekitar 35 persen rumah tangga miskin di Propinsi Jawa Barat memiliki pangsa pengeluaran pangan lebih dari 60 persen. Sejumlah rumah tangga tersebut diduga menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin lainnya. Hal lain yang juga dapat disimpulkan adalah rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung memiliki tingkat konsumsi beras per kapita yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di perkotaan.

Berdasarkan kesimpulan, saran yang diberikan adalah: (1) Untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras maka program diversifikasi pangan perlu lebih dioptimalkan, bukan hanya pada sisi produksi tetapi juga sisi konsumsi. Ketersediaan bahan pangan yang beragam dan dengan tingkat harga yang relatif murah akan mendorong konsumsi pangan tidak hanya bergantung pada beras. (2) Untuk meningkatkan akses pangan bagi rumah tangga miskin maka upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong kenaikan tingkat pendapatan rumah tangga. Untuk itu, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi dalam Ketahanan Pangan. *Dalam: Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII "Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi"*. BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2007. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2007*. BPS Jawa Barat. Bandung.
- Ilham, N dan Sinaga, B.M. 2009. *Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan Sebagai Indikator Ketahanan Pangan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor.
- Maxwell S. and Slater, R. 2003. *Food Policy Old and New*. *Development Policy Review*, Vol. 21(5-6).
- Nicholson, W. 1997. *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. *7th Edition*. The Dryden Press, Harcourt Brace College Publisher.
- Suhardjo. 1996. *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20 – 30 Mei 1996, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. IMPAC, Jakarta.
- Todaro, M.P. 1989. *Economic Development in the Third World, 4 th ed*: New York: Longman.

**KEMITRAAN PEMASARAN SEBAGAI SARANA PENGENTASAN
KEMISKINAN: IDE, LANGKAH DAN PELAKSANAAN KASUS DI
PANGKALAN Pendaratan IKAN JUWANA, KABUPATEN PATI
JAWA TENGAH**

(Marketing Partnership) as a Means of Poverty Eradication: idea, Steps to Take
and Implementation. a Case of Juwana Fishery Landing Point.)

Suharno

Dep. Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen-IPB

ABSTRAK

Makalah methodologis ini menyajikan ide penggunaan kemitraan pemasaran bagi pengentasan kemiskinan nelayan. Ide lahir sebagai respons atas gejala kemiskinan nelayan yang prevalen di Indonesia. Sebagai langkah awal, diadakan penelitian yang bertujuan (1) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan, (2) menjangkau aspirasi *stakeholders* tentang Model kemitraan dalam rantai pasokan dan (3) merumuskan model prototype pengentasan kemiskinan berbasis kemitraan dalam rantai pasokan komoditi perikanan rakyat (*SCM Model*). Penelitian selama 5 bulan tahun 2009 menggunakan data primer dari 81 responden ditetapkan menggunakan *stratified purposive sampling methods*. Selain itu penelitian menggunakan data sekunder. Methoda pengumpulan data meliputi wawancara, FGD dan observasi. Analisis meliputi analisis pendapatan dan belanja, efisiensi rantai pasokan dan analisis kelembagaan ekonomi. Tipikal masyarakat nelayan terdiri dari anak buah kapal (ABK), nahkoda, pemilik dengan ragam pendapatan yang tajam. ABK dan pendega paling rentan terhadap resiko kemiskinan dan adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui manajemen belanja. Ada 9 (sembilan) pelaku dan terdapat 4 (empat) pola distribusi bagi komoditi hasil tangkapan dengan efisiensi masih bisa ditingkatkan. Kemitraan perlu memasukkan Tempat Pelelangan Ikan, nelayan pemilik, bakul (pedagang besar maupun kecil), industri pengolahan, industri penyimpanan dingin, KUD Mina, dan pihak penyandang dana atau investor sebagai peserta. Model kemitraan bisa dicapai melalui revitalisasi mekanisme kerjasama yang ada, dibanding harus menciptakan model baru. Model kemitraan menyebutkan jumlah *stakeholders*, *governance*, dan mekanisme kemitraan. Sebagai langkah awal penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian uji coba dan implementasi model.

Kata kunci: Isiansi pemasaran, analisis pendapatan, pengentasan kemiskinan, kemitraan pemasaran.

ABSTRACT

This article presents an idea of using marketing partnership for poverty eradication. As a first step a research was conducted (1) to describe socio-economic conditions of the fisher community, (2) to tap stakeholder perceived need of marketing model of supply chain partnership and (3) to set up a prototype model of marketing partnership as a means of poverty eradication (*SCM Model*). The research used primary data (81 respondents) chosen with stratified purposive sampling methods. In addition, the research elaborated secondary data. Data collection methods includes interviews, GD and observation. Three analysis applied are income analysis, marketing efficiency, and economic institution analysis. There are three groups of fishery community: ship owners, captains, and crews with different income level and vulnerability to poverty. Crews and small ship owners are vulnerable to poverty.

Spending management is an option for poverty eradication in fisher community. There are 9 economic agents (income earners) and 4 distribution channels in the supply chains of fish catches. Marketing partnership model can be established by revitalising the existing one. The partnership should bring fish auction unit (TPI), fish collectors (bakul), fish processors, cold storages, fishery cooperatives, and the independent investors to be parties in the partnership. The marketing partnership model contains an arrangement of stakeholder roles, chain governance, transaction mechanism. This research looks forward to continuing steps of tryout and model implementation.

Keywords : Marketing efficiency, income analysis, marketing partnership, poverty eradication.

PENDAHULUAN

Bentuk kompromistis dua arus besar pemikiran pemberantasan kemiskinan (neo liberal dan sosial demokrat (Chambers, 1995 dalam Suharto, 2009) menunjukkan perlunya pengakuan terhadap kekuatan individu dan kelembagaan sosial sebagai pendekatan mengurangi kemiskinan. Kompromi itu menghasilkan dua prinsip panduan dalam penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2009): (1) Prinsip melahirkan kelembagaan yang memungkinkan kerjasama antar individu, terjadinya redistribusi pendapatan, vertikal maupun horisontal. (2) Strategi penanggulangan kemiskinan perlu memberi ruang bagi perbaikan kapasitas diri secara perorangan berupa ruang penyaluran pendapat dan penguatan keterampilan. Di samping itu, perlu dikondisikan secara institusional melalui intervensi negara perubahan fundamental pola pendistribusian pendapatan: Dengan kata lain penanggulangan kemiskinan menghadirkan insentif bagi terjadinya redistribusi antar individu. Itu berarti semua pihak merasa mendapatkan manfaat perubahan yang diciptakan. Berangkat dari prinsip ini, lahir pemikiran akan pola kemitraan di sepanjang rantai pasokan ikan sebagai sarana perbaikan kesejahteraan,

Tulisan ini menyajikan penggunaan model kemitraan pemasaran sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Ide pembentukan model kemitraan pemasaran dilatarbelakangi oleh fakta masih tingginya tingkat kemiskinan nelayan di tengah kekayaan sumberdaya laut dan perairan Indonesia. Kontras ini bisa dilihat pada fakta 1: Indonesia memiliki 17.508 buah pulau, memiliki luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 Km²) dengan segala potensi

² Ini merupakan informasi resmi yang masih menjadi sumber rujukan penulisan ilmiah.

ekonominya. Tetapi (fakta 2) masyarakat pesisir³ di Indonesia masih tergolong sebagai kelompok masyarakat yang paling miskin. Ini bisa dilihat pada pernyataan Saad (2005) diacu dalam Asianto (2007). Disebutkan bahwa prevalensi kemiskinan masyarakat pesisir yang mendiami 8.090 desa dan diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa. Dengan kriteria batas kemiskinan yang lebih ekstrem, angka itu bisa jauh lebih besar. Fakta 3 menyebutkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi, dan karenanya pengentasan kemiskinan bisa dicapai melalui perbaikan struktur ekonomi yang berlaku di wilayah setempat.

Sebagai bagian penting dalam langkah perumusan tujuan penelitian adalah: (1) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan, (2) Menjaring aspirasi *stakeholders* tentang MODEL kemitraan dalam rantai pasokan dan (3) bmerumuskan model prototype pengentasan kemiskinan berbasis kemitraan dalam rantai pasokan komoditi perikanan rakyat (*SCM Model*).

METODE PENELITIAN

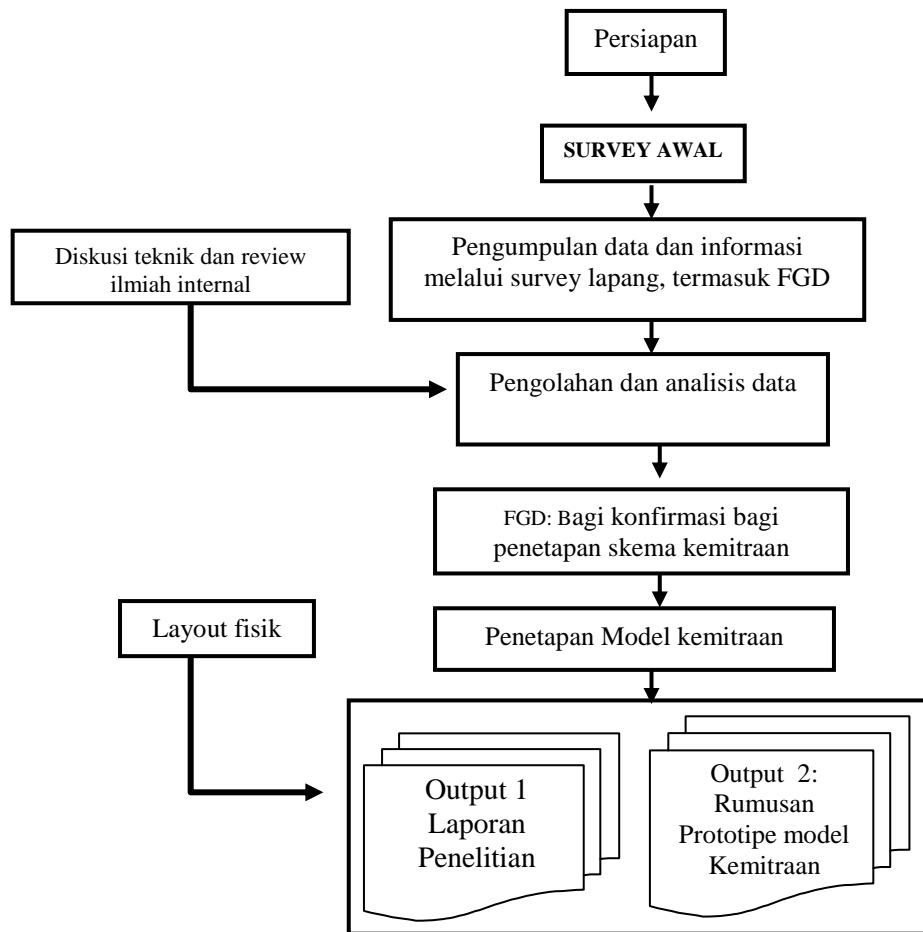
Data penelitian diambil dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah, bulan Juni hingga Desember 2009. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ditetapkan berdasarkan *stratified purposive sampling methods* dengan kriteria keterwakilan, ketersediaan waktu, dan ketersediaan sumber dana. Jumlah responden adalah 38 ABK, nelayan pendega, 9 nahkoda, pemilik kapal 11, pedagang pengumpul 5, pengolah 10, jumlah total 75 orang. Ditambah responden dari kalangan birokrat, wakil asosiasi nelayan dan aparat pelelangan jumlah menjadi 81 orang responden. Data sekunder yang dikumpulkan saat kunjungan lapang. Methoda pengumpulan data meliputi wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta pengamatan, menggunakan instrument penelitian berupa kuestioner, panduan wawancara, dan panduan FGD.

³ Secara khusus, yang dimaksud dengan masyarakat pesisir di sini adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir baik di tepi pantai pulau kecil maupun pulau besar, terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan.

Tabel 1. Daftar Data/Informasi dan Metode Pengumpulannya

No	Data Dan Informasi		Sumber/ Nara Sumber	Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan		
	Primer	Sekunder		Survey	Observasi	Kualitatif
1	Harga	harga	Nelayan, pedagang, restoran, rumah tangga, laporan TPI, Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√
2	Biaya		Nelayan, pedagang	√	√	√
3		Undang-undang dan peraturan	Pemerintah, daerah, pusat BAPPEDA, BPS, Dis-KP	√		
4		Assosiasi	Assosiasi	√		√
	Sarana/prasarana		Instansi/publik		√	
5	Produksi		Nelayan	√	√	
6	Pengolahan		Pengolah, pedagang	√	√	
7	pengangkutan		pedangang	√	√	
8	Transaksi		Nelayan, pedagang, rumah tangga	√	√	
9	Penanganan distribusi		Pedagang	√	√	
10	Pengamanan		Pedagang	√	√	
11	Analisis ahli					√

Analisis data yang diterapkan meliputi analisis efisiensi (pemasaran), analisis pendapatan dan konsumsi dan analisis kelembagaan ekonomi. Perbandingan antara nilai margin, biaya dan resiko ini nantinya secara total akan menunjukkan apakah sistem distribusi yang ada sudah efisien atau belum. Hasil analisis pendapatan dan konsumsi akan menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat akan kemiskinan dan potensi perbaikannya. Analisis kelembagaan menunjukkan efektivitas kerja kelembagaan yang ada dan mengarahkan model kemitraan pemasaran apa yang bisa dibangun. Melalui disuksi partisipatif dengan para pihak dalam *Focused Group Discussion* dan *judgement* ilmiah ditetapkan model optimal kemitraan pemasaran yang sedang diusahakan. Setelah dirumuskan dan diujicobakan akan diperoleh gambaran ideal mengenai bentuk kemitraan pemasaran yang siap diterapkan di tempat lain (replikasi). Tahap replikasi merupakan tahap penelitian berikutnya (gambar 1)



Gambar 1. Tahapan Perumusan Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Juwana, kecamatan di Kabupaten Pati berpotensi ekonom beragam. Selain perikanan (sector penting, lihat Tabel 2) Juwana diuntungkan secara administratif sebagai ibukota eks Kawedanan, dengan mempunyai beberapa keistimewaan dibanding dengan kecamatan lain di masa kini: Sarana pemerintahannya relatif lengkap. Terletak di jalur *Pantura* antara Pati dan Kabupaten Rembang, Juwana menjadi lebih dikenal dibanding kota kecamatan lain, karena aksesnya. Keberadaan pelabuhan memperkuat posisi ekonomi Juwana.

Tabel 2. Deskripsi Sektor Perikanan Kecamatan Juwana unit Bajomulyo

No	Uraian	Jumlah	
		2006	2008
1.	Nelayan (orang)		
	a. Juragan	750	717
	b. Pandega	2.031	2031
2.	Kapal Motor/Motor Tempel		
	a. Kapal motor besar	93	93
	b. Kapal motor mini	189	189
	c. Kapal tempel besar	143	143
	d. Kapal tempel sedang	299	299
	e. Kapal tempel kecil	111	111
3.	Alat Tangkap Ikan		
	a. <i>Purse seine</i>	93	93
	b. Dogol		
	c. Bundes/Krikrit		
	d. Jaring insang monofilament	210	210
	e. Jaring insang multifilament		
	f. Jaring insang trammel pejer	249	249
	g. Jaring trammel	151	151
	h. Jaring cantrang	40	40
	i. Pancing rawai	107	107
	j. Jala		
4	Tempat Pengawetan Ikan		
	a. Esesan	10	10
	b. Gereh	7	7
	c. Pindang	16	16
	d. Presto	13	13
	e. Panggang	26	26
	f. Krupuk ikan	21	21
	g. Terasi	2	2
	h. Lain-lain	5	5

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006, 2009

Pola Pendapatan dan Konsumsi

Hasil Penelitian pendahuluan (Suharno dan Farmayanti, 2009) menunjukkan ada tiga strata dalam masyarakat nelayan di Juwana: yaitu pemilik kapal, nahkoda, dan anak buah kapala yang terdiri dari juru mudi, *motorist* dan anak buah kapal biasa. Pendapatan semua strata ber pola musiman, mengikuti musim penangkapan ikan. Pemilik kapal besar dan kecil (pendega) berbeda signifikan dalam pendapatan. Nelayan pendega atau nelayan pantai adalah pemilik perahu penangkapan berjelajah lebih kurang 2 mill dari pantai.

Menggunakan pendapatan sebagai *proxy* kesejahteraan, ditemukan bahwa dua strata didalam masyarakat nelayan: ABK dan pendega merupakan strata yang rentan terhadap kemiskinan. Namun masyarakat nelayan di Juwana secara rata-

rata tidak tergolong miskin. Disamping itu pola konsumsi nelayan juga memiliki potensi rentan terhadap kemiskinan. Karenanya ada kebutuhan pembinaan dalam manajemen belanja sebagai salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan. Temuan lain mengindikasikan bahwa nilai tukar nelayan di Juwana tergolong baik, berarti kegiatan penangkapan mampu membiayai pengeluaran keluarga nelayan untuk barang dan jasa yang diproduksi di luar kegiatan penangkapan.

Pola Distribusi Hasil Perikanan dalam Rantai Pasokan

Kajian rantai pasokan menghasilkan kesimpulan berikut (Suharno dan Farmayanti, 2009): (1) Ada 4 pola rantai pasokan hasil perikanan tangkap yaitu:

Pola - 1: nelayan → ke perusahaan pembekuan/penyimpanan dingin → eksportir.

Pola - 2: nelayan → TPI → perusahaan penyimpanan dingin → ekspor.

Pola - 3: nelayan → TPI → pengolah (pengasin, pemindang, pengasap, *fillet*) → pedagang besar → distributor → pengecer (dalam atau di luar kota) → konsumen.

Pola - 4 : (nelayan → pengumpul → pedagang besar → distributor (ke dalam atau luar kota) → pengecer → konsumen. (2) rantai pasokan dinilai kurang efisien, dilihat dari bagian nelayan (*fisher share*) masih kurang dari 50% dari total harga yang dibayarkan konsumen. (3) inefisiensi layanan di pangkalan pendaratan ikan dan TPI menjadi penyebab dari kurang efisiennya (4) Belum ada komodisasi kepentingan, di sepanjang rantai pasokan dan kepentingan ABK belum sama sekali terakomodasi. (5) Organisasi atau individu yang terlibat di sepanjang rantai pasokan adalah: Pedagang pengumpul besar, Bakul pengumpul kecil, Pengolah pemindangan, Pengolah pengasapan, Pengolah pengasinan, Penampung besar (di Juwana atau di luar kota), Pengusaha penyimpanan dingin (utamanya di Juwana) Eksportir (di Juwana atau luar kota) Hotel dan restoran (di Juwana atau luar kota).

Kajian Kelembagaan Ekonomi

Kajian kelembagaan ekonomi juga menunjukkan ada kebutuhan MODEL kemitraan baru, atau hasil revitalisasi model, dengan melibatkan kepentingan ABK dan pendega (Suharno dan Farmayanti, 2009) disamping Tempat Pelelangan

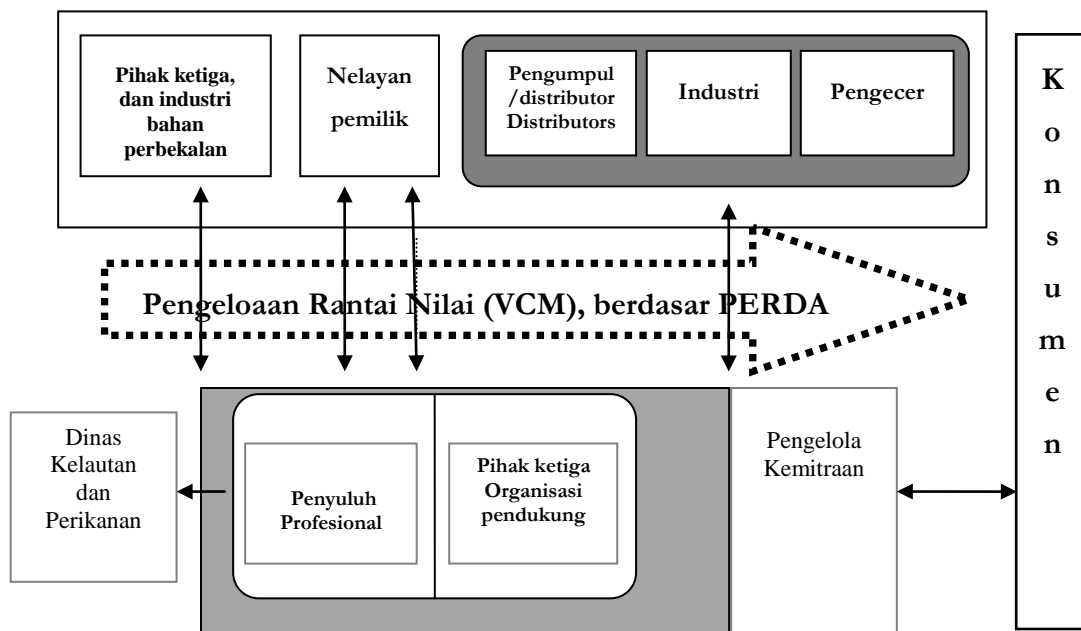
Ikan, Nelayan pemilik, Bakul (pedagang besar maupun kecil), Industri pengolahan, Industri penyimpanan dingin, KUD Mina, investor, dan penjamin mutu sanitasi TPI.

Perimbangan dalam Merancang Model Kemitraan Pemasaran

Faktor-faktor berikut mendesak untuk menjadi pertimbangan dan dimasukkan dalam ketentuan kemitraan dimaksud: (1) Anak buah kapal (ABK), pendega (nelayan pemilik kapal kecil, berjarak jangkau 2 mill) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap resiko kemiskinan. Untuk itu perlu dibuat pola bagi hasil baru yang memungkinkan adanya jaminan pendapatan saat ABK tidak melaut. (2) Manajemen belanja keluarga bisa menjadi faktor penentu bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. (3) TPI memegang peran kunci bagi perbaikan harga, pencatatan data produksi, yang pada gilirannya akan bisa menjadi bahan akurat untuk menilai kandungan sumberdaya kelautan dan perikanan. (4) Namun TPI mengalami kemunduran peran, ditandai dari menurunnya produksi ikan yang menggunakan PPI dan TPI Juwana sebagai tempat berlabuh dan pelelangan dan Peran KUD Mino Saron Mino tidak bekerja sesuai dengan harapan sesuai asasnya, yakni mewakili kepentingan anggota. (4) Banyak lembaga ekonomi namun semangat komersial dan tidak lenturnya persyaratan menjadi penghambat bagi warga nelayan yang rentan terhadap resiko kemiskinan, (5) Peran bakul cukup dominan dalam membentuk struktur pasar yang kurang kompetitif dengan dampak perburukan ekonomi nelayan. Ini terdeteksi dalam bentuk cara penentuan harga dan keterlambatan pembayaran di TPI. (6) TPI tidak mampu membayar *cash* pada nelayan, menyebabkan ketat dan sulitnya arus tunai di pihak nelayan pemilik.

Mempertimbangkan faktor faktor di atas, maka rancangan kemitraan rantai pasokan harus memuat ketentuan berikut: (1) TPI dikembalikan sebagai pelaksana lelang dan penjamin mutu fisik pasar lelang, penjamin arus tunai ABK dan pendega (2) KUD Mina perlu melayakkan nelayan ABK, bakul dan pengolah yang menjamin pelaksanaan pembayaran *cash* kepada nelayan pemilik setelah pelelangan, terutama bagi pendega yang melelang ikannya. KUD Mina adalah penjamin informasi pasar secara transparan bagi para anggota. (3) TPI dan KUD

Mina menjamin bahwa nelayan pemilik mematuhi pola bagi hasil baru yang menjamin ABK mendapat jaminan hidup saat tidak melaut. (4) Peserta lelang (pembeli) wajib menyerahkan agunan (*caution*) penjamnin pembayaran tunai. (5) TPI lebih menjamin kesehatan ikan dan lingkungan. (6) diperlukan produk legislasi yang bisa memayungi secara hukum fungsi dan pendanaan peran TPI. (7) Ada ruang bagi penyandang dana dalam kemitraan (8) Dinas Kelautan dan melakukan pembinaan berlandaskan PERDA setempat. Gambar 2 merangkum model yang diajukan.



Gambar 2. Model Kemitraan dalam Rantai Pasokan Perikanan Rakyat

KESIMPULAN

Membangun model kemitraan adalah kegiatan manajerial yang berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Oleh karena itu dalam melaksanakannya selain pemahaman mengenai taktik manajerial, perlu didukung oleh temuan ilmiah yang berbasis data yang valid. Artikel ini mendemonstrasikan bahwa sebelum langkah-langkah manajerial diterapkan, seorang perancang perlu melakukan penelitian dasar yang akan memberikannya informasi valid mengenai issue yang sedang akan dirancang.

Dalam kasus perancangan model informasi yang perlu dihasilkan oleh penelitian ilmiah adalah informasi mengenai pola pendapatan, efisiensi distribusi dalam rantai pasokan dana informasi tentang kinerja kelembagaan yang ada. Setelah informasi dimaksud bisa dikumpulkan secara valid oleh perancang, baru langkah-langkah manajerial dijalankan.

Dalam kasus PPI Juwana model kemitraan dirancang dengan melakukan revisi atas pola lama yang ada, dengan menambah pengaturan baru yang memungkinkan insentif tersebar merata pada peserta kemitraan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Apresiasi penulis kami tujukan kepada Direktoral Penelitian dan Pengembangan, DIKNAS yang melalui LPPM IPB telah memungkinkan terlaksanakannya ide perumusan model kemitraan pemasaran ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim peneliti Model Kemitraan dalam Rantai Pasokan Komoditi Perikanan Tangkap Rakyat yang menjadi dasar penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asianto, S. Analisis Pendapatan Masyarakat Pesisir dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Kasus : Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Skripsi. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor. 2006.
- Suharno, Narni Farmayanti: Model Kemitraan dalam Rantai Pasokan Komoditi Perikanan Tangkap Rakyat. 2009 (*unpublished*)
- Suharto, Edi. Konsep dan strategi Pengentasan Kemiskinan menurut Perspektif pekerjaan Sosial, artikel online, diakses tgl. 25 November 2009. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_13.htm.